



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 60
TAHUN 2023 TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diperlukan panduan perumusan arah kebijakan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk menentukan arah dan strategi pengelolaan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah perlu mendeskripsikan arah, langkah penyiapan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam bentuk peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2023 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan rencana pembangunan daerah, sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2023 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 90);
5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2023 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2023 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektroik Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Nomor 60) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Februari 2026

BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 2 Februari 2026

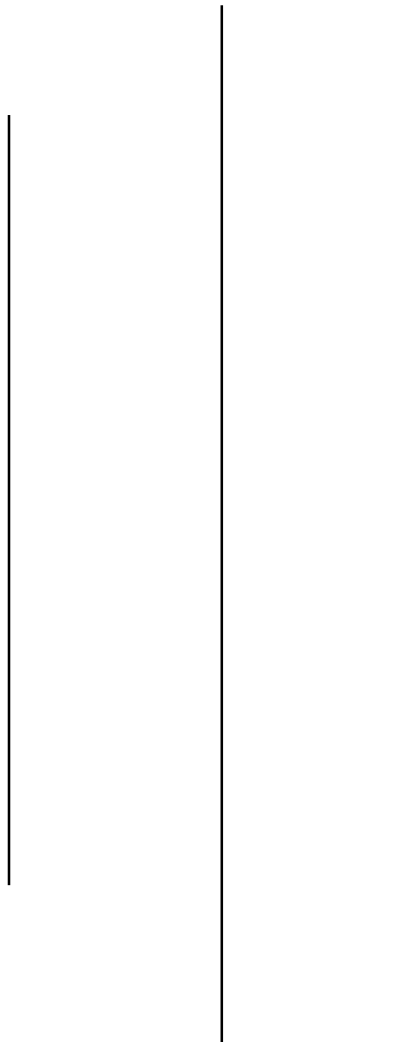
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

TRIYONO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KULON PROGO NOMOR 60
TAHUN 2023 TENTANG PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH DAERAH



Daftar Isi

Bab I Analisis Kesenjangan	4
1.1. Analisis Kesenjangan & Inisiatif Kegiatan Peta Rencana SPBE	5
Bab II Portofolio Inisiatif Indeks SPBE	45
2.1. Tata Kelola	46
2.1.1. Kebijakan Arsitektur SPBE (PR-T-001)	46
2.1.2. Kebijakan Peta Rencana SPBE (PR-T-002)	46
2.1.3. Kebijakan Manajemen Data (PR-T-003)	47
2.1.4. Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE (PR-T-004)	47
2.1.5. Kebijakan Pusat Data (PR-T-005)	48
2.1.6. Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (PR-T-006)	48
2.1.7. Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat (PR-T-007)	49
2.1.8. Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi (PR-T-008)	50
2.1.9. Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (PR-T-009)	50
2.1.10. Kebijakan Tim Koordinasi (PR-T-010)	51
2.1.11. Pembentukan Komite/Forum SPBE (PR-T-011)	51
2.1.12. Kolaborasi Penerapan SPBE (PR-T-012)	52
2.1.13. Evaluasi dan Revisi Tata Kelola SPBE (PR-T-013)	53
2.2. Manajemen SPBE	53
2.2.1. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko (PR-M-001)	53
2.2.2. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi (PR-M-002)	54
2.2.3. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Data (PR-M-003)	55
2.2.4. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Aset TIK (PR-M-004)	56
2.2.5. Penyusunan dan Penerapan Manajemen SDM TIK (PR-M-005)	56
2.2.6. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Pengetahuan (PR-M-006)	60
2.2.7. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Perubahan (PR-M-007)	60
2.2.8. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Layanan TIK (PR-M-008)	61
2.3. Layanan SPBE	62
2.3.1. Pengembangan Layanan RB Tematik (PR-L-001)	62
2.3.2. Pengembangan Layanan Prioritas SPBE (PR-L-002)	63
2.3.3. Pengembangan Portal Layanan Terintegrasi (PR-L-003)	65
2.3.4. Pengembangan Platform Helpdesk TIK (PR-L-004)	67
2.3.5. Survey Pengguna Layanan (PR-L-004)	68
2.4. Aplikasi SPBE	68
2.4.1. Pengembangan Aplikasi (PR-A-001)	68
2.4.2. Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (API Gateway) (PR-A-002)	70
2.4.3. Pengembangan Portal Data dan Dashboard (Big Data) (PR-A-003)	71
2.4.4. Pemeliharaan Aplikasi (PR-A-004)	71
2.5. Infrastruktur SPBE	72
2.5.1. Peningkatan Kapasitas Ruang dan Fasilitas Pendukung Pusat Data (PR-I-001)	72
2.5.2. Penyusunan Rencana Kapasitas (Capacity Plan) Infrastruktur Utama Server dan Storage (PR-I-002)	73
2.5.3. Pengadaan Pusat Pemulihan Bencana (PR-I-003)	74
2.5.4. Uji Coba Pemulihan Bencana Secara Periodik (PR-I-004)	75
2.5.5. Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah (PR-I-005)	76
2.5.6. Pemeliharaan Jaringan Dalam Kab Interkoneksi Perangkat Daerah/UPT (Unit Pelaksana Teknis) (PR-I-006)	76
2.5.7. Pengembangan Infrastruktur Jaringan Data Nirkabel (WiFi) Terintegrasi (PR-I-007)	77
2.5.8. Pembangunan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) (PR-I-008)	79
2.6. Keamanan Informasi	80
2.6.1. Penyusunan Kebijakan dan Manajemen Keamanan SPBE (PR-K-001)	80
2.6.2. Penyusunan SOP Keamanan Data dan Informasi (PR-K-002)	81
2.6.3. Penyusunan SOP Keamanan Aplikasi SPBE (PR-K-003)	82
2.6.4. Penyusunan SOP Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (PR-K-004)	84
2.6.5. Penyusunan SOP Keamanan Jaringan Intra Pemerintah (PR-K-005)	85
2.6.6. Sertifikasi Standar Keamanan Informasi (Indeks KAMI/ ISO 27001) (PR-K-006)	86
2.6.7. Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi (PR-K-007)	87
2.6.8. Edukasi dan Sosialisasi Keamanan SPBE (PR-K-008)	88

2.7. Audit SPBE	88
2.7.1. Pelaksanaan Audit TIK (PR-AT-001)	88
Bab III Peta Rencana SPBE	90
3.1. Penyelarasan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo 2025-2029	91
Bab IV Penutup	131
LAMPIRAN	133

Bab I Analisis Kesenjangan

1.1. Analisis Kesenjangan & Inisiatif Kegiatan Peta Rencana SPBE

Analisis kesenjangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilakukan sebagai bagian dari perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mengidentifikasi perbedaan antara kondisi eksisting dan kondisi yang diharapkan, yang meliputi aspek kebijakan, tata kelola, sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, dan layanan SPBE.

Inisiatif kegiatan yang dihasilkan merupakan tindak lanjut dari analisis kesenjangan terhadap proses bisnis yang berjalan di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Analisis ini dilakukan dengan meninjau keselarasan antara kondisi eksisting dengan standar tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang ideal. Proses analisis mencakup evaluasi terhadap efisiensi, efektivitas, dan tingkat digitalisasi dari proses bisnis yang ada, serta mengidentifikasi hambatan yang dapat menghambat optimalisasi layanan pemerintahan. Dari hasil analisis kesenjangan tersebut, dirumuskan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk menyederhanakan, meningkatkan efisiensi, serta mempercepat transformasi digital dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun inisiatif yang diusulkan berfokus pada peningkatan infrastruktur teknologi, penguatan integrasi sistem informasi, otomatisasi layanan administrasi, serta pengembangan kebijakan pendukung dalam implementasi SPBE. Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat mengoptimalkan layanan publik berbasis digital, meningkatkan akuntabilitas, serta mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi. Hasil analisis kesenjangan dan rekomendasi inisiatif program yang telah dirumuskan menjadi landasan strategis dalam upaya transformasi digital yang berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Adapun hasil analisis kesenjangan dan inisiatif program atau rekomendasi proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut.

Tabel 1.1.1. Analisis Kesenjangan dan Rekomendasi Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (<i>Project/Activities</i>)
KP-DAB 02.08.04.03	Pengawasan Penanaman Modal	Perlunya Layanan Investasi (PR-L-01-02) karena pelaksanaan penanaman modal masih menghadapi kendala dalam transparansi, perizinan yang lambat, dan kurangnya informasi bagi investor, sehingga diperlukan layanan yang lebih efisien dan terstruktur.	Layanan Investasi (PR-L-01-02)
		Perlunya layanan investasi karena proses perizinan dan fasilitasi penanaman modal masih belum optimal, menyebabkan rendahnya minat investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Kulon Progo.	Layanan Investasi (PR-L-01-02)
KP-DAB 03.03.02.03	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Hardware Blue Full Cycle.	Pengadaan Hardware Blue Full Cycle
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan Pengembangan Aplikasi PKB.	Pengembangan Aplikasi PKB
KP-DAB 03.06.01.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan Pengembangan Aplikasi SIMTARUKU.	Pengembangan Aplikasi SIMTARUKU

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/Activities)
KP-DAB 03.06.01.02	Pemanfaatan Ruang	Perlunya optimalisasi penyelenggaraan layanan SPBE untuk mendukung pelaksanaan Pendataan Tata Ruang Webgis.	Pendataan Tata Ruang Webgis
KP-DAB 04.01.02.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan Pengembangan Aplikasi SimoKu.	Pengembangan Aplikasi SimoKu
KP-DAB 04.01.04.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) dan UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan)	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Laptop.	Pengadaan Laptop
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan PC.	Pengadaan PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Printer.	Pengadaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Scanner.	Pengadaan Scanner
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan UPS.	Pengadaan UPS
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan Pembuatan Aplikasi SIMOBAT.	Pembuatan Aplikasi SIMOBAT
KP-DAB 04.01.04.02	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) dan UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan) Rujukan	Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan Pembuatan Aplikasi Satu Pintu LebkesKu.	Pembuatan Aplikasi Satu Pintu LebkesKu
KP-DAB 04.01.04.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Perlunya Layanan Kesehatan (PR-L-02-02) karena fasilitas pelayanan kesehatan masih menghadapi kendala dalam akses, distribusi tenaga medis, dan efektivitas layanan, sehingga diperlukan sistem yang lebih terintegrasi dan responsif.	Evaluasi Layanan Kesehatan Digital (PR-L-02-02)
		Perlunya layanan kesehatan karena masih ditemukan kendala dalam akses layanan medis, kurangnya tenaga kesehatan di daerah terpencil, serta keterbatasan sistem rujukan berbasis digital.	Evaluasi Layanan Kesehatan Digital (PR-L-02-02)
KP-DAB 04.02.04.02	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Perlunya Layanan Bantuan Sosial (PR-L-02-03) karena distribusi bantuan sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) masih belum optimal akibat data yang kurang akurat dan mekanisme yang belum efisien, sehingga perlu sistem layanan yang lebih transparan dan akuntabel.	Evaluasi Layanan Bantuan Sosial Digital (PR-L-02-03)
		Perlunya layanan bantuan sosial karena data penerima manfaat belum sepenuhnya valid dan terintegrasi, sehingga distribusi bantuan sering tidak tepat sasaran dan berpotensi tumpang tindih.	Evaluasi Layanan Bantuan Sosial Digital (PR-L-02-03)
KP-DAB 04.02.05.01	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlunya Layanan Kemiskinan (PR-L-01-01) karena masih banyak PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang belum mendapatkan akses perlindungan dan jaminan sosial secara optimal, sehingga	Layanan Kemiskinan (PR-L-01-01)

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/Activities)
		diperlukan sistem layanan yang lebih terintegrasi dan responsif.	
		Perlunya layanan kemiskinan karena masih terdapat kesenjangan dalam distribusi bantuan sosial akibat data penerima yang belum terintegrasi dengan baik, menyebabkan kurang tepatnya sasaran penerima manfaat.	Layanan Kemiskinan (PR-L-01-01)
KP-DAB 04.02.06.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan Pengembangan Aplikasi SIBELAKU.	Pengembangan Aplikasi SIBELAKU
KP-DAB 05.01.02.01	Fasilitasi Hukum	Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan Pengembangan Aplikasi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum).	Pengembangan Aplikasi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
KP-DAB 05.02.01.01	Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan Pengembangan Aplikasi BangsaKU.	Pengembangan Aplikasi BangsaKU
KP-DAB 05.02.01.03	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Perlunya Layanan Kepolisian (PR-L-02-09) karena penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pelaporan masyarakat, sehingga diperlukan layanan yang mempermudah pelaporan, koordinasi, dan respons cepat dari aparat keamanan.	Evaluasi Layanan Kepolisian Digital (PR-L-02-09)
		Perlunya layanan kepolisian karena masih terdapat keterlambatan dalam penanganan gangguan ketertiban umum akibat kurangnya integrasi sistem pelaporan dan pemantauan secara real-time.	Evaluasi Layanan Kepolisian Digital (PR-L-02-09)
KP-DAB 06.01.02.01	Pengelolaan Pendidikan	Perlunya Layanan Pendidikan (PR-L-02-01) karena pengelolaan pendidikan masih kurang merata dalam akses dan kualitas, sehingga dibutuhkan sistem layanan yang mendukung pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.	Evaluasi Layanan Pendidikan Digital (PR-L-02-01)
		Perlunya layanan pendidikan karena masih terdapat ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di beberapa wilayah, serta rendahnya integrasi data siswa untuk mendukung kebijakan berbasis data.	Evaluasi Layanan Pendidikan Digital (PR-L-02-01)
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Laptop.	Pengadaan Laptop
KP-DAB 06.03.02.01	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Inovasi-ku.	Pengembangan Aplikasi Inovasi-ku
KP-DAB 08.02.01.01	Pengelolaan Kebudayaan	Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan Pembuatan Aplikasi BUDAYAKU.	Pembuatan Aplikasi BUDAYAKU
KP-DAB 09.01.07.02	Pelayanan Pencatatan Sipil	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Scanner.	Pengadaan Scanner
KP-DAB 09.01.07.06	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Perlunya Layanan Administrasi Kependudukan (PR-L-02-04) karena pelayanan pendaftaran penduduk masih mengalami keterlambatan dalam proses verifikasi dan pencatatan, sehingga digitalisasi diperlukan untuk mempercepat dan mempermudah layanan.	Evaluasi Layanan Administrasi Kependudukan Digital (PR-L-02-04)
		Perlunya layanan administrasi kependudukan	Evaluasi Layanan Administrasi

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/Activities)
		karena masih terdapat kendala dalam pencatatan data kependudukan, rendahnya literasi masyarakat terhadap layanan daring, serta lambatnya proses validasi dokumen kependudukan.	Kependudukan Digital (PR-L-02-04)
KP-DAB 09.02.03.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perlunya Layanan Transaksi Keuangan (PR-L-02-05) karena laporan keuangan pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam transparansi, efisiensi pencatatan, dan integrasi antarinstansi, sehingga diperlukan sistem layanan transaksi yang lebih akurat dan real-time.	Evaluasi Layanan Transaksi Keuangan Digital (PR-L-02-05)
		Perlunya layanan transaksi keuangan karena pencatatan keuangan daerah masih menghadapi tantangan dalam transparansi, akurasi, dan integrasi dengan sistem keuangan pusat, sehingga menghambat efektivitas pengelolaan anggaran.	Evaluasi Layanan Transaksi Keuangan Digital (PR-L-02-05)
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan Pembuatan Aplikasi myPOTENSI.	Pembuatan Aplikasi myPOTENSI
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan Pengembangan Aplikasi e-BPHTB.	Pengembangan Aplikasi e-BPHTB
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan Pengembangan Aplikasi e-Layanan.	Pengembangan Aplikasi e-Layanan
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan Pengembangan Aplikasi e-SPPT.	Pengembangan Aplikasi e-SPPT
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan Pengembangan Aplikasi e-SPTPD.	Pengembangan Aplikasi e-SPTPD
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan Pengembangan Aplikasi MyPBB.	Pengembangan Aplikasi MyPBB
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan Pengembangan Aplikasi SIMPATDA.	Pengembangan Aplikasi SIMPATDA
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan Pengembangan Aplikasi SISMIOP.	Pengembangan Aplikasi SISMIOP
KP-DAB 09.02.06.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Perlunya Evaluasi dan perbaikan manajemen aset TIK (PR-M-04-05) karena pengelolaan barang milik daerah, khususnya aset TIK, masih belum optimal dalam pencatatan, pemeliharaan, dan pemanfaatan, sehingga berisiko menyebabkan inefisiensi dan pemborosan anggaran.	Evaluasi dan perbaikan manajemen aset TIK (PR-M-04-05)
		Perlunya evaluasi dan perbaikan manajemen aset TIK karena pengelolaan aset saat ini belum efisien, menyebabkan banyak aset yang tidak termanfaatkan optimal atau tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi.	Evaluasi dan perbaikan manajemen aset TIK (PR-M-04-05)
		Perlunya inventarisasi aset SPBE karena masih terdapat aplikasi dan infrastruktur yang tidak terdokumentasi dengan baik, mengakibatkan kesulitan dalam pemeliharaan, peningkatan, serta integrasi sistem yang ada.	Menginventarisasi aset SPBE (aplikasi dan infrastruktur) (PR-M-04-04)

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/Activities)
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan.	Pemeliharaan Jaringan
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pemeliharaan Komputer.	Pemeliharaan Komputer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pemeliharaan PC.	Pemeliharaan PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan Komputer.	Pemeliharaan Peralatan Komputer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pemeliharaan Printer.	Pemeliharaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Alat Zoom Meeting.	Pengadaan Alat Zoom Meeting
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan CCTV.	Pengadaan CCTV
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Hardisk.	Pengadaan Hardisk
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Keyboard.	Pengadaan Keyboard
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Komputer Server.	Pengadaan Komputer Server
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Laptop.	Pengadaan Laptop
			Pengadaan Laptop
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan LCD Proyektor.	Pengadaan LCD Proyektor
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Monitor.	Pengadaan Monitor
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Mouse.	Pengadaan Mouse
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan PC.	Pengadaan PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Perangkat Jaringan.	Pengadaan Perangkat Jaringan
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Printer.	Pengadaan Printer
			Pengadaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Pusat Data.	Pengadaan Pusat Data
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Scanner.	Pengadaan Scanner
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Tablet.	Pengadaan Tablet
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan TV LED.	Pengadaan TV LED
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan UPS.	Pengadaan UPS
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Penyediaan	Penyediaan Jaringan Internet

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/Activities)
		Jaringan Internet.	
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan Pembuatan Aplikasi SIMAGENDA.	Pembuatan Aplikasi SIMAGENDA
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan Pengembangan Aplikasi SIM-Aset.	Pengembangan Aplikasi SIM-Aset
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan Pengembangan Aplikasi SIM-Persediaan.	Pengembangan Aplikasi SIM-Persediaan
		Perlunya penyusunan SOP perencanaan aset TIK karena belum ada standar operasional dalam pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset TIK, menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran dan aset teknologi.	Penyusunan SOP perencanaan aset TIK (PR-M-04-01)
		Perlunya SOP pengadaan aset TIK karena masih terdapat ketidakteraturan dalam perencanaan dan pengadaan aset, menyebabkan pemborosan anggaran serta ketidaksesuaian kebutuhan dengan spesifikasi teknologi yang diadakan.	Penyusunan SOP pengadaan aset TIK (PR-M-04-02)
		Perlunya SOP penghapusan aset TIK karena belum ada standar baku dalam proses penghapusan, sehingga banyak aset usang yang tidak terdata dengan baik dan tetap membebani anggaran pemeliharaan.	Penyusunan SOP atas penghapusan aset TIK (PR-M-04-03)
KP-DAB 09.02.11.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan Pengembangan Aplikasi ePBJKU.	Pengembangan Aplikasi ePBJKU
KP-DAB 09.03.02.01	Pengelolaan e-Government	Perlunya asesmen kondisi jaringan intra pemerintah karena masih ditemukan kendala akses dan keandalan konektivitas antar unit kerja, yang dapat menghambat efektivitas layanan publik dan koordinasi internal.	Asesmen kondisi saat ini utilisasi kapasitas dan kinerja infrastruktur jaringan intra pemerintah (PR-I-05-01)
		Perlunya asesmen kondisi jaringan nirkabel karena cakupan dan kualitas sinyal yang tidak merata masih menjadi kendala utama dalam penggunaan layanan berbasis wireless di lingkungan pemerintahan.	Asesmen kondisi infrastruktur jaringan data nirkabel saat ini (PR-I-07-01)
		Perlunya asesmen kondisi ruang server karena infrastruktur pendukung seperti pendingin, UPS, dan sistem pemadam kebakaran belum terdata dengan baik, sehingga berisiko mengganggu keberlanjutan operasional pusat data.	Asesmen kondisi saat ini ruangan dan perangkat pendukung ruang server (sistem pendingin ruangan, sistem pemadam kebakaran, ups, genset) (PR-I-01-01)
		Perlunya asesmen kondisi server dan jaringan karena sering terjadi gangguan konektivitas yang berdampak pada aksesibilitas layanan, namun belum ada data komprehensif terkait performa jaringan.	Asesmen kondisi server dan jaringan untuk memastikan ketersediaan, kehandalan layanan TIK PR-I-02-02)
		Perlunya Asesmen kondisi server dan jaringan untuk memastikan ketersediaan, kehandalan layanan TIK (PR-I-02-02) karena belum ada evaluasi menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur, sehingga berisiko terjadi gangguan yang dapat menghambat layanan digital.	Asesmen kondisi server dan jaringan untuk memastikan ketersediaan, kehandalan layanan TIK PR-I-02-02)
		Perlunya asesmen utilisasi server dan storage karena beban kerja yang meningkat	Asesmen kondisi utilisasi dan kinerja server dan storage saat

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/ Activities)
		menyebabkan potensi penurunan performa, namun belum ada evaluasi menyeluruh terkait kapasitas yang tersedia.	ini (PR-I-02-01)
		Perlunya asesmen utilisasi server dan storage karena kapasitas dan kinerja pusat pemulihan bencana belum dievaluasi secara berkala, yang dapat menghambat proses pemulihan saat terjadi gangguan.	Asesmen kondisi utilisasi dan kinerja server dan storage di pusat pemulihan bencana (PR-I-03-01)
		Perlunya audit TIK karena pengawasan terhadap efisiensi dan keamanan sistem digital masih belum maksimal.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (PR-T-09-01)
		Perlunya Dokumentasi API Gateway (PR-A-02-03) karena penggunaan dan pengelolaan API dalam sistem pemerintahan masih kurang terdokumentasi dengan baik, sehingga diperlukan standar dokumentasi untuk memastikan kemudahan pengelolaan dan pengembangan di masa depan.	Dokumentasi API Gateway (PR-A-02-03)
		Perlunya dokumentasi API Gateway karena informasi tentang alur integrasi dan pertukaran data belum terdokumentasi dengan baik, menghambat pemeliharaan serta pengembangan sistem di masa mendatang.	Dokumentasi API Gateway (PR-A-02-03)
		Perlunya evaluasi dan perbaikan layanan karena belum ada mekanisme sistematis untuk menilai efektivitas layanan digital dan melakukan peningkatan berdasarkan kebutuhan serta masukan dari pengguna.	Evaluasi dan Perbaikan Layanan Pemerintah Daerah (PR-M-08-03)
		Perlunya Evaluasi dan Perbaikan Layanan Pemerintah Daerah (PR-M-08-03) karena manajemen SPBE masih menghadapi kendala dalam integrasi layanan, efisiensi operasional, dan kepuasan pengguna, sehingga diperlukan evaluasi berkala untuk memastikan peningkatan kualitas layanan.	Evaluasi dan Perbaikan Layanan Pemerintah Daerah (PR-M-08-03)
		Perlunya evaluasi dan revisi arsitektur serta peta rencana SPBE karena perubahan kebutuhan dan regulasi nasional memerlukan penyesuaian terhadap strategi implementasi SPBE di pemerintah daerah agar tetap relevan dan efektif.	Evaluasi dan Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE (PR-T-13-01)
		Perlunya evaluasi dan revisi proses bisnis karena alur kerja antarunit di pemerintahan daerah masih memiliki tumpang tindih, menyebabkan birokrasi yang lambat dan kurang efisien dalam memberikan layanan kepada masyarakat.	Evaluasi dan Revisi Prose Bisnis Pemerintah Daerah (PR-T-13-03)
		Perlunya evaluasi Forum Satu Data karena belum semua perangkat daerah menerapkan prinsip interoperabilitas data.	Evaluasi Perbup / Sk Komite Forum Satu Data (PR-T-11-02)
		Perlunya Evaluasi hasil uji coba pemulihan bencana (PR-I-04-04) karena perlu dilakukan analisis terhadap efektivitas uji coba pemulihan guna mengidentifikasi kelemahan sistem dan meningkatkan kesiapan infrastruktur data center dan TIK.	Evaluasi hasil uji coba pemulihan bencana (PR-I-04-04)
		Perlunya evaluasi hasil uji coba pemulihan bencana karena tanpa evaluasi, potensi	Evaluasi hasil uji coba pemulihan bencana (PR-I-04-04)

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/ Activities)
		kelemahan dalam sistem pemulihan tidak dapat teridentifikasi dan diperbaiki secara tepat.	
		Perlunya evaluasi indeks SPBE karena belum ada mekanisme yang jelas dalam mengukur tingkat kematangan digitalisasi birokrasi.	Evaluasi pelaksanaan penerapan RB tematik digitalisasi / Indeks SPBE Internal (PR-T-12-02)
		Perlunya evaluasi ini karena banyak aplikasi yang dikembangkan belum terintegrasi, menyebabkan redundansi data dan inefisiensi dalam layanan pemerintahan.	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Aplikasi Pemerintah Daerah (PR-T-13-04)
		Perlunya evaluasi ini karena beberapa proses bisnis masih manual dan kurang efisien, sehingga perlu disesuaikan dengan prinsip digitalisasi dan peningkatan layanan publik.	Evaluasi dan Revisi Prose Bisnis Pemerintah Daerah (PR-T-13-03)
		Perlunya evaluasi ini karena capaian indeks SPBE masih belum mencerminkan efektivitas digitalisasi birokrasi, sehingga perlu perbaikan strategi implementasi.	Evaluasi pelaksanaan penerapan RB tematik digitalisasi / Indeks SPBE Internal (PR-T-12-02)
		Perlunya evaluasi ini karena efektivitas tim koordinasi dalam mendorong implementasi SPBE masih belum optimal dan perlu perbaikan dari sisi regulasi dan tata kelola.	Evaluasi Perbup / Sk Tim Koordinasi SPBE (PR-T-11-01)
		Perlunya evaluasi ini karena identifikasi dan mitigasi risiko dalam tata kelola SPBE masih belum berjalan optimal, meningkatkan potensi kegagalan layanan digital.	Evaluasi Perbup / SK Komite Manajemen Risiko (PR-T-11-03)
		Perlunya evaluasi ini karena implementasi digitalisasi birokrasi masih menghadapi kendala koordinasi, kesiapan SDM, dan infrastruktur yang belum merata.	Evaluasi pelaksanaan penerapan RB tematik digitalisasi / Indeks SPBE Internal (PR-T-12-02)
		Perlunya evaluasi ini karena implementasi kebijakan transformasi digital masih mengalami resistensi dari berbagai pihak akibat kurangnya sosialisasi dan dukungan kebijakan yang kuat.	Evaluasi Perbup / Sk Komite Manajemen Perubahan (PR-T-11-04)
		Perlunya evaluasi ini karena inisiatif Satu Data belum berjalan optimal akibat belum adanya keseragaman standar dan mekanisme pertukaran data.	Evaluasi Perbup / Sk Komite Forum Satu Data (PR-T-11-02)
		Perlunya evaluasi ini karena inisiatif Satu Data masih menghadapi kendala dalam interoperabilitas dan konsistensi data antar perangkat daerah.	Evaluasi Perbup / Sk Komite Forum Satu Data (PR-T-11-02)
		Perlunya evaluasi ini karena layanan digital pemerintah daerah masih belum seragam dalam kualitas dan efisiensi.	Evaluasi Perbup / Sk Pokja Manajemen Layanan (PR-T-11-06)
		Perlunya evaluasi ini karena masih terdapat kelemahan dalam implementasi kebijakan keamanan informasi, meningkatkan risiko serangan siber dan kebocoran data.	Evaluasi Perbup / Sk Pokja Manajemen Keamanan Informasi (PR-T-11-07)
		Perlunya evaluasi ini karena mekanisme pengelolaan dan transfer pengetahuan di lingkungan pemerintahan masih belum optimal, menyebabkan keterbatasan dalam pengembangan kapasitas SDM digital.	Evaluasi Perbup / Sk Komite Manajemen Pengetahuan (PR-T-11-05)
		Perlunya evaluasi ini karena pengelolaan pengetahuan digital masih terbatas, menghambat pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas SDM.	Evaluasi Perbup / Sk Komite Manajemen Pengetahuan (PR-T-11-05)

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/ Activities)
		Perlunya evaluasi ini karena regulasi yang mengatur tim koordinasi SPBE perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan digitalisasi nasional.	Evaluasi Perbup / Sk Tim Koordinasi SPBE (PR-T-11-01)
		Perlunya evaluasi ini karena resistensi terhadap perubahan masih menjadi kendala utama dalam transformasi digital pemerintahan daerah.	Evaluasi Perbup / Sk Komite Manajemen Perubahan (PR-T-11-04)
		Perlunya evaluasi ini karena risiko dalam implementasi SPBE belum dikelola dengan baik, menyebabkan potensi gangguan layanan dan inefisiensi kebijakan.	Evaluasi Perbup / SK Komite Manajemen Risiko (PR-T-11-03)
		Perlunya evaluasi ini karena standar dan kualitas layanan berbasis digital masih bervariasi di tiap perangkat daerah, sehingga mempengaruhi pengalaman pengguna dan efektivitas layanan.	Evaluasi Perbup / Sk Pokja Manajemen Layanan (PR-T-11-06)
		Perlunya evaluasi ini karena tata kelola keamanan informasi masih belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten, meningkatkan risiko gangguan terhadap layanan digital pemerintahan.	Evaluasi Perbup / Sk Pokja Manajemen Keamanan Informasi (PR-T-11-07)
		Perlunya evaluasi ini karena tim koordinasi SPBE masih mengalami hambatan dalam sinergi antar unit kerja, sehingga pelaksanaan kebijakan SPBE belum berjalan optimal.	Monitoring dan Evaluasi Tim Koordinasi SPBE (PR-T-13-05)
		Perlunya evaluasi manajemen perubahan karena resistensi birokrasi terhadap digitalisasi masih tinggi.	Evaluasi Perbup / Sk Komite Manajemen Perubahan (PR-T-11-04)
		Perlunya evaluasi manajemen risiko karena mitigasi risiko dalam transformasi digital masih belum efektif.	Evaluasi Perbup / SK Komite Manajemen Risiko (PR-T-11-03)
		Perlunya Evaluasi pelaksanaan pengembangan infrastruktur jaringan data nirkabel (PR-I-07-06) karena masih terdapat kendala dalam kualitas dan jangkauan jaringan yang berdampak pada efektivitas komunikasi dan akses layanan digital di lingkungan Pemda.	Evaluasi pelaksanaan pengembangan infrastruktur jaringan data nirkabel (PR-I-07-06)
		Perlunya Evaluasi pelaksanaan pengembangan kapasitas dan kehandalan jaringan intra pemerintah (PR-I-05-06) karena perlu memastikan efektivitas pengembangan jaringan yang telah dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan instansi dan mampu mendukung kelancaran komunikasi pemerintahan.	Evaluasi pelaksanaan pengembangan kapasitas dan kehandalan jaringan intra pemerintah (PR-I-05-06)
		Perlunya evaluasi penerapan RB tematik digitalisasi karena capaian indeks SPBE internal belum terukur secara sistematis, menghambat identifikasi area yang perlu perbaikan dalam transformasi digital pemerintahan.	Evaluasi pelaksanaan penerapan RB tematik digitalisasi / Indeks SPBE Internal (PR-T-12-02)
		Perlunya evaluasi pengembangan jaringan nirkabel karena diperlukan pemantauan efektivitas investasi infrastruktur untuk memastikan peningkatan kualitas layanan akses internet dan intranet di lingkungan pemerintahan.	Evaluasi pelaksanaan pengembangan infrastruktur jaringan data nirkabel (PR-I-07-06)
		Perlunya evaluasi pengembangan kapasitas	Evaluasi pelaksanaan

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/ Activities)
		jaringan karena diperlukan pemantauan terhadap efektivitas investasi infrastruktur untuk memastikan pencapaian target peningkatan layanan.	pengembangan kapasitas dan kehandalan jaringan intra pemerintah (PR-I-05-06)
		Perlunya evaluasi Perbup/SK Komite Forum Satu Data karena implementasi Satu Data Indonesia di daerah masih menghadapi kendala dalam standarisasi dan integrasi data antarinstansi, sehingga perlu regulasi yang lebih adaptif.	Evaluasi Perbup / Sk Komite Forum Satu Data (PR-T-11-02)
		Perlunya evaluasi Perbup/SK Komite Manajemen Pengetahuan karena pemanfaatan dan transfer pengetahuan dalam organisasi pemerintah daerah masih belum optimal, sehingga inovasi dan efisiensi kerja belum berkembang secara maksimal.	Evaluasi Perbup / Sk Komite Manajemen Pengetahuan (PR-T-11-05)
		Perlunya evaluasi Perbup/SK Komite Manajemen Perubahan karena resistensi terhadap transformasi digital masih tinggi, dan regulasi yang ada belum cukup mendorong adaptasi serta kesiapan birokrasi terhadap perubahan sistem.	Evaluasi Perbup / Sk Komite Manajemen Perubahan (PR-T-11-04)
		Perlunya evaluasi Perbup/SK Komite Manajemen Risiko karena belum ada kebijakan yang efektif dalam mengelola risiko strategis dalam penerapan SPBE, sehingga meningkatkan potensi kegagalan proyek digital pemerintah daerah.	Evaluasi Perbup / SK Komite Manajemen Risiko (PR-T-11-03)
		Perlunya evaluasi Perbup/SK Pokja Manajemen Keamanan Informasi karena sistem perlindungan data pemerintah daerah masih memiliki celah keamanan, meningkatkan risiko kebocoran data dan serangan siber.	Evaluasi Perbup / Sk Pokja Manajemen Keamanan Informasi (PR-T-11-07)
		Perlunya evaluasi Perbup/SK Pokja Manajemen Layanan karena standar operasional dalam penyelenggaraan layanan digital belum terdokumentasi dengan baik, menyebabkan inkonsistensi dalam implementasi layanan publik berbasis elektronik.	Evaluasi Perbup / Sk Pokja Manajemen Layanan (PR-T-11-06)
		Perlunya evaluasi Perbup/SK Tim Koordinasi SPBE karena peraturan yang ada belum sepenuhnya mendukung efektivitas koordinasi lintas sektor, sehingga diperlukan penyesuaian agar peran dan tanggung jawab lebih jelas.	Evaluasi Perbup / Sk Tim Koordinasi SPBE (PR-T-11-01)
		Perlunya evaluasi Pokja Keamanan Informasi karena belum ada mekanisme pengawasan yang ketat terhadap keamanan sistem pemerintahan.	Evaluasi Perbup / Sk Pokja Manajemen Keamanan Informasi (PR-T-11-07)
		Perlunya evaluasi Pokja Manajemen Layanan karena belum semua layanan digital berjalan sesuai standar pelayanan publik.	Evaluasi Perbup / Sk Pokja Manajemen Layanan (PR-T-11-06)
		Perlunya evaluasi proses bisnis karena masih ditemukan inefisiensi dalam tata kelola layanan yang berdampak pada kinerja birokrasi.	Evaluasi dan Revisi Prose Bisnis Pemerintah Daerah (PR-T-13-03)
		Perlunya evaluasi regulasi tim koordinasi karena masih ditemukan tumpang tindih	Evaluasi Perbup / Sk Tim Koordinasi SPBE (PR-T-11-01)

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/Activities)
		kewenangan dalam implementasi SPBE.	
		Perlunya evaluasi tim koordinasi karena pelaksanaan SPBE masih terfragmentasi dan kurang terintegrasi antar-perangkat daerah.	Monitoring dan Evaluasi Tim Koordinasi SPBE (PR-T-13-05)
		Perlunya identifikasi aplikasi/sistem informasi yang dicadangkan karena belum semua aplikasi strategis memiliki mekanisme pencadangan yang memadai, sehingga berisiko mengalami kehilangan data jika terjadi bencana.	Identifikasi aplikasi/sistem informasi yang sudah atau belum dicadangkan di pusat pemulihan bencana (PR-I-03-02)
		Perlunya identifikasi dan analisa layanan pemerintah daerah karena banyak layanan digital yang belum optimal dan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta standar pelayanan publik.	Identifikasi dan Analisa Layanan Pemerintah Daerah (PR-M-08-01)
		Perlunya identifikasi kebutuhan jaringan jangka panjang karena perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan layanan digital belum diimbangi dengan perencanaan infrastruktur yang berkelanjutan.	Identifikasi kebutuhan layanan jaringan intra pemerintah 4 tahun ke depan (PR-I-05-03)
		Perlunya identifikasi kebutuhan pengembangan aplikasi karena masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan layanan digital dengan sistem informasi yang tersedia, sehingga diperlukan pemetaan yang akurat.	Identifikasi kebutuhan pengembangan aplikasi/sistem informasi PR-I-02-05)
		Perlunya identifikasi kendala jaringan karena masih ditemukan gangguan konektivitas dan penurunan kualitas layanan yang berdampak pada efektivitas komunikasi antar perangkat daerah.	Identifikasi kendala atau permasalahan yang terjadi (PR-I-05-02)
		Perlunya identifikasi masalah dan keamanan jaringan nirkabel karena meningkatnya ancaman siber serta gangguan teknis yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan akses data pemerintahan.	Identifikasi kendala, permasalahan dan isu keamanan jaringan data nirkabel (PR-I-07-02)
		Perlunya identifikasi rencana pengembangan aplikasi karena kebutuhan digitalisasi pemerintahan terus berkembang, sementara roadmap aplikasi saat ini belum tersusun dengan jelas.	Identifikasi rencana pengembangan aplikasi/sistem informasi ke depan (PR-I-01-02)
		Perlunya identifikasi target pengembangan jaringan nirkabel karena saat ini belum ada standar keamanan yang memadai seperti WPA2-Enterprise, serta masih terdapat kendala dalam mobilitas pengguna akibat kurangnya fitur roaming.	Identifikasi target pengembangan infrastruktur jaringan data nirkabel (implementasi protokol WPA2-enterprise, fitur roaming, dll) (PR-I-07-03)
		Perlunya Integrasi Data (PR-I-08-01) karena masih terdapat silo data antar sistem yang menyebabkan inkonsistensi dan duplikasi informasi, sehingga diperlukan integrasi untuk memastikan keakuratan dan keterpaduan data.	Integrasi Data (PR-I-08-01)
		Perlunya Integrasi Fungsional (PR-I-08-03) karena sistem informasi di Pemda masih berjalan secara terpisah, sehingga diperlukan integrasi agar layanan dapat saling beroperasi secara efektif dan efisien.	Integrasi Fungsional (PR-I-08-03)
		Perlunya Integrasi Presentasi (PR-I-08-02)	Integrasi Presentasi (PR-I-08-02)

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/ Activities)
		karena tampilan layanan digital antar sistem di Pemda masih terfragmentasi, sehingga perlu keseragaman antarmuka untuk meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman pengguna.	
		Perlunya kebijakan arsitektur SPBE karena saat ini belum ada standar yang jelas dalam integrasi layanan digital pemerintah daerah, sehingga terjadi tumpang tindih sistem yang menghambat efisiensi layanan publik.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Arsitektur SPBE (PR-T-01-01)
		Perlunya kebijakan ini karena belum ada mekanisme audit yang sistematis untuk mengukur efektivitas dan kepatuhan sistem TIK dalam mendukung SPBE.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (PR-T-09-01)
		Perlunya kebijakan ini karena belum ada mekanisme audit yang sistematis untuk menilai kinerja dan keamanan sistem TIK di pemerintahan.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (PR-T-09-01)
		Perlunya kebijakan ini karena belum ada panduan yang komprehensif dalam mengarahkan pengembangan SPBE jangka panjang, sehingga perlu perencanaan yang lebih matang.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Peta Rencana SPBE (PR-T-02-01)
		Perlunya kebijakan ini karena belum ada standar keamanan informasi yang diterapkan secara menyeluruh, meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pemerintahan.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi (PR-T-08-01)
		Perlunya kebijakan ini karena integrasi layanan daerah dengan pusat belum berjalan optimal, sehingga menghambat pertukaran data dan efisiensi layanan publik.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat (PR-T-07-01)
		Perlunya kebijakan ini karena jaringan intra pemerintahan masih belum optimal dalam mendukung komunikasi data yang cepat, aman, dan terintegrasi.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (PR-T-06-01)
		Perlunya kebijakan ini karena jaringan intra pemerintahan masih memiliki keterbatasan dalam kecepatan, keamanan, dan aksesibilitas antar perangkat daerah.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (PR-T-06-01)
		Perlunya kebijakan ini karena keterhubungan sistem antara pemerintah daerah dan pusat masih belum optimal, menyebabkan keterlambatan dalam pertukaran data dan layanan publik.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat (PR-T-07-01)
		Perlunya kebijakan ini karena koordinasi antar pemangku kepentingan dalam implementasi SPBE masih lemah, sehingga banyak program digitalisasi yang berjalan secara sektoral tanpa sinergi.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Tim koordinasi SPBE (PR-T-10-10)
		Perlunya kebijakan ini karena koordinasi lintas sektor dalam implementasi SPBE masih kurang efektif, menghambat akselerasi digitalisasi pemerintahan.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Tim koordinasi SPBE (PR-T-10-10)
		Perlunya kebijakan ini karena pengelolaan data masih belum terstandarisasi, menghambat interoperabilitas antar sistem dan efektivitas pengambilan keputusan berbasis data.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Manajemen Data (PR-T-03-01)
		Perlunya kebijakan ini karena pengelolaan	Penyusunan dan Reviu

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/ Activities)
		data masih tersebar di berbagai perangkat daerah tanpa standar yang jelas, sehingga sulit untuk diintegrasikan dan dimanfaatkan secara optimal.	Kebijakan Manajemen Data (PR-T-03-01)
		Perlunya kebijakan ini karena pengelolaan pusat data masih belum terintegrasi dengan baik, menyebabkan keterbatasan dalam interoperabilitas sistem dan efisiensi operasional.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Pusat Data (PR-T-05-01)
		Perlunya kebijakan ini karena pengembangan aplikasi belum terkoordinasi dengan baik, sehingga terjadi duplikasi sistem dan kurangnya interoperabilitas antar perangkat daerah.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE (PR-T-04-01)
		Perlunya kebijakan ini karena pengembangan aplikasi di lingkungan pemerintahan belum memiliki standar yang seragam, menyebabkan inefisiensi dan tumpang tindih fungsi sistem.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE (PR-T-04-01)
		Perlunya kebijakan ini karena penyimpanan dan pengelolaan data masih tersebar tanpa integrasi yang baik, meningkatkan risiko keamanan dan inefisiensi operasional.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Pusat Data (PR-T-05-01)
		Perlunya kebijakan ini karena sistem keamanan informasi masih memiliki banyak celah yang berpotensi mengancam integritas data dan layanan pemerintahan digital.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi (PR-T-08-01)
		Perlunya kebijakan ini karena tata kelola SPBE masih belum memiliki standar yang jelas, menyebabkan kurangnya harmonisasi dalam implementasi sistem digital.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Arsitektur SPBE (PR-T-01-01)
		Perlunya kebijakan ini karena tata kelola SPBE saat ini masih belum terstruktur dengan baik, sehingga implementasi layanan digital belum berjalan optimal.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Arsitektur SPBE (PR-T-01-01)
		Perlunya kebijakan internal audit TIK karena belum ada mekanisme audit yang sistematis terhadap infrastruktur dan layanan digital pemerintah daerah, sehingga potensi risiko keamanan dan inefisiensi belum teridentifikasi secara optimal.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (PR-T-09-01)
		Perlunya kebijakan jaringan intra karena masih ada kendala konektivitas yang menghambat pertukaran data antar-perangkat daerah.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (PR-T-06-01)
		Perlunya kebijakan keamanan informasi karena risiko kebocoran dan penyalahgunaan data semakin meningkat.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi (PR-T-08-01)
		Perlunya kebijakan layanan jaringan intra pemerintah daerah karena konektivitas antarinstansi masih belum optimal, menyebabkan keterlambatan dalam koordinasi dan pertukaran data antarunit kerja.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (PR-T-06-01)
		Perlunya kebijakan manajemen data karena masih terdapat duplikasi dan inkonsistensi data yang menghambat pengambilan keputusan berbasis data.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Manajemen Data (PR-T-03-01)
		Perlunya kebijakan manajemen data karena	Penyusunan dan Reviu

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/ Activities)
		saat ini data pemerintah daerah tersebar di berbagai instansi tanpa standar yang seragam, menghambat interoperabilitas dan pengambilan keputusan berbasis data.	Kebijakan Manajemen Data (PR-T-03-01)
		Perlunya kebijakan manajemen keamanan informasi karena masih lemahnya sistem pengamanan data dan informasi pemerintahan, meningkatkan risiko serangan siber dan kebocoran informasi sensitif.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi (PR-T-08-01)
		Perlunya kebijakan pembangunan aplikasi SPBE karena banyaknya aplikasi yang dikembangkan tanpa pedoman yang seragam, menyebabkan redundansi sistem dan pemborosan anggaran TI.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE (PR-T-04-01)
		Perlunya kebijakan penggunaan sistem penghubung karena integrasi layanan pusat dan daerah masih belum optimal.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat (PR-T-07-01)
		Perlunya kebijakan penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah pusat karena belum ada pedoman baku dalam pemanfaatan layanan digital nasional, sehingga potensi integrasi layanan belum dimanfaatkan secara maksimal.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat (PR-T-07-01)
		Perlunya kebijakan pusat data karena infrastruktur penyimpanan data masih tersebar tanpa standar keamanan dan keandalan yang memadai, meningkatkan risiko kehilangan atau kebocoran data.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Pusat Data (PR-T-05-01)
		Perlunya kebijakan pusat data karena masih ada ketidakjelasan dalam pengelolaan dan keamanan infrastruktur data pemerintahan.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Pusat Data (PR-T-05-01)
		Perlunya kebijakan tim koordinasi SPBE karena sinergi antarinstansi dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik masih lemah, menyebabkan program digitalisasi berjalan parsial dan tidak terkoordinasi dengan baik.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Tim koordinasi SPBE (PR-T-10-10)
		Perlunya kolaborasi ini karena reformasi birokrasi berbasis digital belum terintegrasi secara menyeluruh, sehingga masih ada hambatan dalam efisiensi layanan publik yang mengandalkan teknologi informasi.	Pelaksanaan kolaborasi penerapan RB tematik digitalisasi / SPBE (PR-T-12-01)
		Perlunya kolaborasi ini karena sinergi antar instansi dalam penerapan reformasi birokrasi digital masih belum maksimal, menghambat efektivitas transformasi digital.	Pelaksanaan kolaborasi penerapan RB tematik digitalisasi / SPBE (PR-T-12-01)
		Perlunya kolaborasi penerapan RB tematik digitalisasi karena reformasi birokrasi dalam konteks digital masih berjalan sektoral dan belum melibatkan semua pihak terkait, sehingga efektivitas penerapan SPBE belum optimal.	Pelaksanaan kolaborasi penerapan RB tematik digitalisasi / SPBE (PR-T-12-01)
		Perlunya kolaborasi reformasi birokrasi digital karena implementasi SPBE masih terfragmentasi antar-instansi.	Pelaksanaan kolaborasi penerapan RB tematik digitalisasi / SPBE (PR-T-12-01)
		Perlunya konektivitas perangkat daerah dengan JIP Diskominfo karena masih ada unit kerja yang belum terhubung dengan jaringan pemerintah, sehingga menghambat	Perangkat daerah / UPT (Unit Pelaksana Teknis) terkoneksi JIP diskominfo (PR-I-06-01)

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/ Activities)
		koordinasi dan integrasi layanan.	
		Perlunya Layanan Administrasi Pemerintah (PR-L-02-06) karena pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana masih belum optimal, sehingga dibutuhkan sistem layanan yang memastikan standar pelayanan yang lebih baik dan terukur.	Evaluasi Layanan Administrasi Pemerintah Digital (PR-L-02-06)
		Perlunya Layanan Portal Layanan Publik (PR-L-02-07) karena peningkatan layanan SPBE masih terhambat oleh akses informasi yang tersebar di berbagai platform, sehingga diperlukan satu portal terpusat untuk mempermudah akses dan penggunaan layanan publik.	Evaluasi Layanan Portal Layanan Publik Digital (PR-L-02-07)
		Perlunya layanan portal layanan publik karena masih minimnya platform digital yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan, menyebabkan masyarakat harus mengakses layanan secara terpisah dan kurang efisien.	Evaluasi Layanan Portal Layanan Publik Digital (PR-L-02-07)
		Perlunya melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan layanan Helpdesk TIK guna menyesuaikan dengan tantangan serta kebutuhan teknis yang berkembang.	Evaluasi Pelaksanaan Helpdesk TIK (PR-L-04-03)
		Perlunya Melakukan perbaikan pada saat ditemukan error/bug (PR-A-04-02) karena masih sering ditemukan bug dalam sistem yang dapat menghambat operasional aplikasi dan menurunkan kualitas layanan digital.	Melakukan perbaikan pada saat ditemukan error/bug (PR-A-04-02)
		Perlunya Melakukan upgrade patch keamanan, maupun patch performa sistem (PR-A-04-04) karena sistem saat ini masih rentan terhadap ancaman keamanan dan penurunan kinerja akibat penggunaan versi perangkat lunak yang belum diperbarui.	Melakukan upgrade patch keamanan, maupun patch performa sistem (PR-A-04-04)
		Perlunya memahami kebutuhan spesifik dalam pengembangan Helpdesk TIK agar solusi yang diterapkan dapat benar-benar mengatasi kendala yang ada.	Analisa Kebutuhan Pengembangan Helpdesk TIK (PR-L-04-01)
		Perlunya memastikan alokasi anggaran TIK tepat guna dan efisien, menghindari pemborosan serta memastikan keterpaduan dengan kebutuhan strategis SPBE.	Monitoring dan Evaluasi Rencana Anggaran TIK (PR-T-13-02)
		Perlunya memastikan anggaran TIK sesuai dengan kebutuhan dan program prioritas daerah, mengingat keterbatasan anggaran dan efisiensi belanja daerah.	Monitoring dan Evaluasi Rencana Anggaran TIK (PR-T-13-02)
		Perlunya memastikan aplikasi yang dibangun sesuai kebutuhan pengguna dan terintegrasi dengan sistem lain, mengingat banyaknya aplikasi silo yang tidak saling terhubung.	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Aplikasi Pemerintah Daerah (PR-T-13-04)
		Perlunya memastikan aplikasi yang dikembangkan sesuai kebutuhan, interoperabel dengan sistem lain, serta menghindari proyek aplikasi yang tidak digunakan.	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Aplikasi Pemerintah Daerah (PR-T-13-04)
		Perlunya memastikan audit TIK berjalan efektif agar sistem dan kebijakan yang diterapkan tetap sesuai standar dan efisien.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (PR-T-09-01)

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/ Activities)
		Perlunya memastikan implementasi peningkatan Helpdesk TIK berjalan sesuai rencana agar dapat memberikan manfaat optimal bagi pelayanan teknologi pemerintahan.	Pelaksanaan Pengembangan Helpdesk TIK (PR-L-04-02)
		Perlunya memastikan keamanan dan efisiensi jaringan intra pemerintah daerah guna mendukung layanan internal dan publik.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (PR-T-06-01)
		Perlunya memastikan keberlanjutan dan efektivitas koordinasi data lintas sektor guna mendukung kebijakan berbasis data.	Evaluasi Perbup / Sk Komite Forum Satu Data (PR-T-11-02)
		Perlunya memastikan kebijakan keamanan informasi berjalan optimal untuk melindungi data pemerintahan dari ancaman digital.	Evaluasi Perbup / Sk Pokja Manajemen Keamanan Informasi (PR-T-11-07)
		Perlunya memastikan kebijakan manajemen pengetahuan mendukung transfer ilmu dan keberlanjutan inovasi di pemerintahan.	Evaluasi Perbup / Sk Komite Manajemen Pengetahuan (PR-T-11-05)
		Perlunya memastikan tata kelola data yang baik untuk meningkatkan akurasi, keamanan, dan keterpaduan data antarinstitusi.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Manajemen Data (PR-T-03-01)
		Perlunya memiliki peta rencana yang terstruktur untuk mengarahkan pengembangan sistem digital agar lebih terarah dan tidak duplikasi.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Peta Rencana SPBE (PR-T-02-01)
		Perlunya memperbarui kebijakan arsitektur SPBE agar sesuai dengan standar nasional dan mendukung interoperabilitas layanan digital.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Arsitektur SPBE (PR-T-01-01)
		Perlunya memperjelas peran dan tanggung jawab tim koordinasi SPBE agar implementasi SPBE lebih terarah dan sinergis.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Tim koordinasi SPBE (PR-T-10-10)
		Perlunya memperkuat keamanan informasi dalam sistem pemerintahan guna mencegah kebocoran data dan serangan siber.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi (PR-T-08-01)
		Perlunya memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam implementasi digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.	Pelaksanaan kolaborasi penerapan RB tematik digitalisasi / SPBE (PR-T-12-01)
		Perlunya Mempertahankan agar sistem tetap berjalan dengan optimal (PR-A-04-03) karena tanpa pemeliharaan rutin, aplikasi berisiko mengalami degradasi kinerja yang dapat mengganggu efektivitas layanan pemerintahan.	Mempertahankan agar sistem tetap berjalan dengan optimal (PR-A-04-03)
		Perlunya mengatur tata kelola pusat data agar aman, efisien, dan mendukung integrasi layanan digital.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Pusat Data (PR-T-05-01)
		Perlunya mengidentifikasi kebutuhan peningkatan layanan Helpdesk TIK agar dapat memberikan dukungan teknis yang lebih responsif dan efektif bagi pegawai pemerintahan.	Analisa Kebutuhan Pengembangan Helpdesk TIK (PR-L-04-01)
		Perlunya mengkaji efektivitas layanan Helpdesk TIK dalam menangani keluhan dan permintaan dukungan guna meningkatkan kepuasan pengguna layanan pemerintahan.	Evaluasi Pelaksanaan Helpdesk TIK (PR-L-04-03)
		Perlunya menilai efektivitas peningkatan layanan Helpdesk TIK untuk memastikan perbaikan yang dilakukan benar-benar	Evaluasi Pelaksanaan Helpdesk TIK (PR-L-04-03)

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/Activities)
		berdampak positif terhadap kualitas layanan.	
		Perlunya menilai efektivitas regulasi dan kejelasan peran tim koordinasi SPBE untuk meningkatkan implementasi kebijakan digital.	Evaluasi Perbup / Sk Tim Koordinasi SPBE (PR-T-11-01)
		Perlunya menilai efektivitas tim koordinasi dalam menjalankan kebijakan SPBE, menyelesaikan kendala implementasi, dan meningkatkan sinergi antar-perangkat daerah.	Monitoring dan Evaluasi Tim Koordinasi SPBE (PR-T-13-05)
		Perlunya menilai kemajuan reformasi birokrasi berbasis digital untuk memastikan peningkatan indeks SPBE sesuai target nasional.	Evaluasi pelaksanaan penerapan RB tematik digitalisasi / Indeks SPBE Internal (PR-T-12-02)
		Perlunya menilai kesiapan daerah dalam mengelola risiko dalam implementasi SPBE dan layanan digital.	Evaluasi Perbup / SK Komite Manajemen Risiko (PR-T-11-03)
		Perlunya meningkatkan efektivitas koordinasi antarperangkat daerah dalam implementasi SPBE, karena masih terdapat tumpang tindih kebijakan dan kurangnya sinergi.	Monitoring dan Evaluasi Tim Koordinasi SPBE (PR-T-13-05)
		Perlunya meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan Helpdesk TIK agar dapat menangani berbagai permasalahan teknologi informasi secara lebih efisien.	Pelaksanaan Pengembangan Helpdesk TIK (PR-L-04-02)
		Perlunya meninjau efektivitas komite dalam mengelola perubahan organisasi akibat transformasi digital.	Evaluasi Perbup / Sk Komite Manajemen Perubahan (PR-T-11-04)
		Perlunya meninjau efektivitas pengelolaan layanan digital agar lebih efisien dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.	Evaluasi Perbup / Sk Pokja Manajemen Layanan (PR-T-11-06)
		Perlunya meninjau kembali implementasi Helpdesk TIK agar dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi informasi.	Evaluasi Pelaksanaan Helpdesk TIK (PR-L-04-03)
		Perlunya menjaga sistem tetap optimal karena saat ini sering terjadi gangguan teknis yang berdampak pada layanan digital pemerintah, sehingga stabilitas operasional harus dipastikan.	Mempertahankan agar sistem tetap berjalan dengan optimal (PR-A-04-03)
		Perlunya menjamin kelangsungan pengembangan Helpdesk TIK agar sistem layanan tetap relevan dengan kebutuhan pengguna di lingkungan pemerintahan.	Pelaksanaan Pengembangan Helpdesk TIK (PR-L-04-02)
		Perlunya menstandarisasi penggunaan sistem penghubung agar integrasi layanan pusat dan daerah berjalan optimal.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat (PR-T-07-01)
		Perlunya menyelaraskan proses bisnis dengan perkembangan kebijakan digitalisasi, karena banyak prosedur masih manual dan kurang terintegrasi.	Evaluasi dan Revisi Prose Bisnis Pemerintah Daerah (PR-T-13-03)
		Perlunya menyesuaikan arsitektur dan peta rencana SPBE dengan perkembangan teknologi dan regulasi agar implementasi SPBE lebih efektif.	Evaluasi dan Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE (PR-T-13-01)
		Perlunya menyesuaikan proses bisnis dengan regulasi terbaru, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan mengoptimalkan digitalisasi layanan pemerintahan.	Evaluasi dan Revisi Prose Bisnis Pemerintah Daerah (PR-T-13-03)
		Perlunya merealisasikan strategi peningkatan	Pelaksanaan Pengembangan

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/Activities)
		Helpdesk TIK secara berkelanjutan agar mampu mendukung operasional pemerintahan secara efektif.	Helpdesk TIK (PR-L-04-02)
		Perlunya monitoring dan evaluasi anggaran TIK karena alokasi anggaran untuk teknologi informasi belum sepenuhnya berbasis kebutuhan strategis, sehingga berpotensi terjadi inefisiensi dalam pengadaan dan pengelolaan sumber daya digital.	Monitoring dan Evaluasi Rencana Anggaran TIK (PR-T-13-02)
		Perlunya monitoring dan evaluasi pembangunan aplikasi pemerintah daerah karena masih banyak aplikasi yang dikembangkan tanpa standar kualitas yang jelas, menyebabkan tumpang tindih fungsi dan rendahnya efektivitas layanan digital.	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Aplikasi Pemerintah Daerah (PR-T-13-04)
		Perlunya monitoring dan evaluasi tim koordinasi SPBE karena koordinasi lintas sektor dalam implementasi SPBE masih kurang optimal, menyebabkan hambatan dalam integrasi sistem dan layanan digital pemerintahan.	Monitoring dan Evaluasi Tim Koordinasi SPBE (PR-T-13-05)
		Perlunya monitoring ini karena alokasi anggaran TIK belum sepenuhnya berbasis kebutuhan strategis, sering kali kurang efisien, dan perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi.	Monitoring dan Evaluasi Rencana Anggaran TIK (PR-T-13-02)
		Perlunya pedoman pembangunan aplikasi karena belum ada standar yang jelas dalam pengembangan sistem yang terintegrasi.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE (PR-T-04-01)
		Perlunya Pelaksanaan pengembangan infrastruktur jaringan data nirkabel (PR-I-07-05) karena jaringan internet dan intranet yang ada belum mencukupi kebutuhan operasional pemerintahan, sehingga perlu penguatan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan layanan publik.	Pelaksanaan pengembangan infrastruktur jaringan data nirkabel (PR-I-07-05)
		Perlunya Pelaksanaan pengembangan kapasitas dan kehandalan jaringan intra pemerintah (PR-I-05-05) karena infrastruktur jaringan saat ini masih terbatas, menyebabkan keterlambatan akses data dan komunikasi antar instansi yang menghambat pelayanan publik.	Pelaksanaan pengembangan kapasitas dan kehandalan jaringan intra pemerintah (PR-I-05-05)
		Perlunya pelaksanaan pengembangan ruang server karena kondisi fisik dan perangkat pendukung saat ini tidak lagi optimal untuk menjamin keberlanjutan operasional sistem pemerintahan.	Pelaksanaan pengembangan ruangan dan perangkat pendukung ruang server (PR-I-01-04)
		Perlunya Pelaksanaan pengembangan ruangan dan perangkat pendukung ruang server (PR-I-01-04) karena infrastruktur ruang server saat ini belum memadai untuk mendukung operasional sistem pemerintahan yang terus berkembang.	Pelaksanaan pengembangan ruangan dan perangkat pendukung ruang server (PR-I-01-04)
		Perlunya pemantauan anggaran TIK karena alokasi dana sering tidak sejalan dengan kebutuhan prioritas digitalisasi pemerintahan.	Monitoring dan Evaluasi Rencana Anggaran TIK (PR-T-13-02)
		Perlunya pemantauan aplikasi karena beberapa sistem yang dikembangkan belum optimal dalam mendukung layanan publik dan	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Aplikasi Pemerintah Daerah (PR-T-13-04)

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/Activities)
		internal pemerintahan.	
		Perlunya Pemantauan kesehatan dan kinerja dari server aplikasi (web server, database server, application server) menggunakan aplikasi pemantauan seperti MRTG, LibreNMS, dan lain-lain (PR-A-04-01) karena belum ada sistem pemantauan yang optimal, sehingga potensi gangguan layanan tidak dapat terdeteksi dan diatasi secara cepat.	Pemantauan kesehatan dan kinerja dari server aplikasi (web server, database server, application server) menggunakan aplikasi pemantauan seperti MRTG, LibreNMS, dan lain - lain. (PR-A-04-01)
		Perlunya pemantauan kesehatan dan kinerja server aplikasi karena infrastruktur aplikasi saat ini belum memiliki sistem monitoring terintegrasi, membuatnya rentan terhadap gangguan dan downtime yang berdampak pada layanan publik.	Pemantauan kesehatan dan kinerja dari server aplikasi (web server, database server, application server) menggunakan aplikasi pemantauan seperti MRTG, LibreNMS, dan lain - lain. (PR-A-04-01)
		Perlunya pembaruan arsitektur SPBE karena masih terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan strategis dan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.	Evaluasi dan Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE (PR-T-13-01)
		Perlunya Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan antar Perangkat Daerah / UPT (Unit Pelaksana Teknis) (PR-I-06-02) karena masih terdapat gangguan konektivitas yang menghambat komunikasi dan akses layanan digital antar unit kerja, sehingga pemeliharaan rutin diperlukan untuk menjaga stabilitas jaringan.	Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan antar Perangkat daerah / UPT (Unit Pelaksana Teknis) (PR-I-06-02)
		Perlunya pemeliharaan jaringan antar perangkat daerah karena infrastruktur yang ada sering mengalami gangguan teknis akibat kurangnya perawatan berkala dan pembaruan sistem.	Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan antar Perangkat daerah / UPT (Unit Pelaksana Teknis) (PR-I-06-02)
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Langganan Bandwidth Internet A.	Langganan Bandwidth Internet A
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Langganan Bandwidth Internet B.	Langganan Bandwidth Internet B
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan Internet.	Pemeliharaan Jaringan Internet
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan Intra.	Pemeliharaan Jaringan Intra
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan LAN.	Pemeliharaan Jaringan LAN
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pemeliharaan Perangkat Jaringan Intra Pemerintah.	Pemeliharaan Perangkat Jaringan Intra Pemerintah
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Access Point.	Pengadaan Access Point
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Bandwitch Internet.	Pengadaan Bandwitch Internet
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Lisensi	Pengadaan Lisensi CPanel

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/Activities)
		CPanel.	
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Lisensi Internet Protokol.	Pengadaan Lisensi Internet Protokol
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Lisensi Zoom.	Pengadaan Lisensi Zoom
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Perangkat Server.	Pengadaan Perangkat Server
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Router.	Pengadaan Router
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Server.	Pengadaan Server
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Storage Server.	Pengadaan Storage Server
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Switch.	Pengadaan Switch
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan UPS Server.	Pengadaan UPS Server
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.	Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
		Perlunya pemenuhan SLA karena kualitas layanan jaringan saat ini belum memenuhi standar yang disepakati, sehingga sering terjadi keluhan dari perangkat daerah terkait keandalan konektivitas.	Terpenuhi SLA (PR-I-06-03)
		Perlunya pemutakhiran peta rencana SPBE karena masih ada ketidaksesuaian antara roadmap digitalisasi dan kebutuhan layanan.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Peta Rencana SPBE (PR-T-02-01)
		Perlunya pengadaan infrastruktur cadangan karena sistem pemulihan bencana saat ini belum sepenuhnya dapat memastikan keberlangsungan layanan pemerintahan dalam kondisi darurat.	Pengadaan server, storage, perangkat lunak, perangkat jaringan dan lain - lain untuk cadangan aplikasi/sistem informasi di pusat pemulihan bencana (PR-I-03-04)
		Perlunya Pengadaan server, storage, perangkat lunak, perangkat jaringan dan lain-lain untuk cadangan aplikasi/sistem informasi di pusat pemulihan bencana (PR-I-03-04) karena belum tersedia infrastruktur cadangan yang memadai, sehingga risiko kehilangan data dan gangguan layanan saat terjadi bencana masih tinggi.	Pengadaan server, storage, perangkat lunak, perangkat jaringan dan lain - lain untuk cadangan aplikasi/sistem informasi di pusat pemulihan bencana (PR-I-03-04)
		Perlunya Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota karena masih terdapat ketidakteraturan dalam penggunaan domain yang dapat menghambat standar keamanan serta aksesibilitas layanan digital pemerintah daerah.	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Perlunya pengelolaan pengetahuan karena dokumentasi dan diseminasi praktik terbaik dalam pemerintahan masih terbatas.	Evaluasi Perbup / Sk Komite Manajemen Pengetahuan (PR-T-11-05)
		Perlunya pengembangan atau penguatan	Pengembangan Aplikasi

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/Activities)
		aplikasi untuk mendukung pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Website Pemerintahan.	Website Pemerintahan
		Perlunya Pengembangan dan Pengujian API Gateway (PR-A-02-02) karena saat ini belum tersedia sistem yang memungkinkan komunikasi data yang aman dan efisien antar aplikasi pemerintahan, sehingga dibutuhkan pengembangan dan uji coba sebelum diterapkan.	Pengembangan dan Pengujian API Gateway (PR-A-02-02)
		Perlunya pengembangan dan pengujian API Gateway karena mekanisme integrasi yang ada belum teruji keandalannya, sehingga perlu pengembangan untuk menjamin keamanan dan sinkronisasi data antar sistem.	Pengembangan dan Pengujian API Gateway (PR-A-02-02)
		Perlunya pengembangan jaringan nirkabel karena kapasitas dan jangkauan yang ada saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan perangkat daerah dalam mendukung pelayanan berbasis digital.	Pelaksanaan pengembangan infrastruktur jaringan data nirkabel (PR-I-07-05)
		Perlunya pengembangan kapasitas jaringan karena peningkatan jumlah pengguna dan aplikasi berbasis internet membutuhkan infrastruktur yang lebih handal dan efisien.	Pelaksanaan pengembangan kapasitas dan kehandalan jaringan intra pemerintah (PR-I-05-05)
		Perlunya penguatan kebijakan tim koordinasi karena pelaksanaan SPBE masih berjalan secara sektoral tanpa koordinasi yang kuat.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Tim koordinasi SPBE (PR-T-10-10)
		Perlunya penguatan tata kelola SPBE untuk mendukung pelaksanaan Jasa Konsultasi Penyusunan Masterplan Smartcity.	Jasa Konsultasi Penyusunan Masterplan Smartcity
		Perlunya penguatan tata kelola SPBE untuk mendukung pelaksanaan Jasa Konsultasi SPBE.	Jasa Konsultasi SPBE
		Perlunya Penyediaan server virtualisasi beserta lisensinya secara colocation untuk mendukung ketersediaan tinggi layanan TIK (PR-I-02-04) karena sistem saat ini masih bergantung pada server fisik yang rentan terhadap kegagalan dan memerlukan solusi berbasis virtualisasi untuk meningkatkan efisiensi dan ketersediaan layanan.	Penyediaan Server virtualisasi beserta lisensinya secara colocation untuk mendukung ketersediaan tinggi layanan TIK (PR-I-02-04)
		Perlunya penyediaan server virtualisasi secara colocation karena infrastruktur on-premise saat ini belum cukup andal untuk menjamin ketersediaan tinggi, sehingga dibutuhkan solusi yang lebih fleksibel dan efisien.	Penyediaan Server virtualisasi beserta lisensinya secara colocation untuk mendukung ketersediaan tinggi layanan TIK (PR-I-02-04)
		Perlunya Penyusunan Analisis Kebutuhan API Gateway (PR-A-02-01) karena integrasi antar aplikasi pemerintahan masih belum optimal, sehingga diperlukan perencanaan yang matang untuk memastikan interoperabilitas yang efisien.	Penyusunan Analisis Kebutuhan API Gateway (PR-A-02-01)
		Perlunya penyusunan analisis kebutuhan API Gateway karena integrasi antar sistem aplikasi belum berjalan optimal, menghambat pertukaran data yang efektif antar instansi dan layanan digital.	Penyusunan Analisis Kebutuhan API Gateway (PR-A-02-01)
		Perlunya penyusunan dokumen manajemen	Penyusunan Dokumen

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/ Activities)
		layanan karena belum ada panduan baku terkait pengelolaan layanan digital, menyebabkan inkonsistensi dalam implementasi di berbagai unit kerja.	Manajemen Layanan Pemerintah Daerah (PR-M-08-02)
		Perlunya penyusunan kebutuhan server dan storage karena keterbatasan kapasitas saat ini belum dapat mengakomodasi seluruh aplikasi penting, sehingga diperlukan perencanaan tambahan.	Penyusunan kebutuhan server dan storage untuk aplikasi/sistem informasi yang belum dicadangkan di pusat pemulihan bencana (PR-I-03-03)
		Perlunya penyusunan rencana kapasitas server dan storage karena pertumbuhan data yang pesat memerlukan strategi pengelolaan yang dapat mengakomodasi kebutuhan jangka panjang.	Penyusunan rencana kapasitas server dan storage untuk 4 tahun ke depan PR-I-02-03)
		Perlunya penyusunan rencana kontinuitas bisnis dan pemulihan bencana karena belum ada panduan resmi yang mengatur prosedur mitigasi dan pemulihan jika terjadi gangguan besar pada sistem pemerintahan.	Penyusunan dokumen rencana kontinuitas bisnis (business continuity plan) dan rencana pemulihan bencana (disaster recovery plan) (PR-I-04-01)
		Perlunya penyusunan rencana pengembangan kapasitas jaringan karena saat ini masih terdapat keterbatasan dalam bandwidth dan redundansi jaringan yang dapat menghambat kelancaran layanan pemerintahan.	Penyusunan rencana pengembangan kapasitas dan kehandalan jaringan intra pemerintah (PR-I-05-04)
		Perlunya penyusunan rencana pengembangan karena keterbatasan infrastruktur jaringan nirkabel saat ini menghambat akses data yang stabil dan aman, sementara pengalokasian anggaran belum berbasis kebutuhan teknis yang terukur.	Penyusunan rencana pengembangan dan kebutuhan anggaran infrastruktur jaringan data nirkabel (PR-I-07-04)
		Perlunya penyusunan rencana pengembangan ruang server karena kapasitas infrastruktur yang ada belum memadai untuk mendukung pertumbuhan data dan layanan yang semakin meningkat.	Penyusunan rencana pengembangan ruangan dan perangkat pendukung ruang server (PR-I-01-03)
		Perlunya penyusunan skenario uji coba pemulihan bencana karena belum ada simulasi yang memastikan kesiapan sistem dalam menghadapi kondisi darurat, sehingga risiko kegagalan pemulihan masih tinggi.	Penyusunan skenario uji coba pemulihan bencana (PR-I-04-02)
		Perlunya perbaikan segera pada saat ditemukan error/bug karena sistem aplikasi yang berjalan masih sering mengalami gangguan teknis, yang mengancam kontinuitas dan kualitas pelayanan publik.	Melakukan perbaikan pada saat ditemukan error/bug (PR-A-04-02)
		Perlunya peta rencana ini karena arah pengembangan SPBE belum memiliki panduan yang jelas untuk memastikan kesinambungan transformasi digital di pemerintahan daerah.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Peta Rencana SPBE (PR-T-02-01)
		Perlunya peta rencana SPBE karena implementasi sistem digital belum memiliki roadmap yang terstruktur, menyebabkan inisiatif pembangunan sistem tidak sinkron dan sulit diukur efektivitasnya.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Peta Rencana SPBE (PR-T-02-01)
		Perlunya revisi ini karena peta rencana SPBE yang ada belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan terkini, serta ada perkembangan regulasi dan teknologi yang perlu diakomodasi.	Evaluasi dan Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE (PR-T-13-01)

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/Activities)
		Perlunya revisi kebijakan arsitektur SPBE karena regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung interoperabilitas antar-sistem pemerintahan.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Arsitektur SPBE (PR-T-01-01)
		Perlunya standar kebijakan dalam pengembangan aplikasi agar sistem lebih efisien, tidak redundan, dan mendukung layanan publik.	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE (PR-T-04-01)
		Perlunya Terpenuhi SLA (PR-I-06-03) karena tingkat layanan jaringan belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga diperlukan pemantauan dan optimalisasi agar kinerja internet, intranet, dan komunikasi intra pmda tetap andal.	Terpenuhi SLA (PR-I-06-03)
		Perlunya Uji coba pemulihan bencana (PR-I-04-03) karena sistem pemulihan data dan layanan TIK belum teruji secara menyeluruh, sehingga diperlukan simulasi untuk memastikan kesiapan menghadapi gangguan atau bencana.	Uji coba pemulihan bencana (PR-I-04-03)
		Perlunya uji coba pemulihan bencana karena keandalan pusat pemulihan data belum diuji secara nyata, sehingga efektivitas dan kecepatan pemulihan masih diragukan.	Uji coba pemulihan bencana (PR-I-04-03)
		Perlunya upgrade patch keamanan dan performa sistem karena adanya potensi celah keamanan dan penurunan kinerja akibat teknologi yang usang, yang dapat mengancam integritas layanan pemerintahan.	Melakukan upgrade patch keamanan, maupun patch performa sistem (PR-A-04-04)
KP-DAB 09.03.03.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Laptop.	Pengadaan Laptop
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Smartphone.	Pengadaan Smartphone
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan Pembuatan Aplikasi Dashboard Pimpinan.	Pembuatan Aplikasi Dashboard Pimpinan
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan Pembuatan Aplikasi Media Analitik IKPS.	Pembuatan Aplikasi Media Analitik IKPS
KP-DAB 09.03.04.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Perlunya Layanan Satu Data Indonesia (PR-L-02-08) karena layanan SPBE masih menghadapi permasalahan dalam interoperabilitas data antarinstansi, sehingga diperlukan sistem satu data yang memastikan konsistensi, akurasi, dan kemudahan akses informasi.	Evaluasi Layanan Satu Data Indonesia Digital (PR-L-02-08)
		Perlunya layanan Satu Data Indonesia karena masih terdapat perbedaan standar dan format data antar instansi, menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pengambilan keputusan berbasis data.	Evaluasi Layanan Satu Data Indonesia Digital (PR-L-02-08)
		Perlunya pedoman manajemen data karena belum ada standar baku dalam pengelolaan data pemerintahan, menyebabkan variasi dalam format, kualitas, dan aksesibilitas data di tiap unit kerja.	Penyusunan pedoman manajemen data (PR-M-03-02)
		Perlunya Pembaharuan arsitektur data (PR-M-03-03) karena struktur data perencanaan pembangunan masih belum terintegrasi	Pembaharuan arsitektur data (PR-M-03-03)

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/ Activities)
		dengan baik, sehingga diperlukan pembaruan untuk meningkatkan interoperabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan serta analisis data.	
		Perlunya pembaharuan arsitektur data karena struktur data yang digunakan masih terfragmentasi, menghambat interoperabilitas dan pemanfaatan data secara optimal dalam perencanaan pembangunan.	Pembaharuan arsitektur data (PR-M-03-03)
		Perlunya Pembaruan data sektoral secara berkala (PR-M-03-07) karena data yang digunakan dalam perencanaan seringkali tidak up-to-date, sehingga diperlukan pemutakhiran berkala agar kebijakan yang dibuat relevan dengan kondisi terbaru.	Pembaruan data sektoral secara berkala (PR-M-03-07)
		Perlunya pembaruan data sektoral secara berkala karena banyak data yang sudah usang atau tidak lagi relevan, menyebabkan analisis dan kebijakan yang dibuat tidak mencerminkan kondisi terkini.	Pembaruan data sektoral secara berkala (PR-M-03-07)
		Perlunya pembentukan tim satu data karena masih terjadi duplikasi dan inkonsistensi data antar-unit kerja, menyebabkan pengambilan keputusan berbasis data menjadi kurang akurat dan tidak terintegrasi.	Pembentukan tim satu data (PR-M-03-01)
		Perlunya Pemeriksaan pemenuhan data sektoral (PR-M-03-05) karena masih terdapat inkonsistensi dan ketidaksesuaian dalam data sektoral yang dapat menghambat analisis perencanaan, sehingga diperlukan verifikasi untuk memastikan kelengkapan dan akurasi.	Pemeriksaan pemenuhan data sektoral (PR-M-03-05)
		Perlunya pemeriksaan pemenuhan data sektoral karena kualitas dan keakuratan data yang dikumpulkan belum terverifikasi, meningkatkan risiko kesalahan dalam analisis dan pengambilan kebijakan.	Pemeriksaan pemenuhan data sektoral (PR-M-03-05)
		Perlunya Pengembangan Report Builder, Data Mining, dan Warehousing, Integrasi Back Office Application (PR-A-03-01) karena pengelolaan data pemerintahan masih tersebar dan kurang terstruktur, sehingga diperlukan sistem terintegrasi untuk analisis data yang lebih akurat dan pengambilan keputusan berbasis data.	Pengembangan Report builder, Data mining dan warehousing, Integrasi back office application (PR-A-03-01)
		Perlunya Pengumpulan data sektoral di masing-masing unit kerja (PR-M-03-04) karena data perencanaan pembangunan masih tersebar dan belum terstandarisasi, sehingga diperlukan mekanisme pengumpulan yang sistematis untuk mendukung kebijakan berbasis data.	Pengumpulan data sektoral di masing-masing unit kerja (PR-M-03-04)
		Perlunya pengumpulan data sektoral karena masih banyak unit kerja yang belum memiliki data yang lengkap dan terkini, menyebabkan kesulitan dalam perencanaan kebijakan berbasis bukti.	Pengumpulan data sektoral di masing-masing unit kerja (PR-M-03-04)
		Perlunya penjaminan kualitas data karena masih terdapat data yang tidak akurat, tumpang tindih, dan tidak diperbarui secara	Penjaminan kualitas data meliputi daftar data, data prioritas, dan jadwal

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/Activities)
		berkala, sehingga menghambat pengambilan keputusan berbasis data yang tepat.	pemutakhiran data (PR-M-03-09)
		Perlunya Penjaminan kualitas data meliputi daftar data, data prioritas, dan jadwal pemutakhiran data (PR-M-03-09) karena masih terdapat inkonsistensi dan keterlambatan dalam pemutakhiran data perencanaan pembangunan, sehingga diperlukan standar kualitas untuk memastikan keakuratan dan relevansi data.	Penjaminan kualitas data meliputi daftar data, data prioritas, dan jadwal pemutakhiran data (PR-M-03-09)
		Perlunya Penyebarluasan data sektoral (PR-M-03-06) karena akses publik terhadap data perencanaan masih terbatas, sehingga diperlukan mekanisme distribusi yang lebih transparan untuk mendukung partisipasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik.	Penyebarluasan data sektoral (PR-M-03-06)
		Perlunya penyebarluasan data sektoral karena keterbatasan akses terhadap data menyebabkan kesenjangan informasi antar-unit kerja, menghambat koordinasi dan kolaborasi dalam pembangunan daerah.	Penyebarluasan data sektoral (PR-M-03-06)
		Perlunya Penyimpanan data pada portal open data (PR-M-03-08) karena data sektoral masih sulit diakses oleh pemangku kepentingan, sehingga diperlukan platform terintegrasi untuk meningkatkan keterbukaan dan kemudahan pemanfaatan data.	Penyimpanan data pada portal open data (PR-M-03-08)
		Perlunya penyimpanan data pada portal open data karena akses publik terhadap data masih terbatas, padahal transparansi dan keterbukaan data dapat meningkatkan partisipasi masyarakat serta mendukung inovasi berbasis data.	Penyimpanan data pada portal open data (PR-M-03-08)
		Perlunya penyusunan kajian Big Data karena volume dan kompleksitas data yang terus meningkat belum dimanfaatkan secara strategis, sehingga potensi pengambilan keputusan berbasis data masih belum optimal.	Penyusunan Kajian Big Data
KP-DAB 09.03.08.01	Persandian Pengamanan Informasi	Perlunya edukasi melalui media informasi karena kesadaran pegawai terhadap ancaman siber masih rendah, sehingga rentan terhadap serangan phishing, malware, dan kebocoran data.	Membuat postingan keamanan informasi pada media informasi (PR-M-02-03)
		Perlunya Evaluasi dan perbaikan manajemen keamanan informasi (PR-M-02-05) karena masih terdapat celah dalam pengelolaan keamanan informasi yang berpotensi mengganggu layanan digital, sehingga diperlukan evaluasi dan perbaikan secara berkala.	Evaluasi dan perbaikan manajemen keamanan informasi (PR-M-02-05)
		Perlunya evaluasi dan perbaikan manajemen keamanan informasi karena sistem pengamanan data dan jaringan belum berjalan optimal, sehingga masih ditemukan celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.	Evaluasi dan perbaikan manajemen keamanan informasi (PR-M-02-05)
		Perlunya evaluasi ini karena hasil uji keamanan perlu dianalisis untuk menentukan langkah mitigasi yang efektif guna	Evaluasi hasil pelaksanaan penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi (PR-K-06-

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/Activities)
		meningkatkan ketahanan sistem informasi pemerintahan.	03)
		Perlunya identifikasi ruang lingkup ini karena sistem informasi pemerintahan masih rentan terhadap ancaman siber, sementara belum ada pemetaan menyeluruh terkait potensi celah keamanan.	Identifikasi ruang lingkup penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi (PR-K-06-01)
		Perlunya identifikasi standar keamanan informasi karena belum ada regulasi yang terimplementasi secara menyeluruh dalam mengamankan sistem dan data pemerintahan dari ancaman siber.	Identifikasi ruang lingkup untuk standar keamanan informasi (Indeks KAMI/ISO 27001) (PR-K-05-01)
		Perlunya memastikan keamanan dalam integrasi layanan antar sistem pemerintahan agar tidak terjadi celah keamanan yang dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab.	Penyusunan SOP Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (PR-K-03-01)
		Perlunya memastikan standar pengamanan data yang jelas dan terstruktur untuk mencegah kebocoran serta penyalahgunaan informasi di lingkungan pemerintahan.	Penyusunan SOP Keamanan Data dan Informasi (PR-K-01-01)
		Perlunya Membuat postingan keamanan informasi pada media informasi (PR-M-02-03) karena kesadaran aparaturnya dan masyarakat terhadap keamanan SPBE masih rendah, sehingga diperlukan edukasi berkelanjutan melalui media informasi.	Membuat postingan keamanan informasi pada media informasi (PR-M-02-03)
		Perlunya menetapkan pedoman keamanan jaringan internal pemerintah untuk menghindari akses tidak sah serta meningkatkan perlindungan terhadap serangan siber.	Penyusunan SOP Keamanan Jaringan Intra Pemerintah (PR-K-04-01)
		Perlunya mengatur mekanisme keamanan dalam pengelolaan aplikasi SPBE agar dapat mencegah serangan siber serta meningkatkan keandalan sistem layanan digital pemerintahan.	Penyusunan SOP Keamanan Aplikasi SPBE (PR-K-02-01)
		Perlunya mengevaluasi kebijakan keamanan aplikasi SPBE yang ada guna mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan sesuai dengan standar terbaru.	Evaluasi SOP Keamanan Aplikasi SPBE (PR-K-02-02)
		Perlunya menguji efektivitas SOP yang telah diterapkan dalam sistem penghubung layanan pemerintah agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan ancaman terkini.	Evaluasi SOP Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (PR-K-03-02)
		Perlunya menilai dan memperbaharui kebijakan keamanan jaringan intra pemerintahan agar tetap optimal dalam menghadapi potensi ancaman digital.	Evaluasi SOP Keamanan Jaringan Intra Pemerintah (PR-K-04-02)
		Perlunya menilai efektivitas program edukasi dan sosialisasi yang telah dilakukan agar materi yang diberikan dapat terus diperbaharui sesuai dengan ancaman keamanan terbaru.	Evaluasi Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Keamanan SPBE (PR-K-07-02)
		Perlunya meningkatkan kesadaran serta pemahaman pegawai pemerintahan terkait pentingnya keamanan SPBE untuk mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pengelolaan sistem digital.	Pelaksanaan Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Keamanan SPBE (PR-K-07-01)
		Perlunya meninjau efektivitas SOP yang telah	Evaluasi SOP Keamanan Data

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/Activities)
		diterapkan guna menyesuaikan dengan perkembangan ancaman siber dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi terbaru.	dan Informasi (PR-K-01-02)
		Perlunya Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE (PR-M-02-04) karena masih banyak pegawai yang belum memahami standar keamanan sistem elektronik, sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas melalui sosialisasi dan pelatihan.	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE (PR-M-02-04)
		Perlunya pembentukan tim keamanan informasi karena meningkatnya ancaman siber terhadap sistem pemerintahan, sementara kebijakan keamanan informasi belum sepenuhnya diterapkan di semua unit kerja.	Pembentukan tim keamanan informasi (PR-M-02-01)
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Lisensi Antivirus.	Pengadaan Lisensi Antivirus
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Lisensi Software Firewall.	Pengadaan Lisensi Software Firewall
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Lisensi SSL.	Pengadaan Lisensi SSL
		Perlunya pendampingan sertifikasi keamanan informasi karena saat ini belum tersedia sumber daya internal yang memiliki kompetensi dalam memenuhi standar ISO 27001 atau indeks KAMI.	Pendampingan sertifikasi ISO 27001 atau indeks KAMI (PR-K-05-03)
		Perlunya penilaian ini karena belum ada uji keamanan sistem yang komprehensif untuk memastikan perlindungan terhadap serangan siber dan kebocoran data.	Pelaksanaan penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi (PR-K-06-02)
		Perlunya penyusunan SOP keamanan informasi karena belum ada standar operasional yang selaras dengan regulasi nasional, menyebabkan potensi kebocoran data dan lemahnya perlindungan sistem SPBE.	Penyusunan SOP keamanan informasi mengacu pada Perban BSSN No. 4 Tahun 2021 (PR-M-02-02)
		Perlunya sertifikasi keamanan informasi karena tingkat kesiapan keamanan sistem pemerintahan masih rendah, sehingga meningkatkan risiko kebocoran data dan serangan siber yang dapat mengganggu layanan publik.	Sertifikasi ISO 27001 atau indeks KAMI (PR-K-05-04)
		Perlunya sosialisasi dan pelatihan keamanan SPBE karena masih banyak pegawai yang belum memahami pentingnya perlindungan data dan penerapan standar keamanan dalam penggunaan teknologi informasi.	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE (PR-M-02-04)
KP-DAB 09.05.01.01	Analisis Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan Pengembangan Aplikasi CSRKU.	Pengembangan Aplikasi CSRKU
KP-DAB 09.05.02.01	Perencanaan dan Pendanaan	Perlunya Evaluasi dan perbaikan manajemen pengetahuan (PR-M-06-04) karena sistem manajemen pengetahuan yang ada belum optimal dalam mendukung pengembangan inovasi, sehingga evaluasi diperlukan untuk	Evaluasi dan perbaikan manajemen pengetahuan (PR-M-06-04)

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/Activities)
		meningkatkan efektivitas dan relevansi informasi.	
		Perlunya evaluasi dan perbaikan manajemen pengetahuan karena implementasi sistem berbagi pengetahuan belum optimal, menyebabkan rendahnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung efisiensi dan inovasi kerja.	Evaluasi dan perbaikan manajemen pengetahuan (PR-M-06-04)
		Perlunya pedoman manajemen pengetahuan karena belum ada kebijakan yang mengatur pengelolaan dan transfer pengetahuan di lingkungan pemerintah daerah, menghambat efektivitas kerja dan inovasi.	Penyusunan pedoman manajemen pengetahuan (kebijakan dan SOP) (PR-M-06-02)
		Perlunya pelaksanaan manajemen pengetahuan berbasis aplikasi karena penyimpanan dan penyebaran informasi masih dilakukan secara manual, sehingga sulit diakses dan kurang efektif dalam mendukung pengambilan keputusan.	Pelaksanaan manajemen pengetahuan dengan aplikasi (PR-M-06-03)
		Perlunya Pelaksanaan manajemen pengetahuan dengan aplikasi (PR-M-06-03) karena penyimpanan dan penyebaran informasi inovasi masih belum terdokumentasi dengan baik, sehingga aplikasi diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan pengetahuan.	Pelaksanaan manajemen pengetahuan dengan aplikasi (PR-M-06-03)
		Perlunya pembentukan komite manajemen pengetahuan karena belum ada mekanisme terstruktur dalam mendokumentasikan dan berbagi pengetahuan antar unit kerja, menyebabkan hilangnya informasi penting akibat pergantian personel.	Pembentukan komite manajemen pengetahuan (PR-M-06-01)
KP-DAB 09.05.03.01	Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan Pengembangan Aplikasi siMPel.	Pengembangan Aplikasi siMPel
KP-DAB 09.06.01.02	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan Pembuatan Aplikasi SIMKD.	Pembuatan Aplikasi SIMKD
KP-DAB 09.06.01.03	Administrasi Tata Pemerintahan	Perlunya layanan administrasi pemerintah karena masih ditemukan inefisiensi dalam birokrasi, rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dokumen, serta kurangnya interoperabilitas sistem antar instansi.	Evaluasi Layanan Administrasi Pemerintah Digital (PR-L-02-06)
KP-DAB 09.06.02.01	Penataan Organisasi	Perlunya Evaluasi dan perbaikan manajemen perubahan (PR-M-07-05) karena pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis digital perlu pemantauan dan penyempurnaan berkala agar tetap selaras dengan kebutuhan organisasi dan kebijakan pemerintah pusat.	Evaluasi dan perbaikan manajemen perubahan (PR-M-07-05)
		Perlunya evaluasi dan perbaikan manajemen perubahan karena belum ada mekanisme umpan balik yang efektif dalam mengukur dampak perubahan terhadap efisiensi kerja birokrasi dan pelayanan publik.	Evaluasi dan perbaikan manajemen perubahan (PR-M-07-05)
		Perlunya pedoman manajemen perubahan SPBE karena belum ada panduan jelas dalam mengelola perubahan sistem digital pemerintahan, menyebabkan resistensi dari pegawai dan kurangnya keselarasan dalam implementasi perubahan.	Penyusunan pedoman / SOP manajemen perubahan SPBE (PR-M-07-02)

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (<i>Project/Activities</i>)
		Perlunya Pelaksanaan manajemen perubahan SPBE (PR-M-07-04) karena transformasi digital di pemerintahan masih menghadapi resistensi dan kurangnya kesiapan SDM, sehingga diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan adaptasi dan efektivitas implementasi SPBE.	Pelaksanaan manajemen perubahan SPBE (PR-M-07-04)
		Perlunya pelaksanaan manajemen perubahan SPBE karena implementasi transformasi digital di pemerintahan masih menghadapi resistensi dan kurangnya kesiapan SDM, sehingga dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk memastikan keberhasilan perubahan.	Pelaksanaan manajemen perubahan SPBE (PR-M-07-04)
		Perlunya pembentukan komite manajemen perubahan karena proses transformasi digital dan reformasi birokrasi masih mengalami hambatan, sehingga dibutuhkan tim khusus untuk mengawal perubahan agar lebih terarah dan efektif.	Pembentukan komite manajemen perubahan (PR-M-07-01)
		Perlunya penyusunan form log manajemen perubahan karena proses pencatatan perubahan dalam reformasi birokrasi dan digitalisasi SPBE belum terdokumentasi secara sistematis, menyebabkan sulitnya evaluasi dan mitigasi risiko perubahan.	Penyusunan form log manajemen perubahan (PR-M-07-03)
KP-DAB 09.06.02.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Perlunya Analisis Kebutuhan Layanan Publik (PR-L-03-01) karena masih terdapat ketidaksesuaian antara layanan yang disediakan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan pemetaan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan.	Analisis Kebutuhan Layanan Publik (PR-L-03-01)
		Perlunya analisis kebutuhan layanan publik karena layanan yang tersedia belum sepenuhnya berbasis kebutuhan masyarakat, sehingga sering kali tidak efektif dalam menjawab permasalahan yang ada.	Analisis Kebutuhan Layanan Publik (PR-L-03-01)
		Perlunya Monitoring dan Evaluasi Layanan Publik (PR-L-03-03) karena pengukuran kinerja layanan masih belum optimal, sehingga diperlukan sistem evaluasi berkelanjutan untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan.	Monitoring dan Evaluasi Layanan Publik (PR-L-03-03)
		Perlunya monitoring dan evaluasi layanan publik karena data kinerja dan efektivitas layanan belum terukur secara sistematis, mengakibatkan kesulitan dalam mengidentifikasi masalah serta potensi perbaikan.	Monitoring dan Evaluasi Layanan Publik (PR-L-03-03)
		Perlunya Pengembangan Modul Layanan Publik (PR-L-03-02) karena standar operasional layanan belum terdokumentasi secara sistematis, sehingga dibutuhkan modul sebagai panduan peningkatan kualitas layanan.	Pengembangan Modul Layanan Publik (PR-L-03-02)
		Perlunya pengembangan modul layanan publik karena saat ini platform layanan publik belum terintegrasi dengan baik, sehingga akses dan penyampaian informasi kepada masyarakat masih kurang optimal.	Pengembangan Modul Layanan Publik (PR-L-03-02)

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/Activities)
		Perlunya Survey Kepuasan Layanan Internal (PR-L-05-01) karena belum ada mekanisme terstruktur untuk mengukur kepuasan pegawai terhadap sistem kerja dan pelayanan internal, yang berpengaruh pada produktivitas dan kinerja organisasi.	Survey Kepuasan Layanan Internal (PR-L-05-01)
		Perlunya survey kepuasan layanan internal karena indikasi adanya kendala koordinasi dan dukungan antar unit kerja, yang berdampak pada produktivitas dan kualitas pelayanan di lingkungan pemerintahan.	Survey Kepuasan Layanan Internal (PR-L-05-01)
		Perlunya Survey Kepuasan Layanan Publik (PR-L-05-02) karena belum tersedia data terukur mengenai persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan, sehingga diperlukan survei sebagai dasar peningkatan pelayanan berbasis kebutuhan pengguna.	Survey Kepuasan Layanan Publik (PR-L-05-02)
		Perlunya survey kepuasan layanan publik karena masukan dari masyarakat mengenai layanan yang diterima masih minim, sehingga gambaran kepuasan dan ekspektasi publik belum terefleksikan secara menyeluruh.	Survey Kepuasan Layanan Publik (PR-L-05-02)
KP-DAB 09.06.03.06	Pengembangan Kompetensi ASN (Aparatur Sipil Negara)	Perlunya Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja Jabatan TIK (PR-M-05-02) karena belum ada pemetaan yang jelas terkait peran dan beban kerja pegawai TIK, sehingga dapat menghambat efektivitas dan optimalisasi tugas mereka.	Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja Jabatan TIK (PR-M-05-02)
		Perlunya analisis jabatan dan beban kerja TIK karena belum ada pemetaan yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab SDM TIK, menyebabkan ketidakseimbangan beban kerja dan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan sistem digital.	Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja Jabatan TIK (PR-M-05-02)
		Perlunya Analisis Kebutuhan Pelatihan SDM TIK (PR-M-05-03) karena belum terdapat pemetaan spesifik mengenai kompetensi yang harus ditingkatkan, sehingga pelatihan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.	Analisis Kebutuhan Pelatihan SDM TIK (PR-M-05-03)
		Perlunya analisis kebutuhan pelatihan SDM TIK karena keterampilan tenaga teknis belum merata, menyebabkan rendahnya efektivitas dalam pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi di pemerintahan.	Analisis Kebutuhan Pelatihan SDM TIK (PR-M-05-03)
		Perlunya Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM TIK (PR-M-05-05) karena belum ada mekanisme terstruktur untuk menilai efektivitas pelatihan yang telah dilakukan, sehingga diperlukan evaluasi untuk memastikan dampaknya terhadap peningkatan kinerja pegawai.	Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM TIK (PR-M-05-05)
		Perlunya evaluasi pengembangan kompetensi SDM TIK karena belum ada pemantauan dan pengukuran efektivitas pelatihan yang telah diberikan, sehingga dampaknya terhadap peningkatan layanan masih belum terukur.	Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM TIK (PR-M-05-05)
		Perlunya Pelatihan SDM TIK (PR-M-05-04) karena pegawai TIK perlu meningkatkan keterampilan dalam menghadapi	Pelatihan SDM TIK (PR-M-05-04)

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/Activities)
		perkembangan teknologi yang pesat, sehingga mampu mengelola sistem pemerintahan berbasis digital secara optimal.	
		Perlunya pelatihan SDM TIK karena masih terdapat kesenjangan kompetensi dalam penggunaan dan pengelolaan sistem elektronik pemerintahan, menghambat optimalisasi SPBE.	Pelatihan SDM TIK (PR-M-05-04)
		Perlunya pengadaan SDM developer internal karena ketergantungan pada pihak ketiga masih tinggi, mengakibatkan keterlambatan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pemerintahan.	Pengadaan SDM Developer Internal Pemerintah Daerah (PR-M-05-01)
		Perlunya Pengadaan SDM Developer Internal Pemerintah Daerah (PR-M-05-01) karena pengelolaan dan pengembangan sistem digital masih bergantung pada pihak eksternal, sehingga diperlukan tenaga internal untuk meningkatkan kemandirian dan efisiensi.	Pengadaan SDM Developer Internal Pemerintah Daerah (PR-M-05-01)
KP-DAB 09.06.04.03	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Perlunya analisis dan evaluasi risiko SPBE karena belum ada metode yang terstruktur dalam menilai kemungkinan dan dampak risiko terhadap sistem digital, sehingga strategi mitigasi yang diterapkan belum berbasis data yang akurat.	Penyusunan analisis risiko SPBE dengan menguraikan kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan seta level risiko SPBE & penyusunan evaluasi risiko SPBE (PR-M-01-08)
		Perlunya dokumentasi dan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas langkah mitigasi risiko serta melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan.	Penyusunan laporan evaluasi manajemen risiko SPBE secara periodik dan insidental (PR-M-01-10)
		Perlunya dokumentasi evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas strategi mitigasi risiko serta menyesuaikannya dengan perkembangan terbaru.	Penyusunan laporan evaluasi manajemen risiko SPBE secara periodik dan insidental (PR-M-01-10)
		Perlunya Evaluasi hasil pelaksanaan audit aplikasi SPBE (PR-AA-02-04) karena hasil audit sebelumnya belum dianalisis secara menyeluruh, sehingga perlu ditinjau untuk mengidentifikasi celah keamanan dan rekomendasi perbaikan.	Evaluasi hasil pelaksanaan audit aplikasi SPBE (PR-AA-02-04)
		Perlunya Evaluasi hasil pelaksanaan audit aplikasi SPBE (PR-AA-02-04) karena hasil audit sebelumnya harus dianalisis untuk menentukan langkah perbaikan yang tepat guna meningkatkan kualitas dan keamanan aplikasi SPBE.	Evaluasi hasil pelaksanaan audit aplikasi SPBE (PR-AA-02-04)
		Perlunya Evaluasi hasil pelaksanaan audit aplikasi SPBE (PR-AA-02-04) karena tindak lanjut atas temuan audit sebelumnya belum terpantau secara sistematis, sehingga diperlukan evaluasi untuk memastikan perbaikan berjalan sesuai rekomendasi.	Evaluasi hasil pelaksanaan audit aplikasi SPBE (PR-AA-02-04)
		Perlunya Evaluasi hasil pelaksanaan audit infrastruktur SPBE (PR-AI-01-04) karena hasil audit sebelumnya belum ditindaklanjuti secara optimal, sehingga perlu dilakukan analisis untuk memastikan efektivitas rekomendasi perbaikan.	Evaluasi hasil pelaksanaan audit infrastruktur SPBE (PR-AI-01-04)
		Perlunya Evaluasi hasil pelaksanaan audit infrastruktur SPBE (PR-AI-01-04) karena	Evaluasi hasil pelaksanaan audit infrastruktur SPBE (PR-AI-01-04)

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/ Activities)
		masih diperlukan analisis menyeluruh terhadap temuan audit sebelumnya untuk memastikan tindak lanjut perbaikan infrastruktur SPBE berjalan efektif dan sesuai standar keamanan.	
		Perlunya Evaluasi hasil pelaksanaan audit infrastruktur SPBE (PR-AI-01-04) karena masih terdapat kelemahan pada infrastruktur digital pemerintah yang dapat menghambat keamanan dan kinerja layanan SPBE.	Evaluasi hasil pelaksanaan audit infrastruktur SPBE (PR-AI-01-04)
		Perlunya Evaluasi hasil pelaksanaan audit keamanan SPBE (PR-AK-03-04) karena hasil audit keamanan perlu dianalisis untuk mengukur efektivitas langkah-langkah perbaikan yang telah diterapkan dan menentukan strategi peningkatan keamanan selanjutnya.	Evaluasi hasil pelaksanaan audit keamanan SPBE (PR-AK-03-04)
		Perlunya Evaluasi hasil pelaksanaan audit keamanan SPBE (PR-AK-03-04) karena masih terdapat celah keamanan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik yang berpotensi menimbulkan risiko kebocoran data dan gangguan layanan publik.	Evaluasi hasil pelaksanaan audit keamanan SPBE (PR-AK-03-04)
		Perlunya Evaluasi hasil pelaksanaan audit keamanan SPBE (PR-AK-03-04) karena tindak lanjut dari audit sebelumnya belum terpantau secara menyeluruh, sehingga evaluasi diperlukan untuk memastikan perbaikan telah diterapkan dengan efektif.	Evaluasi hasil pelaksanaan audit keamanan SPBE (PR-AK-03-04)
		Perlunya identifikasi risiko SPBE karena berbagai ancaman terhadap keamanan, operasional, dan keberlanjutan SPBE belum terdokumentasi secara sistematis, sehingga belum ada langkah mitigasi yang tepat.	Penyusunan identifikasi risiko SPBE dengan menguraikan jenis risiko SPBE, penyebab, kategori, dampak, dan area dampak (PR-M-01-07)
		Perlunya kebijakan manajemen risiko SPBE karena belum ada regulasi yang mengatur mitigasi risiko dalam implementasi sistem digital, menyebabkan respons terhadap ancaman keamanan dan kegagalan sistem tidak terstruktur.	Penyusunan dan penetapan kebijakan manajemen risiko SPBE (PR-M-01-02)
		Perlunya laporan evaluasi manajemen risiko SPBE karena belum ada mekanisme pemantauan berkala yang terdokumentasi untuk menilai efektivitas mitigasi risiko, sehingga potensi permasalahan dalam sistem tidak terdeteksi secara dini.	Penyusunan laporan evaluasi manajemen risiko SPBE secara periodik dan insidental (PR-M-01-10)
		Perlunya melakukan evaluasi rutin dan insidental untuk mengukur efektivitas kebijakan pengelolaan risiko serta melakukan perbaikan yang diperlukan.	Penyusunan laporan evaluasi manajemen risiko SPBE secara periodik dan insidental (PR-M-01-10)
		Perlunya memastikan adanya rencana aksi yang jelas dalam menangani risiko SPBE, termasuk output, jadwal implementasi, dan penanggung jawab.	Penyusunan rencana penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya (PR-M-01-09)
		Perlunya memastikan bahwa risiko SPBE diidentifikasi berdasarkan kondisi aktual pemerintahan sehingga mitigasi yang	Penetapan konteks risiko SPBE (PR-M-01-06)

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (<i>Project/Activities</i>)
		diterapkan relevan dan tepat sasaran.	
		Perlunya memastikan bahwa risiko yang telah diidentifikasi dan ditangani dapat dievaluasi secara berkala untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko SPBE.	Penyusunan laporan evaluasi manajemen risiko SPBE secara periodik dan insidental (PR-M-01-10)
		Perlunya memastikan peningkatan kapasitas aparatur dalam memahami risiko SPBE, meminimalkan dampak negatif, dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi ancaman digital.	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi risiko SPBE oleh inspektorat (PR-M-01-05)
		Perlunya memastikan setiap risiko SPBE memiliki solusi konkret yang dapat diterapkan untuk meminimalisir gangguan pada layanan digital pemerintahan.	Penyusunan rencana penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya (PR-M-01-09)
		Perlunya memastikan setiap risiko SPBE memiliki solusi yang dapat diimplementasikan secara efektif untuk menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan digital.	Penyusunan rencana penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya (PR-M-01-09)
		Perlunya menentukan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi risiko SPBE agar strategi mitigasi dapat disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek.	Penetapan konteks risiko SPBE (PR-M-01-06)
		Perlunya menentukan ruang lingkup dan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko SPBE agar strategi mitigasi yang disusun lebih terarah dan sesuai dengan kondisi eksisting.	Penetapan konteks risiko SPBE (PR-M-01-06)
		Perlunya menentukan ruang lingkup, parameter, dan kategori risiko yang relevan dengan implementasi SPBE agar mitigasi dapat dilakukan dengan tepat.	Penetapan konteks risiko SPBE (PR-M-01-06)
		Perlunya menganalisis dampak dan kemungkinan terjadinya risiko dalam SPBE agar dapat ditentukan tingkat urgensi serta strategi pengendalian yang tepat.	Penyusunan analisis risiko SPBE dengan menguraikan kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan seta level risiko SPBE & penyusunan evaluasi risiko SPBE (PR-M-01-08)
		Perlunya mengenali jenis risiko SPBE, penyebabnya, serta dampaknya agar dapat dilakukan langkah pencegahan yang lebih efektif sejak tahap awal.	Penyusunan identifikasi risiko SPBE dengan menguraikan jenis risiko SPBE, penyebab, kategori, dampak, dan area dampak (PR-M-01-07)
		Perlunya mengidentifikasi jenis risiko yang dapat menghambat implementasi SPBE, sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan secara lebih dini dan efektif.	Penyusunan identifikasi risiko SPBE dengan menguraikan jenis risiko SPBE, penyebab, kategori, dampak, dan area dampak (PR-M-01-07)
		Perlunya mengukur tingkat risiko SPBE berdasarkan kemungkinan dan dampaknya agar prioritas mitigasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.	Penyusunan analisis risiko SPBE dengan menguraikan kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan seta level risiko SPBE & penyusunan evaluasi risiko SPBE (PR-M-01-08)
		Perlunya menguraikan secara rinci potensi risiko SPBE berdasarkan penyebab, kategori,	Penyusunan identifikasi risiko SPBE dengan menguraikan jenis

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/ Activities)
		serta dampak yang ditimbulkan agar strategi mitigasi lebih akurat.	risiko SPBE, penyebab, kategori, dampak, dan area dampak (PR-M-01-07)
		Perlunya menilai probabilitas dan dampak dari setiap risiko SPBE sehingga langkah mitigasi dapat disusun berdasarkan prioritas yang tepat.	Penyusunan analisis risiko SPBE dengan menguraikan kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan seta level risiko SPBE & penyusunan evaluasi risiko SPBE (PR-M-01-08)
		Perlunya menilai probabilitas dan dampak risiko SPBE agar langkah mitigasi dapat difokuskan pada risiko dengan konsekuensi paling besar terhadap sistem pemerintahan.	Penyusunan analisis risiko SPBE dengan menguraikan kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan seta level risiko SPBE & penyusunan evaluasi risiko SPBE (PR-M-01-08)
		Perlunya meningkatkan kapasitas aparatur dalam memahami risiko SPBE agar kebijakan dan sistem yang diterapkan lebih siap menghadapi tantangan.	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi risiko SPBE oleh inspektorat (PR-M-01-05)
		Perlunya meningkatkan pemahaman dan kesiapan aparatur dalam mengelola risiko SPBE agar sistem dapat berjalan dengan aman dan sesuai regulasi.	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi risiko SPBE oleh inspektorat (PR-M-01-05)
		Perlunya meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur dalam mengidentifikasi serta mengelola risiko yang dapat menghambat keberhasilan SPBE.	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi risiko SPBE oleh inspektorat (PR-M-01-05)
		Perlunya menyusun langkah konkret dalam menangani risiko SPBE, termasuk rencana aksi, output yang diharapkan, serta pihak yang bertanggung jawab.	Penyusunan rencana penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya (PR-M-01-09)
		Perlunya merinci risiko SPBE secara sistematis agar lebih mudah dikendalikan, termasuk mengklasifikasikan berdasarkan kategori dan area dampaknya.	Penyusunan identifikasi risiko SPBE dengan menguraikan jenis risiko SPBE, penyebab, kategori, dampak, dan area dampak (PR-M-01-07)
		Perlunya pedoman manajemen risiko SPBE karena belum ada acuan yang jelas dalam pengelolaan risiko, menyebabkan ketidakkonsistenan dalam identifikasi, mitigasi, dan respons terhadap risiko SPBE di berbagai instansi.	Penyusunan pedoman manajemen risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE, budaya risiko SPBE (PR-M-01-03)
		Perlunya Pelaksanaan audit eksternal aplikasi SPBE (PR-AA-02-03) karena diperlukan evaluasi independen terhadap keamanan dan kepatuhan aplikasi SPBE guna memastikan standar keamanan informasi yang lebih objektif dan transparan.	Pelaksanaan audit eksternal aplikasi SPBE (PR-AA-02-03)
		Perlunya Pelaksanaan audit eksternal aplikasi SPBE (PR-AA-02-03) karena diperlukan penilaian independen untuk memastikan keamanan, kepatuhan regulasi, dan efektivitas aplikasi SPBE yang digunakan.	Pelaksanaan audit eksternal aplikasi SPBE (PR-AA-02-03)
		Perlunya Pelaksanaan audit eksternal aplikasi SPBE (PR-AA-02-03) karena pengujian keamanan yang dilakukan secara internal	Pelaksanaan audit eksternal aplikasi SPBE (PR-AA-02-03)

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/ Activities)
		belum cukup untuk memastikan standar keamanan yang optimal, sehingga diperlukan audit pihak ketiga untuk validasi independen.	
		Perlunya Pelaksanaan audit eksternal infrastruktur SPBE (PR-AI-01-03) karena diperlukan penilaian independen terhadap keamanan dan kinerja infrastruktur SPBE, sehingga hasilnya lebih objektif dan sesuai standar nasional.	Pelaksanaan audit eksternal infrastruktur SPBE (PR-AI-01-03)
		Perlunya Pelaksanaan audit eksternal infrastruktur SPBE (PR-AI-01-03) karena diperlukan penilaian independen terhadap keamanan infrastruktur digital guna memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku.	Pelaksanaan audit eksternal infrastruktur SPBE (PR-AI-01-03)
		Perlunya Pelaksanaan audit eksternal infrastruktur SPBE (PR-AI-01-03) karena diperlukan tinjauan independen untuk mengidentifikasi celah keamanan yang mungkin terlewat dalam audit internal dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.	Pelaksanaan audit eksternal infrastruktur SPBE (PR-AI-01-03)
		Perlunya Pelaksanaan audit eksternal keamanan SPBE (PR-AK-03-03) karena diperlukan evaluasi independen terhadap sistem keamanan informasi guna memastikan objektivitas, transparansi, serta peningkatan perlindungan data sesuai standar nasional dan internasional.	Pelaksanaan audit eksternal keamanan SPBE (PR-AK-03-03)
		Perlunya Pelaksanaan audit eksternal keamanan SPBE (PR-AK-03-03) karena evaluasi independen terhadap keamanan sistem masih minim, sehingga diperlukan audit eksternal guna memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku.	Pelaksanaan audit eksternal keamanan SPBE (PR-AK-03-03)
		Perlunya Pelaksanaan audit eksternal keamanan SPBE (PR-AK-03-03) karena masih diperlukan validasi independen terhadap keamanan SPBE, sehingga audit eksternal dibutuhkan untuk memastikan sistem memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.	Pelaksanaan audit eksternal keamanan SPBE (PR-AK-03-03)
		Perlunya Pelaksanaan audit internal aplikasi SPBE (PR-AA-02-02) karena belum ada mekanisme audit berkala yang dilakukan secara mandiri, sehingga perlu dilakukan audit internal untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan sebelum diaudit oleh pihak eksternal.	Pelaksanaan audit internal aplikasi SPBE (PR-AA-02-02)
		Perlunya Pelaksanaan audit internal aplikasi SPBE (PR-AA-02-02) karena masih ada potensi risiko dalam pengelolaan aplikasi yang dapat mengganggu operasional, sehingga perlu dilakukan evaluasi berkala dari dalam instansi.	Pelaksanaan audit internal aplikasi SPBE (PR-AA-02-02)
		Perlunya Pelaksanaan audit internal aplikasi SPBE (PR-AA-02-02) karena pengawasan terhadap keamanan aplikasi SPBE masih terbatas, sehingga diperlukan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi dan	Pelaksanaan audit internal aplikasi SPBE (PR-AA-02-02)

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/ Activities)
		mengatasi potensi kerentanan sejak dini.	
		Perlunya Pelaksanaan audit internal infrastruktur SPBE (PR-AI-01-02) karena belum ada mekanisme audit berkala dari internal pemerintah daerah, sehingga diperlukan evaluasi rutin untuk mendeteksi risiko sejak dini.	Pelaksanaan audit internal infrastruktur SPBE (PR-AI-01-02)
		Perlunya Pelaksanaan audit internal infrastruktur SPBE (PR-AI-01-02) karena evaluasi keamanan sistem masih bersifat reaktif, sehingga audit internal diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan sebelum terjadi insiden keamanan.	Pelaksanaan audit internal infrastruktur SPBE (PR-AI-01-02)
		Perlunya Pelaksanaan audit internal infrastruktur SPBE (PR-AI-01-02) karena perlu adanya evaluasi berkala dari internal pemerintah untuk memastikan sistem berjalan sesuai standar keamanan dan mencegah potensi kerentanan sejak dini.	Pelaksanaan audit internal infrastruktur SPBE (PR-AI-01-02)
		Perlunya Pelaksanaan audit internal keamanan SPBE (PR-AK-03-02) karena pengamanan sistem elektronik pemerintahan perlu dievaluasi secara berkala dari dalam untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan mengidentifikasi potensi risiko sebelum terjadi pelanggaran.	Pelaksanaan audit internal keamanan SPBE (PR-AK-03-02)
		Perlunya Pelaksanaan audit internal keamanan SPBE (PR-AK-03-02) karena pengawasan keamanan sistem masih belum dilakukan secara berkala, sehingga audit internal diperlukan untuk mendeteksi potensi risiko sebelum terjadi pelanggaran serius.	Pelaksanaan audit internal keamanan SPBE (PR-AK-03-02)
		Perlunya Pelaksanaan audit internal keamanan SPBE (PR-AK-03-02) karena pengawasan terhadap sistem SPBE masih terbatas, sehingga audit internal diperlukan untuk mengidentifikasi potensi risiko keamanan sebelum terjadi gangguan.	Pelaksanaan audit internal keamanan SPBE (PR-AK-03-02)
		Perlunya pembentukan komite manajemen risiko karena belum ada mekanisme formal untuk mengidentifikasi dan menangani risiko dalam penerapan SPBE, sehingga potensi kegagalan sistem dan kebocoran data tetap tinggi.	Pembentukan komite manajemen risiko (PR-M-01-01)
		Perlunya Pembentukan tim audit aplikasi SPBE (PR-AA-02-01) karena pengawasan terhadap keamanan aplikasi SPBE masih belum terstruktur, sehingga dibutuhkan tim audit khusus untuk memastikan kepatuhan dan mitigasi risiko keamanan.	Pembentukan tim audit aplikasi SPBE (PR-AA-02-01)
		Perlunya Pembentukan tim audit infrastruktur SPBE (PR-AI-01-01) karena belum ada tim khusus yang bertugas melakukan pengawasan dan evaluasi keamanan infrastruktur digital pemerintahan secara berkala.	Pembentukan tim audit infrastruktur SPBE (PR-AI-01-01)
		Perlunya Pembentukan tim audit keamanan SPBE (PR-AK-03-01) karena saat ini belum ada tim khusus yang bertanggung jawab dalam pengawasan keamanan SPBE,	Pembentukan tim audit keamanan SPBE (PR-AK-03-01)

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (<i>Project/Activities</i>)
		sehingga diperlukan struktur yang jelas untuk memastikan sistem tetap terjaga.	
		Perlunya penetapan konteks risiko SPBE karena belum ada klasifikasi yang jelas terkait risiko yang dapat mempengaruhi implementasi sistem digital pemerintahan, menyebabkan kesulitan dalam mengantisipasi dan menangani potensi masalah.	Penetapan konteks risiko SPBE (PR-M-01-06)
		Perlunya penyusunan rencana penanganan risiko SPBE karena belum ada strategi yang sistematis untuk mengatasi ancaman terhadap sistem digital pemerintah, menyebabkan respons terhadap risiko bersifat reaktif dan tidak terkoordinasi.	Penyusunan rencana penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya (PR-M-01-09)
		Perlunya Perbaikan aplikasi SPBE sesuai rekomendasi hasil audit (PR-AA-02-05) karena implementasi rekomendasi audit sebelumnya belum optimal, sehingga perlu penyempurnaan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi layanan digital pemerintah.	Perbaikan aplikasi SPBE sesuai rekomendasi hasil audit (PR-AA-02-05)
		Perlunya Perbaikan aplikasi SPBE sesuai rekomendasi hasil audit (PR-AA-02-05) karena masih ditemukan kelemahan dalam sistem SPBE yang berpotensi mengganggu layanan dan keamanan data, sehingga perlu dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi audit.	Perbaikan aplikasi SPBE sesuai rekomendasi hasil audit (PR-AA-02-05)
		Perlunya Perbaikan aplikasi SPBE sesuai rekomendasi hasil audit (PR-AA-02-05) karena masih terdapat kelemahan dalam sistem elektronik pemerintah yang dapat menghambat efisiensi layanan dan meningkatkan risiko keamanan data.	Perbaikan aplikasi SPBE sesuai rekomendasi hasil audit (PR-AA-02-05)
		Perlunya Perbaikan aplikasi SPBE sesuai rekomendasi hasil audit (PR-AA-02-05) karena masih terdapat kelemahan dalam sistem SPBE yang belum ditindaklanjuti, sehingga diperlukan perbaikan agar lebih aman dan sesuai standar.	Perbaikan aplikasi SPBE sesuai rekomendasi hasil audit (PR-AA-02-05)
		Perlunya Perbaikan infrastruktur SPBE sesuai rekomendasi hasil audit (PR-AI-01-05) karena audit sebelumnya mengidentifikasi berbagai kerentanan yang memerlukan penyesuaian agar sistem lebih aman dan efisien.	Perbaikan infrastruktur SPBE sesuai rekomendasi hasil audit (PR-AI-01-05)
		Perlunya Perbaikan infrastruktur SPBE sesuai rekomendasi hasil audit (PR-AI-01-05) karena implementasi perbaikan belum sepenuhnya dilakukan, sehingga perlu percepatan agar sistem lebih aman dan andal.	Perbaikan infrastruktur SPBE sesuai rekomendasi hasil audit (PR-AI-01-05)
		Perlunya Perbaikan infrastruktur SPBE sesuai rekomendasi hasil audit (PR-AI-01-05) karena masih ditemukan kerentanan dan ketidaksesuaian dalam infrastruktur SPBE, sehingga perbaikan harus dilakukan agar sistem lebih aman, andal, dan sesuai standar.	Perbaikan infrastruktur SPBE sesuai rekomendasi hasil audit (PR-AI-01-05)
		Perlunya Perbaikan infrastruktur SPBE sesuai rekomendasi hasil audit (PR-AI-01-05) karena masih terdapat kelemahan pada sistem dan	Perbaikan infrastruktur SPBE sesuai rekomendasi hasil audit (PR-AI-01-05)

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Analisis Kesenjangan	Kegiatan (Project/Activities)
		jaringan yang berpotensi mengganggu keamanan serta kelancaran layanan digital pemerintah.	
		Perlunya Perbaikan infrastruktur SPBE sesuai rekomendasi hasil audit (PR-AI-01-05) karena masih terdapat kelemahan teknis pada infrastruktur SPBE yang berpotensi menghambat layanan digital, sehingga diperlukan perbaikan berbasis hasil audit.	Perbaikan infrastruktur SPBE sesuai rekomendasi hasil audit (PR-AI-01-05)
		Perlunya Perbaikan keamanan SPBE sesuai rekomendasi hasil audit (PR-AK-03-05) karena belum semua rekomendasi hasil audit diterapkan, sehingga risiko keamanan informasi tetap tinggi.	Perbaikan keamanan SPBE sesuai rekomendasi hasil audit (PR-AK-03-05)
		Perlunya Perbaikan keamanan SPBE sesuai rekomendasi hasil audit (PR-AK-03-05) karena hasil audit sebelumnya menunjukkan masih adanya kelemahan yang berisiko terhadap sistem, sehingga diperlukan implementasi rekomendasi untuk meningkatkan ketahanan dan keandalan layanan digital pemerintah.	Perbaikan keamanan SPBE sesuai rekomendasi hasil audit (PR-AK-03-05)
		Perlunya Perbaikan keamanan SPBE sesuai rekomendasi hasil audit (PR-AK-03-05) karena masih ditemukan celah keamanan dalam sistem pemerintahan yang berpotensi mengancam integritas dan ketersediaan layanan digital.	Perbaikan keamanan SPBE sesuai rekomendasi hasil audit (PR-AK-03-05)
		Perlunya Perbaikan keamanan SPBE sesuai rekomendasi hasil audit (PR-AK-03-05) karena masih terdapat celah keamanan yang teridentifikasi dalam audit sebelumnya, sehingga diperlukan tindakan korektif untuk mencegah risiko kebocoran data dan gangguan layanan.	Perbaikan keamanan SPBE sesuai rekomendasi hasil audit (PR-AK-03-05)
		Perlunya rencana program manajemen risiko karena upaya mitigasi risiko SPBE masih bersifat reaktif dan tidak terencana dengan baik, sehingga potensi gangguan operasional SPBE tetap tinggi.	Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pelaksanaan manajemen risiko (PR-M-01-04)
		Perlunya sosialisasi dan pelatihan risiko SPBE karena pemahaman aparaturnya terhadap risiko digital masih rendah, menyebabkan lemahnya kesiapan dalam menghadapi ancaman siber dan gangguan operasional sistem.	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi risiko SPBE oleh inspektorat (PR-M-01-05)

Hasil analisis kesenjangan dan inisiatif kegiatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bertujuan untuk menggambarkan kondisi eksisting secara komprehensif. Dengan demikian, setiap rekomendasi atau inisiatif yang diusulkan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil pemerintahan daerah. Inisiatif kegiatan yang dihasilkan merupakan respons terhadap kesenjangan yang telah diidentifikasi dan disusun agar selaras dengan proses bisnis yang ada. Hal ini diharapkan dapat mempercepat implementasi digitalisasi layanan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan Tabel 1.1.1, terlihat bahwa pemetaan proses bisnis masih memerlukan evaluasi dan penyesuaian yang dilakukan secara berkala. Selain itu, beberapa proses bisnis yang

ada saat ini masih belum sepenuhnya sejalan dengan kode referensi SPBE Nasional, terutama pada RAB Level 3. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa evaluasi lintas fungsi terhadap peta proses bisnis, penerapan mindset digitalisasi berbasis simplifikasi dan efisiensi, serta penyesuaian struktur proses bisnis yang mengacu pada referensi nasional melalui penginputan ke dalam SIA SPBE (Sistem Informasi Arsitektur SPBE) versi 2.0.

Sebagai rekomendasi utama, pembaruan dan penyederhanaan proses bisnis menjadi langkah yang harus diutamakan guna menciptakan struktur yang lebih sistematis, efisien, dan sesuai dengan standar nasional. Selain itu, adopsi teknologi digital juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan pemerintahan. Dengan mengatasi kesenjangan yang ada, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo diharapkan dapat mengimplementasikan SPBE secara lebih efektif dan efisien serta meningkatkan kapabilitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Bab II Portofolio Inisiatif Indeks SPBE

2.1. Tata Kelola

2.1.1. Kebijakan Arsitektur SPBE (PR-T-001)

Tabel 2.1.1.1. Program Kerja Kebijakan Arsitektur SPBE

Deskripsi	: Kebijakan Arsitektur SPBE untuk mengatur implementasi Arsitektur SPBE yang memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Layanan SPBE, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, Keamanan SPBE). Kebijakan ini perlu disusun dengan mengacu pada Perpres Nomor 132 Tahun 2022.
Detail	: <ol style="list-style-type: none">1. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Arsitektur SPBE sesuai dengan peraturan pusat/hasil <i>assesment</i> SPBE yang terbaru
Indikator Pencapaian	: <ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Arsitektur SPBE.2. Kebijakan Arsitektur SPBE di-<i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali.3. Melakukan pembaharuan kebijakan Arsitektur SPBE Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2025-2029
Keterangan	: Kebijakan Arsitektur SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 1.

2.1.2. Kebijakan Peta Rencana SPBE (PR-T-002)

Tabel 2.1.2.1. Program Kerja Kebijakan Peta Rencana SPBE

Deskripsi	: Kebijakan Peta Rencana SPBE untuk mengatur implementasi Peta Rencana SPBE yang mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK), Kebijakan ini perlu disusun dengan mengacu pada Perpres Nomor 132 Tahun 2022.
Detail	: <ol style="list-style-type: none">1. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Peta Rencana SPBE sesuai dengan peraturan pusat/hasil <i>assesment</i> SPBE yang terbaru
Indikator Pencapaian	: <ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Peta Rencana SPBE.2. Kebijakan Peta Rencana SPBE di-<i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali.3. Melakukan pembaharuan kebijakan Peta Rencana SPBE Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	: Dinas Komunikasi dan Informatika

Tahun Pelaksanaan	2025-2029
Keterangan	: Kebijakan Peta Rencana SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 2.

2.1.3. Kebijakan Manajemen Data (PR-T-003)

Tabel 2.1.3.1. Program Kerja Kebijakan Manajemen Data

Deskripsi	: Kebijakan Manajemen Data untuk mengatur implementasi Manajemen Data yang telah mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data. Kebijakan ini perlu disusun dengan mengacu pada Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan Permen PPN/Bappenas Nomor 16 Tahun 2020
Detail	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Manajemen Data sesuai dengan peraturan pusat/hasil assesment SPBE yang terbaru
Indikator Pencapaian	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Manajemen Data. 2. Kebijakan Manajemen Data dievaluasi secara berkala minimal 1 tahun sekali. 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Manajemen Data Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2025-2029
Keterangan	: Kebijakan Manajemen Data SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 3.

2.1.4. Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE (PR-T-004)

Tabel 2.1.4.1. Program Kerja Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE

Deskripsi	: Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE untuk mengatur proses konsultasi terkait siklus Pembangunan dan mengatur standarisasi pengembangan Aplikasi SPBE dengan unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK.
Detail	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE
Indikator Pencapaian	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE. 2. Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE dievaluasi secara berkala minimal 1 tahun sekali. 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE Ketika ada

	perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2025-2029
Keterangan	: Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 4.

2.1.5. Kebijakan Pusat Data (PR-T-005)

Tabel 2.1.5.1. Program Kerja Kebijakan Pusat Data

Deskripsi	: Kebijakan Pusat Data untuk mengatur Layanan Pusat Data untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah Daerah.
Detail	: 1. Reviu dan Tindak Lanjut Pengelolaan Pusat Data
Indikator Pencapaian	: 1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Pusat Data. 2. Kebijakan Pusat Data dievaluasi secara berkala minimal 1 tahun sekali. 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Pusat Data Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2025-2029
Keterangan	: Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 5.

2.1.6. Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (PR-T-006)

Tabel 2.1.6.1. Program Kerja Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Deskripsi	: Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah untuk mengatur Layanan Jaringan Intra untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah Daerah.
Detail	: 1. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah
Indikator Pencapaian	: 1. Tersedianya Kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah. 2. Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah di-evaluasi secara berkala minimal 1 tahun sekali. 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	: Dinas Komunikasi dan Informatika

Tahun Pelaksanaan	2025-2029
Keterangan	: Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 6.

2.1.7. Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat (PR-T-007)

Tabel 2.1.7.1. Program Kerja Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat

Deskripsi	: Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat untuk mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah Daerah.
Detail	: 1. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat
Indikator Pencapaian	: 1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat 2. Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat di- <i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat
Pelaksana	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2025-2029
Keterangan	: Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 7.

2.1.8. Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi (PR-T-008)

Tabel 2.1.8.1. Program Kerja Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

Deskripsi	: Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi untuk mengatur seluruh cakupan Manajemen Keamanan Informasi secara lengkap (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi). Kebijakan ini perlu disusun dengan mengacu pada Perban BSSN Nomor 04 Tahun 2021.
Detail	: 1. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi 2. Uji kewanaman secara berkala sesuai kebutuhan

Indikator Pencapaian	: 1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi. 2. Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi di- <i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali. 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2025-2029
Keterangan	: Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 8.

2.1.9. Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (PR-T-009)

Tabel 2.1.9.1. Program Kerja Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Deskripsi	: Program Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mengatur pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).
Detail	: 1. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator Pencapaian	: 1. Tersedianya Kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi. 2. Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi di- <i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali. 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2025-2029
Keterangan	: Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 9.

2.1.10. Kebijakan Tim Koordinasi (PR-T-010)

Tabel 2.1.10.1. Program Kerja Kebijakan Tim koordinasi SPBE

Deskripsi	: Kebijakan Tim Koordinasi SPBE untuk mengatur implementasi Tim Koordinasi SPBE yang mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah. Kebijakan ini perlu disusun dengan mengacu pada KepmenpanRB Nomor 962 Tahun 2021
-----------	--

Detail	: 1. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Tim Koordinasi SPBE.
Indikator Pencapaian	: 1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Tim Koordinasi SPBE. 2. Melakukan pembaharuan kebijakan Tim Koordinasi SPBE Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	: Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Tahun Pelaksanaan	: 2025-2029
Keterangan	: Kebijakan Tim Koordinasi SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 10.

2.1.11. Pembentukan Komite/Forum SPBE (PR-T-011)

Tabel 2.1.11.1. Program Kerja Pembentukan Komite/Forum SPBE

Deskripsi	: Membentuk Komite/Forum manajemen SPBE, sejauh ini sesuai arahan dari Kemenpan-RB perlu membentuk Tim Koordinasi SPBE, Komite/Forum Manajemen Data, Komite/Forum Manajemen Risiko dari ketiga hal tersebut yang belum dibentuk yakni Komite/Forum Manajemen Risiko
Detail	: Membentuk Komite/Forum Manajemen SPBE yang mengacu pada pedoman nasional tentang manajemen SPBE
Indikator Pencapaian	: 1. Penyusunan dan Evaluasi Perwal / SK Tim Koordinasi SPBE 2. Penyusunan dan Evaluasi Perwal / SK Komite Forum Satu Data 3. Penyusunan dan Evaluasi Perwal / SK Komite Manajemen Risiko 4. Penyusunan dan Evaluasi Perwal / SK Komite Manajemen Perubahan 5. Penyusunan dan Evaluasi Perwal / SK Komite Manajemen Pengetahuan 6. Penyusunan dan Evaluasi Perwal / SK Pokja Manajemen Layanan 7. Penyusunan dan Evaluasi Perwal / SK Pokja Manajemen Keamanan Informasi
Pelaksana	: Tim Koordinasi SPBE
Tahun Pelaksanaan	: 2025
Keterangan	: Secara rutin perlu mengikuti bimtek dan sosialisasi dari Kemenpan-RB guna memastikan Tata Kelola SPBE selalu mengikuti perkembangan arahan dari Instansi Pusat terkait.

2.1.12. Kolaborasi Penerapan SPBE (PR-T-012)

Tabel 2.1.12.1. Program Kerja Kolaborasi Penerapan SPBE

Deskripsi	:	Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat berarti kerjasama antara pemerintah dan berbagai pihak lainnya untuk menerapkan sistem ini secara efektif dan efisien.
Detail	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kolaborasi penerapan RB tematik digitalisasi / SPBE2. Evaluasi pelaksanaan penerapan RB tematik digitalisasi / Indeks SPBE Internal3. Kolaborasi dengan pihak terkait untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik
Indikator Pencapaian	:	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi layanan publik, mempercepat akses masyarakat terhadap layanan publik, dan meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan data pemerintah. penerapan SPBE juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Pelaksana	:	Tim Koordinasi SPBE
Tahun Pelaksanaan	:	2025-2029
Keterangan	:	Kolaborasi bisa dilakukan melalui kerjasama dengan Instansi Pemerintah lain, Perguruan Tinggi, Swasta dan Masyarakat. Kolaborasi SPBE dilakukan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 20.

2.1.13. Evaluasi dan Revisi Tata Kelola SPBE (PR-T-013)

Tabel 2.1.13.1. Program Kerja Evaluasi dan Revisi Tata Kelola SPBE

Deskripsi	: Evaluasi dan Revisi Tata Kelola SPBE secara berkala mengikuti pedoman SPBE dari Instansi Pusat terkait.
Detail	: Adapun evaluasi dan revisi tata Kelola SPBE dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dan Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Adanya Evaluasi dan Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Setiap Tahunnya sesuai dengan kebijakan pusat. 2. Monitoring dan Evaluasi Rencana Anggaran TIK Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran TIK pada setiap perangkat daerah 3. Evaluasi dan Revisi Prose Bisnis Pemerintah Daerah Evaluasi Proses Bisnis yang sesuai dengan tupoksi utama pada perangkat daerah 4. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Aplikasi Pemerintah Daerah Mempunyai Standar Pengembangan Aplikasi Agar bisa di dikelola dengan mudah oleh pemerintah daerah 5. Monitoring dan Evaluasi Tim Koordinasi SPBE Adapun usulan jadwal program kerja Tim Koordinasi Pemerintah selama setahun dijelaskan pada lampiran 1. 6. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan ke koordinator SPBE untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan
Indikator Pencapaian	: Adanya Evaluasi Terkait Tata Kelola SPBE
Pelaksana	: Tim Koordinasi SPBE
Tahun Pelaksanaan	: 2025-2029
Keterangan	: Secara rutin perlu mengikuti bimtek dan sosialisasi dari Kemenpan-RB guna memastikan Tata Kelola SPBE selalu mengikuti perkembangan arahan dari Instansi Pusat terkait.

2.2. Manajemen SPBE

2.2.1. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko (PR-M-001)

Tabel 2.2.1.1. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko

Deskripsi	: Manajemen risiko sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah proses identifikasi, penilaian, pengendalian, dan pemantauan risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada instansi pemerintah, Pedoman yang dapat mengacu pada Permenpan-RB 05/2020.
Spesifikasi	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan komite manajemen risiko 2. Penyusunan dan penetapan kebijakan manajemen risiko SPBE 3. Penyusunan pedoman manajemen risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko

	<p>SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE, budaya risiko SPBE</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pelaksanaan manajemen risiko 5. Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi risiko SPBE oleh inspektorat 6. Penetapan konteks risiko SPBE 7. Penyusunan identifikasi risiko SPBE dengan menguraikan jenis risiko SPBE, penyebab, kategori, dampak, dan area dampak 8. Penyusunan analisis risiko SPBE dengan menguraikan kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan seta level risiko SPBE & penyusunan evaluasi risiko SPBE 9. Penyusunan rencana penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya 10. Penyusunan laporan evaluasi manajemen risiko SPBE secara periodik dan insidental
Indikator Pencapaian	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Komite Manajemen Risiko SPBE. 2. SOP Manajemen Risiko SPBE. 3. Penerapan Manajemen Risiko SPBE. 4. Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko SPBE
Pelaksana	<p>:</p> <p>Inspektorat</p>
Tahun Pelaksanaan	<p>2025-2029</p>
Keterangan	<p>:</p> <p>Dalam penyusunan Manajemen Risiko SPBE mengikuti arahan kebijakan terkait Manajemen SPBE yang berlaku seperti (Permenpan-RB 05/2020)</p> <p>Manajemen Risiko SPBE diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 21.</p>

2.2.2. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi (PR-M-002)

Tabel 2.2.2.1. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi

Deskripsi	<p>:</p> <p>Manajemen keamanan informasi dalam SPBE bertujuan untuk melindungi informasi pemerintahan yang sensitif dan penting dari serangan siber, kebocoran data, atau penggunaan yang tidak sah. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko keamanan informasi yang mungkin timbul dalam operasi SPBE. Manajemen Keamanan Informasi penetapan ruang lingkup meliputi: Data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE di setiap Perangkat Daerah.</p>
Spesifikasi	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat postingan keamanan informasi pada media informasi 2. Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE 3. Evaluasi dan perbaikan manajemen keamanan informasi
Indikator Pencapaian	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Audit Keamanan SPBE 2. SOP Keamanan Informasi

Pelaksana	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan		2025-2029
Keterangan	:	Pada penyusunan Manajemen Keamanan Informasi mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku. Manajemen Keamanan Informasi SPBE diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 22.

2.2.3. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Data (PR-M-003)

Tabel 2.2.3.1. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Data

Deskripsi	:	Manajemen data dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sangat penting untuk memastikan informasi yang dihasilkan dan digunakan oleh pemerintah memiliki kualitas yang baik, dapat dipercaya, dan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
Spesifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim satu data 2. Penyusunan pedoman manajemen data 3. Pembaharuan arsitektur data 4. Pengumpulan data sektoral di masing-masing unit kerja 5. Pemeriksaan pemenuhan data sektoral 6. Penyebarluasan data sektoral 7. Pembaruan data sektoral secara berkala 8. Penyimpanan data pada portal open data 9. Penjaminan kualitas data meliputi daftar data, data prioritas, dan jadwal pemutakhiran data
Indikator Pencapaian	:	Penerapan Manajemen Data
Pelaksana	:	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
Tahun Pelaksanaan		2025-2029
Keterangan	:	Dalam penyusunan Manajemen Data mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku seperti (Permen PPN/ Bappenas 16/2020). Manajemen Data SPBE diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 23.

2.2.4. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Aset TIK (PR-M-004)

Tabel 2.2.4. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Aset TIK

Deskripsi	:	Manajemen aset dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah proses pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki oleh pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan layanan publik secara efektif dan efisien. Aset TIK meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, dan infrastruktur pendukung lainnya yang digunakan untuk mendukung operasi dan layanan publik. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
Spesifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginventarisasi aset SPBE (aplikasi dan infrastruktur) 2. Penyusunan SOP perencanaan aset TIK 3. Penyusunan SOP pengadaan aset TIK 4. Penyusunan SOP atas penghapusan aset TIK 5. Evaluasi dan perbaikan manajemen aset TIK
Indikator Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Manajemen Aset TIK 2. Evaluasi Penerapan Manajemen Aset TIK
Pelaksana	:	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Pelaksanaan	:	2025-2029
Keterangan	:	<p>Pada penyusunan Manajemen Aset TIK SPBE mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku.</p> <p>Manajemen Aset TIK diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 24.</p>

2.2.5. Penyusunan dan Penerapan Manajemen SDM TIK (PR-M-005)

Tabel 2.2.5.1. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen SDM

Deskripsi	:	Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia) dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pemerintahan yang ada. Manajemen SDM TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan SDM dalam SPBE.
Spesifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan SDM TIK (Project Manager, System Analyst, Data Scientist/Engineer, UI/UX Designer, Front-End Web Developer, Front-End Mobile Developer, Back-End Developer, Network Engineer, DevOps, Security Analyst, Application Support) 2. Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan TIK 3. Analisis kebutuhan pelatihan bagi SDM TIK 4. Pelatihan SDM TIK 5. Evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM TIK

Indikator Pencapaian	:	Penerapan Manajemen SDM TIK																																				
Pelaksana	:	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan																																				
Tahun Pelaksanaan	:	2025-2029																																				
Keterangan	:	<p>Dalam penyusunan Manajemen SDM TIK mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku.</p> <p>Manajemen SDM TIK diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 25.</p> <p>Penyelenggaraan Training SDM SPBE diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 25.</p> <p>Penguatan SDM merupakan prasyarat utama keberhasilan SPBE. Peningkatan kompetensi SDM TIK difokuskan pada penguasaan aspek teknis, manajemen layanan TIK, keamanan informasi, integrasi sistem, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi melalui pelatihan, sertifikasi, dan mekanisme berbagi pengetahuan.</p> <p>Peningkatan kompetensi SDM Non-TIK diarahkan pada penguatan literasi digital, pemanfaatan aplikasi SPBE, serta pemahaman dasar keamanan informasi guna mendukung efektivitas proses kerja berbasis elektronik.</p> <p>Sejalan dengan pengembangan kompetensi, diperlukan dorongan perubahan budaya kerja digital yang menekankan pemanfaatan sistem elektronik, kolaborasi lintas perangkat daerah, pengambilan keputusan berbasis data, serta peningkatan kesadaran keamanan informasi. Upaya ini didukung melalui kebijakan internal, penguatan komitmen pimpinan, dan evaluasi kinerja. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan SPBE secara berkelanjutan.</p>																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Domain</th> <th>Jenis Pelatihan</th> <th>Peran</th> <th>Tingkat Jabatan</th> <th>Waktu Pelaksanaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tata Kelola & Manajemen SPBE</td> <td><i>Project Management Professional</i></td> <td><i>Project Manager</i></td> <td>Ahli muda / ahli pertama</td> <td>Menyesuaikan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>COBIT 2019</td> <td><i>Project Manager & Enterprise Architect</i></td> <td>Ahli muda / ahli pertama</td> <td>Menyesuaikan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Manajemen SPBE meliputi : - Manajemen risiko SPBE - Manajemen keamanan informasi SPBE - Manajemen data - Manajemen SDM TIK - Manajemen aset TIK - Manajemen pengetahuan - Manajemen perubahan - Manajemen layanan</td> <td>Umum</td> <td>Ahli muda / ahli pertama</td> <td>Menyesuaikan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Peta Proses Bisnis dengan BPMN</td> <td><i>Enterprise Architect & System Analyst</i></td> <td>Ahli muda / ahli pertama</td> <td>Menyesuaikan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Transformasi Digital Framework</td> <td><i>Enterprise Architect</i></td> <td>Ahli muda / ahli pertama</td> <td>Menyesuaikan</td> </tr> </tbody> </table>	#	Domain	Jenis Pelatihan	Peran	Tingkat Jabatan	Waktu Pelaksanaan	1	Tata Kelola & Manajemen SPBE	<i>Project Management Professional</i>	<i>Project Manager</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan			COBIT 2019	<i>Project Manager & Enterprise Architect</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan			Manajemen SPBE meliputi : - Manajemen risiko SPBE - Manajemen keamanan informasi SPBE - Manajemen data - Manajemen SDM TIK - Manajemen aset TIK - Manajemen pengetahuan - Manajemen perubahan - Manajemen layanan	Umum	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan			Peta Proses Bisnis dengan BPMN	<i>Enterprise Architect & System Analyst</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan			Transformasi Digital Framework	<i>Enterprise Architect</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan
#	Domain	Jenis Pelatihan	Peran	Tingkat Jabatan	Waktu Pelaksanaan																																	
1	Tata Kelola & Manajemen SPBE	<i>Project Management Professional</i>	<i>Project Manager</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan																																	
		COBIT 2019	<i>Project Manager & Enterprise Architect</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan																																	
		Manajemen SPBE meliputi : - Manajemen risiko SPBE - Manajemen keamanan informasi SPBE - Manajemen data - Manajemen SDM TIK - Manajemen aset TIK - Manajemen pengetahuan - Manajemen perubahan - Manajemen layanan	Umum	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan																																	
		Peta Proses Bisnis dengan BPMN	<i>Enterprise Architect & System Analyst</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan																																	
		Transformasi Digital Framework	<i>Enterprise Architect</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan																																	

			& System Analyst		
		<i>Enterprise Architecture Foundation (TOGAF)</i>	<i>Enterprise Architect & System Analyst</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan
		<i>Enterprise Architecture Advanced (TOGAF)</i>	<i>Enterprise Architect & System Analyst</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan
		<i>Scrum Master</i>	<i>Enterprise Architect & System Analyst</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan
2	Data	<i>Data Management With DMBOK</i>	<i>Data Scientist</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan
		<i>Database Administrator (MCDBA)</i>	<i>Programmer</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan
		Teknik Visualisasi Data dengan <i>Business Intelligence</i>	<i>Data Scientist</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan
		Pemrograman untuk Pengolahan Data dengan <i>Python & R Programming</i>	<i>Data Scientist</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan
		<i>Data Analytic With Machine Learning</i>	<i>Data Scientist</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan
		<i>Big Data Analytic In Practice</i>	<i>Data Scientist</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan
3	Aplikasi	<i>Backend Web API Programming</i>	<i>Programmer</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan
		<i>Frontend Web Development</i>	<i>Programmer</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan
		<i>Mobile Frontend With PWA</i>	<i>Programmer</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan
		<i>Back-end Web Programming With Laravel</i>	<i>Programmer</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan
		<i>Front-end Web Development With Vue JS</i>	<i>Programmer</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan
		<i>Android Secure Programming</i>	<i>Programmer</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan
		<i>Mobile Programming With Flutter</i>	<i>Programmer</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan
		<i>IT Service Management</i>	<i>Application Support</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan
		<i>IT Quality Assurance</i>	<i>Application Support</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan
		<i>Software Testing Implementation</i>	<i>Application Support</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan
		<i>Software Testing Plan</i>	<i>Application Support</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan
4	Layanan	<i>IT Service Management</i>	<i>Enterprise Architect</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan
		Pengelolaan Layanan Operasional Pusat Data	<i>Network Engineer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
5	Infrastruktur	<i>Network Security with</i>	<i>Network</i>	ahli muda	Menyesuaikan

		<i>Mikrotik</i>	<i>Engineer</i>		
		<i>Traffic Management with Mikrotik</i>	<i>Network Engineer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Linux Fundamental</i>	<i>Network Engineer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Linux Network Services</i>	<i>Network Engineer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>DevOps Introduction & Docker</i>	<i>Network Engineer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Docker Administration With Kubernetes</i>	<i>Network Engineer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Microservices In Development</i>	<i>Network Engineer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Pengelolaan Layanan Operasional Pusat Data</i>	<i>Network Engineer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Penetration Testing Method</i>	<i>Application Support</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>CompTIA ITF</i>	Teknisi IT	ahli muda	Menyesuaikan
6	Keamanan Informasi	<i>Ethical Hacking (CECH)</i>	<i>Auditor</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan
		<i>IT Auditor Fundamental</i>	<i>Auditor</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan
		<i>ISO 31000 (IT Risk And Controls)</i>	<i>Auditor</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan
		<i>ISO 27001 (Information Security Management)</i>	<i>Auditor</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan
		<i>Certified Information System Auditor</i>	<i>Auditor</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan
7	Komunikasi Publik	<i>Etika Komunikasi / Public Speaking</i>	<i>Digital Media Specialist</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan
		<i>Teknik Penulisan Artikel (Storytelling)</i>	<i>Digital Media Specialist</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan
		<i>Teknik Fotografi dan Videografi</i>	<i>Digital Media Specialist</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan
		<i>Teknik Publikasi Social Media</i>	<i>Digital Media Specialist</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan
		<i>Search Engine Optimization</i>	<i>Digital Media Specialist</i>	Ahli muda / ahli pertama	Menyesuaikan

2.2.6. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Pengetahuan (PR-M-006)

Tabel 2.2.6.1. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Pengetahuan

Deskripsi	:	Manajemen Pengetahuan yaitu pengelolaan informasi dan pengetahuan dalam sebuah sistem pemerintahan yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya adalah untuk menjaga dan mempertahankan pengetahuan yang telah didapatkan dari pengalaman operasional instansi pemerintahan.
Spesifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan komite manajemen pengetahuan 2. Penyusunan pedoman manajemen pengetahuan (kebijakan dan SOP) 3. Pelaksanaan manajemen pengetahuan dengan aplikasi 4. Evaluasi dan perbaikan manajemen pengetahuan

Indikator Pencapaian	: 1. Penerapan Manajemen Pengetahuan 2. Aplikasi <i>Knowledge Management System</i> (SIMPAN-SPBE) digunakan secara optimal.
Pelaksana	: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Tahun Pelaksanaan	: 2025-2029
Keterangan	: Dalam penyusunan Manajemen Pengetahuan mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku seperti (Peraturan BRIN No 2 Tahun 2024) Manajemen Pengetahuan SPBE diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 26.

2.2.7. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Perubahan (PR-M-007)

Tabel 2.2.7.1. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Perubahan

Deskripsi	: Manajemen Perubahan yaitu pendekatan siklus, dan sistematis pada transisi organisasi, program, dan kegiatan dari keadaan saat ini ke keadaan masa depan dengan target manfaat perubahan yang diharapkan.
Spesifikasi	: 1. Pembentukan komite manajemen perubahan 2. Penyusunan pedoman / SOP manajemen perubahan SPBE 3. Penyusunan form log manajemen perubahan 4. Pelaksanaan manajemen perubahan SPBE 5. Evaluasi dan perbaikan manajemen perubahan
Indikator Pencapaian	: 1. Penerapan Manajemen Perubahan. 2. Evaluasi Penerapan Manajemen Perubahan.
Pelaksana	: Bagian Organisasi
Tahun Pelaksanaan	: 2025-2029
Keterangan	: Dalam penyusunan Manajemen Perubahan mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku. Manajemen Perubahan SPBE diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 27.

2.2.8. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Layanan TIK (PR-M-008)

Tabel 2.2.8.1. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Layanan TIK

Deskripsi	: Manajemen Layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas.
Spesifikasi	: 1. Pemetaan kondisi terkini penyelenggaraan manajemen layanan di Lingkungan

	<p>Pemerintah Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> Perumusan cakupan Manajemen Layanan sesuai dengan cakupan yang dimandatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE pasal 54. Verifikasi data dan informasi eksisting pelaksanaan manajemen layanan di Pemerintah Daerah Analisis kebutuhan proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE sesuai dengan ruang lingkup pada peraturan yang berlaku. Analisis penyelenggara, kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) serta Peningkatan Kompetensi SPBE. Penyusunan pedoman manajemen layanan sesuai dengan cakupan yang dimandatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE pasal 54.
Indikator Pencapaian	<p>: Indikator keberhasilan manajemen layanan TIK meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepuasan Pengguna Layanan TIK Ketersediaan Layanan Setiap Saat Efisiensi Penggunaan Layanan Keamanan Data Pengguna Layanan
Pelaksana	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2025-2029
Keterangan	<p>: Dalam penyusunan Manajemen Layanan mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku.</p> <p>Manajemen Layanan SPBE diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 28.</p>

2.3. Layanan SPBE

2.3.1. Pengembangan Layanan RB Tematik (PR-L-001)

Tabel 2.3.3.1. Program Kerja Pengembangan Layanan RB Tematik

Deskripsi	: Pengembangan layanan Reformasi Birokrasi (RB) tematik pada pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Pendekatan tematik ini menekankan pada penanganan isu-isu spesifik yang menjadi prioritas, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan Investasi, dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan dan program yang ada, dan juga bertujuan dalam percepatan dan keberlanjutan bagi transformasi digital pemerintahan terkait RB Tematik
Spesifikasi	: <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi Isu Tematik: Menentukan isu-isu spesifik yang menjadi fokus, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan Investasi.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Perencanaan dan Implementasi: Membuat rencana strategis dan tindakan konkret untuk mengatasi isu-isu tersebut, termasuk penetapan tujuan, indikator kinerja, dan timeline. 3. Pelatihan dan Pengembangan SDM: Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN (Aparatur Sipil Negara)) melalui pelatihan dan pengembangan profesional. 4. Penggunaan Teknologi Informasi: Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat dan mempermudah proses layanan, seperti e-governance dan digitalisasi dokumen. 5. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program untuk memastikan tercapainya tujuan yang ditetapkan.
Detail	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Layanan Kemiskinan 2. Pengembangan Layanan Pendidikan 3. Pengembangan Layanan Kesehatan 4. Pengembangan Layanan Investasi
Fitur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dashboard Pemantauan Layanan RB Tematik 2. Sistem Pengaduan atau Komunikasi antara Pemilik Layanan (Pemerintah Daerah) dan Pengguna Layanan 3. Portal Informasi Terpadu
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat semakin berkualitas, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan. 2. Efisiensi dan Efektivitas: Mengurangi birokrasi yang tidak perlu dan mempercepat proses administrasi. 3. Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan keterbukaan dalam pemerintahan dan akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran dan sumber daya. 4. Inovasi Pelayanan: Mengembangkan metode dan teknologi baru untuk meningkatkan pelayanan publik.
Pelaksana	Perangkat Daerah Terkait Layanan RB Tematik
Tahun Pelaksanaan	2025-2027
Keterangan	<p>Tantangan dalam Pengembangan Layanan RB Tematik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Resistensi terhadap Perubahan: Adanya hambatan dari pihak-pihak yang kurang mendukung perubahan. 2. Sumber Daya Terbatas: Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten. 3. Koordinasi Antar Lembaga: Tantangan dalam menyelaraskan kebijakan dan program antar berbagai lembaga pemerintah..

2.3.2. Pengembangan Layanan Prioritas SPBE (PR-L-002)

Tabel 2.3.2.1. Program Kerja Pengembangan Layanan Prioritas SPBE

Deskripsi	: Terkait Pengembangan Layanan Prioritas harus sejalan dengan Perpres 82 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Indonesia, dimana pemerintah pusat berfokus pada 9 Layanan Prioritas yang bertujuan untuk mewujudkan Percepatan dan Keberlanjutan Transformasi Digital Pemerintah Indonesia.
Spesifikasi	: Layanan yang menjadi prioritas Pusat antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur Publik Digital (DPI) <ol style="list-style-type: none"> a. Identitas Digital Dasar b. Platform Pertukaran Data c. Pembayaran Digital 2. Portal Layanan Publik <ol style="list-style-type: none"> a. Portal Layanan Publik b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah c. SSO (Single Sign On) d. Pusat Data Nasional 3. Portal Administrasi Pemerintah 4. Layanan Publik Terintegrasi <ol style="list-style-type: none"> a. SIM Online b. Bantuan Sosial c. Kesehatan d. Pendidikan
Detail	: <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas; b. pembangunan dan/ atau pengembangan Aplikasi SPBE Prioritas; c. pengintegrasian Aplikasi SPBE Prioritas; d. pengoperasian Aplikasi SPBE Prioritas; e. keamanan Aplikasi SPBE Prioritas; f. distribusi dan/atau diseminasi Aplikasi SPBE Prioritas; g. pemeliharaan Aplikasi SPBE Prioritas; dan/ atau h. pengelolaan Infrastruktur SPBE yang mendukung Aplikasi SPBE Prioritas.
Fitur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Single Sign-On (SSO), yang memungkinkan pengguna mengakses berbagai aplikasi dengan satu set kredensial 2. API untuk memfasilitasi komunikasi dan pertukaran data antara sistem yang berbeda; 3. Data Synchronization, yang menjaga konsistensi data di seluruh aplikasi dengan memastikan data diperbarui secara otomatis di semua sistem terkait
Indikator Pencapaian	: Dalam Percepatan Transformasi Digital dengan Pengembangan Portal Aplikasi ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatukan Layanan menjadi 1 Portal Layanan Publik dan 1 Portal Layanan Administrasi Pemerintah

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Percepatan Pembangunan Layanan dan Sistem Digital Prioritas 3. Memperkuat Tim Transformasi Digital 4. Fokus pada kemudahan pengguna layanan
Pelaksana	: Seluruh Perangkat Daerah Terkait Layanan SPBE Prioritas
Tahun Pelaksanaan	2025-2027
Keterangan	<p>: Tantangan dalam Pengembangan Layanan Prioritas SPBE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur Teknologi: Memerlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur TI dan jaringan. 2. Keamanan dan Privasi: Menjaga keamanan data dan privasi pengguna menjadi prioritas utama. 3. Sumber Daya Manusia: Membutuhkan tenaga ahli dalam bidang TI dan manajemen proyek. 4. Resistensi terhadap Perubahan: Menghadapi resistensi dari pihak-pihak yang kurang mendukung perubahan menuju sistem elektronik. 5. Regulasi dan Kebijakan: Memerlukan pembaruan regulasi dan kebijakan yang mendukung implementasi SPBE.

2.3.3. Pengembangan Portal Layanan Terintegrasi (PR-L-003)

Tabel 2.3.3.1. Program Kerja Pengembangan Portal Layanan Terintegrasi

Deskripsi	: Aplikasi Portal Layanan Terintegrasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik dalam satu platform dan juga bertujuan dalam percepatan dan keberlanjutan bagi transformasi digital pemerintahan di layanan publik dan Layanan Internal pemerintah.
Spesifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Sistem Informasi Layanan Publik dan Layanan Pemerintah Internal di setiap Perangkat Daerah 2. Penyusunan Konsep Desain Integrasi Portal Layanan 3. Proses Konsolidasi dan Integrasi Portal Layanan 4. Evaluasi Portal Layanan Terintegrasi
Detail	<p>: Platform : Web Mobile</p> <p>Technology : LDAP, Keycloak untuk Single Sign On</p>

Fitur

#	Layanan	Sub Layanan	Aplikasi
	Layanan Publik		
1	Administrasi Kependudukan	Pembuatan KTP-el Kartu Keluarga Akta Kelahiran Akta Kematian Surat Pindah Domisili Statistik Kependudukan	- - - - - DWH
2	Perizinan & Non Perizinan	PBG (IMB) RBA Non RBA Pelayanan Perizinan Mall Pelayanan Publik	SIMBG OSS RBA SIPERI - MPP DIGITAL
3	Pajak Daerah & Retribusi	PBB BPHTB Pajak Daerah Lainnya Retribusi Daerah	SIMPBB e-BPHTB e-Tax OTM
4	Kesehatan Masyarakat	Pendaftaran BPJS Jadwal Dokter Layanan Pasien	Mobile JKN SIMKES SIMKES
5	Pendidikan & Beasiswa	Pendaftaran Sekolah Beasiswa Daerah Sertifikat Pendidikan Non Formal	SPMB PIP -
6	Ketenagakerjaan	Kartu Kuning AK1 Pendaftaran Job Fair Portal Pelatihan Ketenagakerjaan	Bursa Kerja Kulon Progo Bursa Kerja Kulon Progo -
7	UMKM	Fasilitasi UMKM Sertifikasi Profesi	- -
8	Sosial & Bantuan Masyarakat	PKH Bantuan Sembako Bantuan Disabilitas Bantuan Kemiskinan	SIKS-NG - - -
9	Pengaduan & Aspirasi Masyarakat	Pengaduan Umum Pengaduan Daerah	SP4N Lapor LaporBup LaporGub!
10	Transportasi & Perhubungan	CCTV Online Uji KIR	- SIAPPIKE POL
11	Layanan Hukum	Konsultasi Hukum Gratis	-
12	Investasi & Ekonomi Daerah	Portal Investasi Katalog Produk UMKM Fasilitasi Investor	- - -
13	Dashboard Kinerja Daerah	Dashboard RPJMD Dashboard Anggaran Capaian Smart City	- - Smart City Layanan
14	Open Data & Satu Data Daerah	Dataset Statistik Terbuka Dataset Geospasial	Satu Data Kulon Progo -
15	AI Chatbot & Asisten Digital	Chatbot Layanan Publik Chatbot Pengaduan Masyarakat	- -
16	Layanan Aplikasi Mobile Pemerintah	QRIS Daerah e-Signature Daerah	- SITEKTONIK

17	Layanan Informasi Daerah	Berita dan Informasi	Website Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo
		PPID	PPID Kabupaten Kulon Progo
		SKM	Survey Kabupaten Kulon Progo
Layanan Administrasi Pemerintahan			
1	Administrasi Persuratan & Arsip	Arsip Statis	SIKN JIKN
		Manajemen Surat Masuk/Keluar	SRIKANDI
2	Administrasi Kepegawaian	Kinerja Pegawai	e-Kinerja
		Presensi	e-Presence
		Kompetensi ASN (Aparatur Sipil Negara)	Si Jari AKPK
		KGB	SIMPEG
3	Pengelolaan Keuangan & Anggaran	Cuti Online	SIMPEG
		Penganggaran	SIPD
4	Perencanaan & Evaluasi		SIKD
		Penatausahaan	SIPD
		Perencanaan	SIPD
5	Evaluasi Kelembagaan	Monitoring & Evaluasi Pembangunan	e-Rembug
		Akuntabilitas Kinerja	ESR Menpan
6	Pengadaan Barang & Jasa	e-Procurement (LPSE)	SPSE Kabupaten Kulon Progo
		e-Catalog Daerah	INAPROC
7	Pengelolaan Aset & Inventaris	Perencanaan Aset	-
		Inventarisasi Aset	e-BMD
8	Layanan TIK & Keamanan Informasi	Helpdesk TIK Internal	-
		Pengajuan VPN, VPS, Email	-
9	Pengelolaan Data & Statistik	Satu Data Internal	Satu Data Kulon Progo
		Portal Statistik OPD	Satu Data Kulon Progo
		Data Warehouse	-
10	Kolaborasi & Knowledge Management	Portal Knowledge Sharing	-
		Forum Diskusi Internal	-
		e-Library	Perpusda
11	Layanan Hukum & Regulasi		Digido
		Portal SOP, SK, Perda, Perbup Internal	JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Waskito Jateng Elegan
		Konsultasi Hukum OPD	-
12	Inovasi & Smart Office	Dashboard Kinerja Pegawai	-
		Portal Inovasi Daerah	-
13	Layanan Pengaduan & Permintaan Internal	Ticketing Helpdesk Internal	-
		Permintaan Logistik	-
		Permintaan Perbaikan Fasilitas	-

Indikator Pencapaian

: Terimplementasikannya portal layanan publik dan Portal Layanan Pemerintah Daerah yang saling terintegrasi

Pelaksana	:	Dinas Komunikasi dan Informatika serta Perangkat Daerah Terkait
Tahun Pelaksanaan		2025-2029
Keterangan	:	Perlu membuat dokumentasi API untuk seluruh aplikasi layanan publik maupun layanan internal pemerintah Daerah dan menjadikan API Kependudukan dan API Kepegawaian sebagai primary key di seluruh aplikasi layanan yang ada.

2.3.4. Pengembangan *Platform Helpdesk* TIK (PR-L-004)

Tabel 2.3.4.1. Program Kerja Pengembangan *Platform Helpdesk* TIK

Deskripsi	Semakin berkembangnya layanan Diskominfo kepada perangkat daerah/UPT (Unit Pelaksana Teknis) perlu didukung layanan bantuan penanganan masalah secara cepat, tepat, dan terdokumentasi. Untuk melaksanakan layanan penanganan masalah diperlukan tata kelola dan alat bantu (<i>tools</i>).
Spesifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Tata Kelola Layanan Penanganan Masalah (<i>Helpdesk</i>) TIK - <i>Tools</i> atau aplikasi pendukung untuk pencatatan dan sebagai manajemen pengetahuan (<i>knowledge management</i>) - Petugas <i>helpdesk</i>
Indikator Pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya pedoman, standar, dan prosedur layanan penanganan gangguan/masalah (<i>helpdesk</i>) TIK - Tersedianya aplikasi untuk pencatatan dan sebagai manajemen pengetahuan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan - Tersedianya petugas <i>helpdesk</i> yang menerima, mencatat, dan melakukan penanganan masalah pada tingkat pertama
Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2025-2027
Keterangan	

2.3.5. Survey Pengguna Layanan (PR-L-004)

Tabel 2.3.5.1. Program Kerja Survey Penggunaan Layanan

Deskripsi	:	Melakukan survey kepada ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Bisnis dan Masyarakat yang menggunakan layanan SPBE.
Spesifikasi		1. Survei Kepuasan Penggunaan Aplikasi Layanan Pemerintahan

	2. Survei Kepuasan Penggunaan Aplikasi Layanan Publik
Detail	: Melakukan survei dengan metode pengukuran efektivitas layanan SPBE
Indikator Pencapaian	: Telah dilakukannya pengukuran layanan SPBE dan melakukan perbaikan atas masukan yang ada.
Pelaksana	: Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Organisasi
Tahun Pelaksanaan	2025-2029
Keterangan	: Survey kepuasan pengguna SPBE juga perlu disandingkan dengan analisis Indeks Kepuasan Masyarakat di masing-masing jika diperlukan.

2.4. Aplikasi SPBE

2.4.1. Pengembangan Aplikasi (PR-A-001)

Tabel 2.4.1.1. Program Kerja Pengembangan Aplikasi

Deskripsi	: Pengembangan aplikasi yang diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menjadi prioritas utama (yang paling mudah untuk diimplementasikan dan memberikan <i>impact</i> yang signifikan). Aplikasi yang bersifat pelayanan publik juga menjadi prioritas utama pengembangan.
Spesifikasi	: <p>Daftar aplikasi usulan perangkat daerah yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:</p> <p>Tahap 1 (Tahun 2025):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Aplikasi SITANA 2. Pengembangan Aplikasi SIMPELOG 3. Pengembangan Aplikasi e-Presence 4. Pengembangan Aplikasi Elegan 5. Pengembangan Aplikasi GIS 6. Pengembangan Aplikasi MyKulon Progo 7. Pengembangan Aplikasi SIPERI 8. Pengembangan Aplikasi SITALA 9. Pengembangan Aplikasi SPMB 10. Pengembangan Aplikasi SIMBOK 11. Pengembangan Aplikasi Satu Data Kulon Progo 12. Pengembangan Aplikasi SITEKTONIK 13. Pengembangan Aplikasi Timeline Kulon Progo 14. Pengembangan Aplikasi SIMPEG 15. Pengembangan Aplikasi SKM 16. Pengembangan Aplikasi SEMARAK 17. Pengembangan Aplikasi SIVERO 18. Pengembangan Aplikasi SIMBANGDA 19. Pengembangan Aplikasi Sirumah 20. Pengembangan Aplikasi Letsgomen

	<ul style="list-style-type: none"> 21. Pengembangan Aplikasi Layak Menikah Ijabah 22. Pengembangan Aplikasi SIPATMA 23. Pengembangan Aplikasi SIBUBA 24. Pengembangan Aplikasi E-Tax <p>Tahap 2 (Tahun 2026):</p> <ul style="list-style-type: none"> 25. Pengembangan Aplikasi MyKulon Progo 26. Pengembangan Aplikasi SIMBOK BLONJO 27. Pengembangan Aplikasi SIRDA 28. Pengembangan Aplikasi SIPKALI 29. Pengembangan Aplikasi Satu Data Kulon Progo 30. Pengembangan Aplikasi SITEKTONIK 31. Pengembangan Aplikasi Timeline Kulon Progokab 32. Pengembangan Aplikasi SIMPEG 33. Pengembangan Aplikasi SIMPRITANE <p>Tahap 3 (Tahun 2027):</p> <ul style="list-style-type: none"> 34. Pengembangan Aplikasi SIAPPIKE POL 35. Pengembangan Aplikasi SIM PKB DISHUB Kulon Progo
Indikator Pencapaian	: Terimplementasinya aplikasi-aplikasi yang direncanakan.
Pelaksana	: Perangkat Daerah terkait dan Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2025-2027
Keterangan	<p>Pengembangan dapat dilakukan secara mandiri dengan bantuan DISKOMINFO, maupun pengadaan aplikasi melalui pihak ketiga (vendor) sesuai kebijakan pada pemerintah daerah. Prioritas pengembangan aplikasi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada tahun-tahun berjalan dan juga dari sisi pengguna apakah aplikasi tersebut merupakan aplikasi untuk layanan publik atau layanan di internal pemerintah daerah sendiri</p> <p>Pengembangan aplikasi seyogyanya berkoordinasi dengan DISKOMINFO dan mengikuti standar pengembangan teknologi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk menghindari lock-in vendor.</p>

2.4.2. Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (API Gateway) (PR-A-002)

Tabel 2.4.2.1. Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (api gateway)

Deskripsi	: Sistem penghubung layanan pemerintah untuk memfasilitasi Integrasi antara pemerintah dan masyarakat, serta memudahkan penyelenggaraan layanan publik.
Spesifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kebutuhan bisnis dan tujuan penggunaan API Gateway.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan Desain API Gateway 3. Pengembangan dan Konfigurasi API Gateway 4. Pengujian API Gateway 5. Implementasi API Gateway 6. Dokumentasi API Gateway 7. Pemeliharaan API Gateway
Indikator Pencapaian	: Integrasi antar aplikasi sudah menggunakan API dan telah didokumentasikan dengan baik.
Pelaksana	: Dinas Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah terkait
Tahun Pelaksanaan	2025-2029
Keterangan	:

2.4.3. Pengembangan Portal Data dan *Dashboard (Big Data)* (PR-A-003)

Tabel 2.4.3.1. Pengembangan Portal Data dan *Dashboard Analytics (Big Data)*

Deskripsi	: Guna mendukung pemanfaatan data sektoral sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pimpinan maka perlu <i>Data Warehouse</i> dan <i>Dashboard Analytics</i> .
Spesifikasi	: Aplikasi <i>dashboard</i> dan <i>data warehouse</i> setidaknya akan memiliki fitur: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Report builder</i>, memiliki kemampuan menyusun laporan secara <i>custom</i> sesuai kebutuhan pimpinan. 2. <i>Data mining</i> dan <i>warehousing</i>, memiliki kemampuan kustomisasi sumber data, dan memiliki <i>local temporary</i> data. 3. Integrasi <i>back office application</i>, yang secara default pengambilan data terintegrasi dengan aplikasi <i>back office</i> yang berjalan. 4. Aplikasi <i>dashboard</i> harus memiliki kualitas yang baik/<i>user friendly</i> saat diakses dari perangkat <i>mobile</i> maupun PC.
Indikator Pencapaian	: Implementasi aplikasi <i>Data Warehouse</i> dan <i>Dashboard</i>
Pelaksana	: Dinas Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah terkait
Tahun Pelaksanaan	2025-2029
Keterangan	: Pengembangan dilakukan secara bertahap setiap tahun sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prioritas pengembangan aplikasi.

Layanan Data Terbuka diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 43

2.4.4. Pemeliharaan Aplikasi (PR-A-004)

Tabel 2.4.4.1. Program Kerja Pemeliharaan Aplikasi

Deskripsi	: Pemeliharaan aplikasi untuk memastikan kinerja, keamanan, dan fungsionalitas berkelanjutan seiring berjalannya waktu. Aktivitas pemeliharaan dapat mencakup berbagai aspek, seperti pembaruan perangkat lunak, penambahan fitur baru, perbaikan bug, pemantauan kinerja, dan penanganan perubahan kebutuhan pengguna
Spesifikasi	: Aktivitas pemeliharaan/ <i>upgrade</i> terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan Bug (Bug Fixing) 2. Pembaruan dan Penambahan Fitur (Feature Updates) 3. Pembaruan Keamanan (Security Updates) 4. Optimasi Kinerja (Performance Optimization) 5. Pemantauan dan Analisis (Monitoring and Analytics) 6. Pemeliharaan Database 7. Manajemen Konfigurasi dan Versi 8. Penanganan Perubahan Kebutuhan Pengguna (Change Management)
Indikator Pencapaian	: Aplikasi berjalan lancar secara <i>realtime</i> dan juga berjalan secara maksimal
Pelaksana	: Perangkat Daerah Terkait dan Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2025-2029
Keterangan	: Pemeliharaan Aplikasi dilakukan ketika terjadi perubahan pada proses bisnis, fitur atau regulasi yang ada.

2.5. Infrastruktur SPBE

2.5.1. Peningkatan Kapasitas Ruangan dan Fasilitas Pendukung Pusat Data (PR-I-001)

Tabel 2.5.1.1. Peningkatan Kapasitas Ruangan dan Fasilitas Pendukung Pusat Data

Deskripsi	: Pusat data merupakan lokasi penempatan perangkat <i>server</i> , <i>storage</i> , jaringan, dan keamanan jaringan. <i>Server-server</i> aplikasi yang dikelola oleh Diskominfo Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo berada di pusat data. Pusat Data Diskominfo perlu dipelihara untuk menjaga ketersediaan (<i>availability</i>), dan kinerja (<i>performance</i>) dari layanan infrastruktur <i>server</i> , dan jaringan. Pemeliharaan Pusat Data meliputi perangkat utama seperti <i>server</i> ,
-----------	---

		<p><i>storage</i>, jaringan, dan keamanan jaringan. Selain itu fasilitas pendukung juga perlu pemeliharaan secara rutin seperti catu daya listrik cadangan (Genset, dan UPS), sistem pendingin udara (AC), sistem penanganan kebakaran (APAR), kelistrikan, dan lain-lain.</p>
Spesifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Letak Pusat Data berada gedung Diskominfo Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. 2. Pembagian ruangan area ruang <i>server</i>, <i>staging</i>, kelistrikan, UPS dan <i>Battery</i>, AC Presisi dan <i>Fire Suppression System</i>. 3. Sistem Kelistrikan. 4. Sistem Pendingin. 5. Sistem Jaringan Data. 6. Sistem Penanganan Kebakaran. 7. Sistem Pemantau Kondisi Lingkungan. 8. Sistem Keamanan Fisik. 9. Pemeliharaan perangkat utama seperti <i>server</i>, <i>storage</i>, perangkat jaringan, dan keamanan meliputi Sistem Operasi, <i>firmware</i>, <i>patch</i>, dan suku cadang.
Indikator Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembagian ruangan pusat data mengikuti standar dari SNI Pusat Data atau standar ANSI/TIA-942. 2. Fasilitas pendukung pusat data mengikuti standar dari SNI Pusat Data seperti adanya sistem pendingin ruangan terpusat, sistem pemadam kebakaran, dan lainnya. 3. Perlunya jalur khusus kabel data yang terpisah dengan kabel daya listrik dengan jarak minimal 40 - 60 cm. Kabel data perlu diberikan penanda (<i>labelling</i>). 4. Fasilitas utama dan fasilitas pendukung Pusat Data Diskominfo dipelihara secara mandiri atau menggunakan jasa pihak ketiga. 5. Sistem operasi, <i>firmware</i>, <i>patch</i> perangkat <i>server</i>, <i>storage</i>, jaringan, dan keamanan jaringan adalah versi yang stabil atau direkomendasikan oleh pabrikan dan tidak ada celah keamanan. 6. Laporan pemeliharaan perangkat utama dan perangkat pendukung Pusat Data Diskominfo secara periodik. 7. Tersedianya ruangan untuk gudang perangkat TIK.
Pelaksana	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan		2025-2029
Keterangan	:	Pusat Data diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 16.

2.5.2. Penyusunan Rencana Kapasitas (*Capacity Plan*) Infrastruktur Utama Server dan Storage (PR-I-002)

Tabel 2.5.2.1. Program Kerja Rencana Kapasitas Infrastruktur Utama Server dan Storage

Deskripsi	: Peningkatan rencana kapasitas (<i>Capacity Plan</i>) dilakukan untuk menjaga agar perangkat infrastruktur utama dan fasilitas pendukung pusat data dapat tetap beroperasi dengan normal. Kegiatan ini untuk menjaga ketersediaan dan keandalan dari layanan sistem informasi yang dikelola oleh Diskominfo. Rencana kapasitas meliputi kebutuhan spesifikasi teknis <i>server</i> , <i>storage</i> , infrastruktur jaringan, perangkat keamanan jaringan, dan fasilitas pendukung (sistem kelistrikan, luar ruangan, sistem pendingin).
Spesifikasi	: Kegiatan penyusunan rencana kapasitas infrastruktur utama <i>server</i> dan <i>storage</i> meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. perangkat utama <ul style="list-style-type: none"> - <i>server untuk virtualisasi</i>; - <i>server colocation</i>; - <i>lisensi OS dan manajemen virtualisasi</i>; - <i>storage</i>; - perangkat jaringan; dan - perangkat keamanan jaringan. 2. fasilitas pendukung <ul style="list-style-type: none"> - sistem kelistrikan (UPS, <i>Genset</i>); - sistem pendingin ruangan (AC); - sistem pemadam kebakaran (<i>Fire Suppression</i>, APAR); dan - pengendali keamanan (<i>access door</i>, CCTV).
Indikator Pencapaian	: Dokumen hasil rencana kapasitas infrastruktur utama <i>server</i> dan <i>storage</i> meliputi kondisi utilisasi perangkat minimal tiga bulan terakhir berdasarkan alat pemantau (<i>monitoring tools</i>), rencana pengembangan aplikasi/sistem, dan analisa kebutuhan pengembangan kapasitas.
Pelaksana	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2025
Keterangan	: -

2.5.3. Pengadaan Pusat Pemulihan Bencana (PR-I-003)

Tabel 2.5.3.1. Pengadaan Pusat Pemulihan Bencana

Deskripsi	: Untuk menjaga tingkat ketersediaan dan kinerja layanan sistem informasi maka diperlukan lokasi cadangan penempatan server dan lainnya di Pusat Pemulihan Bencana. Sehingga jika terjadi kegagalan pada sistem informasi di pusat data maka operasionalisasi sistem aplikasi dipindah ke Pusat Pemulihan Bencana. Spesifikasi dan jumlah perangkat utama seperti <i>server</i> , <i>storage</i> , jaringan, dan keamanan di Pusat Pemulihan Bencana harus sama dengan yang ada di pusat data.
-----------	--

Spesifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak fisik lokasi Pusat Pemulihan Bencana minimal lebih dari 40 km dari Pusat Data Diskominfo. 2. Aplikasi/sistem yang tergolong kritis sudah dilakukan replikasi/<i>backup</i> ke Pusat Pemulihan Bencana. 3. Spesifikasi dan jumlah perangkat utama seperti <i>server</i>, <i>storage</i>, infrastruktur jaringan dan keamanan jaringan di Pusat Pemulihan Bencana sama seperti yang ada di Pusat Data khususnya untuk server aplikasi yang tergolong kritis.
Indikator Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan lokasi pusat pemulihan bencana minimal dengan jarak 40 km dari pusat data saat ini; 2. Lokasi pusat pemulihan bencana bisa menggunakan jasa dari pihak ketiga (provider); 3. Spesifikasi dan jumlah perangkat utama seperti <i>server</i>, <i>storage</i>, infrastruktur jaringan dan keamanan jaringan di Pusat Pemulihan Bencana sama seperti yang ada di pusat data khususnya untuk <i>server</i> aplikasi yang tergolong kritis. 4. Aplikasi/sistem yang tergolong kritis sudah dilakukan <i>backup</i>/replikasi ke Pusat Pemulihan Bencana.
Pelaksana	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	:	2025-2029
Keterangan	:	-

2.5.4. Uji Coba Pemulihan Bencana Secara Periodik (PR-I-004)

Tabel 2.5.4.1. Program Kerja Uji Coba Pemulihan Bencana Secara Periodik

Deskripsi	:	Untuk menjamin ketersediaan dan keandalan dari layanan Sistem Informasi di Pusat Pemulihan Bencana maka perlu dilakukan uji coba Rencana Pemulihan Bencana (<i>Disaster Recovery Plan - DRP</i>) secara periodik minimal satu tahun sekali. Kegiatan ini untuk memastikan <i>backup</i> dan replikasi yang sudah dilakukan dapat digunakan dan sesuai dengan harapan.
Spesifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Pusat Pemulihan Bencana (DRC). 2. Spesifikasi dan jumlah server terutama yang tergolong kritis sama dengan yang ada di Pusat Data. 3. Aplikasi/Sistem Informasi terutama yang tergolong kritis sudah dilakukan <i>backup</i> dan replikasi <i>real time</i> ke Pusat Pemulihan Bencana.
Indikator Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen Kebijakan, Standar, dan Prosedur Rencana Pemulihan Bencana (DRP). 2. Status <i>backup</i> dan replikasi aplikasi, file, dan <i>database</i> dari pusat data ke Pusat

	<p>Pemulihan Bencana berjalan normal.</p> <ol style="list-style-type: none"> File <i>backup</i> dan replikasi dapat digunakan dan sesuai dengan kondisi terakhir. Infrastruktur dan layanan aplikasi di Pusat Pemulihan Bencana dapat digunakan untuk menggantikan yang ada di Pusat Data selama rentang waktu tertentu. Dokumentasi dan evaluasi kegiatan pemulihan bencana dari Pusat Data ke Pusat Pemulihan Bencana.
Pelaksana	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2025-2029
Keterangan	: -

2.5.5. Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah (PR-I-005)

Tabel 2.5.5.1. Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah

Deskripsi	: Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah (JIP) yang dikelola oleh Diskominfo Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo meliputi jaringan internet, jaringan antar pusat data, jaringan di perangkat daerah/UPT (Unit Pelaksana Teknis), dan interkoneksi dengan lembaga lain. Infrastruktur JIP perlu dipelihara untuk menjamin ketersediaan dan keandalan dari layanan JIP kepada pengguna internal maupun eksternal (masyarakat).
Spesifikasi	: Infrastruktur JIP terdiri dari perangkat jaringan (<i>router, switch, access point</i>), perangkat keamanan jaringan (<i>next-generation firewall</i>), koneksi internet dari <i>provider</i> internet, jaringan kabel <i>fiber optic</i> , dan radio link yang menghubungkan ke perangkat daerah/UPT (Unit Pelaksana Teknis) dan lokasi lainnya, kabel UTP, dan lainnya. Perangkat - perangkat yang tergolong kritis seperti <i>router internet</i> dan <i>switch core</i> terdiri dari 2 (dua) unit (<i>redundant</i>), dengan konfigurasi <i>High Availability (HA)</i> . Perangkat lainnya seperti <i>switch access</i> menggunakan <i>manageable switch</i> sehingga dapat dipantau, dan dikonfigurasi.
Indikator Pencapaian	: <ol style="list-style-type: none"> Tersedianya koneksi jaringan internet lebih dari satu penyedia jasa layanan internet (ISP), dan dikonfigurasi aktif semua; Tersedianya perangkat jaringan inti, seperti: <i>router, switch</i> inti, <i>next generation firewall</i> yang redundan. Perangkat jaringan menggunakan yang <i>manageable</i> sehingga dapat dipantau melalui alat pemantau, dan dikonfigurasi secara jarak jauh (<i>remote</i>). Berfungsinya perangkat jaringan untuk melayani interkoneksi jaringan intra pemda dan jaringan internet.
Pelaksana	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2025-2029

Keterangan : Jaringan Intra Pemerintah Daerah diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 17.

2.5.6. Pemeliharaan Jaringan Dalam Kab Interkoneksi Perangkat Daerah/UPT (Unit Pelaksana Teknis) (PR-I-006)

Tabel 2.5.6.1. Pemeliharaan Jaringan Dalam Kab Interkoneksi Perangkat Daerah/UPT (Unit Pelaksana Teknis)

Deskripsi	Koneksi jaringan dalam Kab (<i>Metropolitan Area Network</i>) yang menghubungkan <i>Network Operation Center</i> Diskominfo dengan kantor perangkat daerah/UPT (Unit Pelaksana Teknis) di beberapa lokasi perlu terus dipelihara untuk menjaga ketersediaan, keandalan, dan keamanannya.
Spesifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Daerah/UPT (Unit Pelaksana Teknis) sudah terkoneksi dengan NOC Diskominfo. 2. Akses aplikasi intranet berjalan dengan lancar. 3. Akses internet kantor perangkat daerah/UPT (Unit Pelaksana Teknis) melalui NOC Diskominfo.
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua perangkat daerah/UPT (Unit Pelaksana Teknis) sudah terkoneksi dengan jaringan intra yang dikelola oleh Diskominfo. 2. Infrastruktur jaringan koneksi antar perangkat daerah/UPT (Unit Pelaksana Teknis) dalam masa pemeliharaan baik oleh pihak Diskominfo atau menggunakan pihak ketiga. 3. Jika pemeliharaan diserahkan kepada pihak ketiga, Diskominfo dan pihak ketiga menetapkan garansi layanan (SLA) dan waktu tanggap. 4. SLA yang telah ditetapkan dapat dipenuhi.
Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2025-2029
Keterangan	-

2.5.7. Pengembangan Infrastruktur Jaringan Data Nirkabel (*WiFi*) Terintegrasi (PR-I-007)

Tabel 2.5.7.1. Pengembangan Infrastruktur Jaringan Data Nirkabel (*WiFi*) Terintegrasi

<p>Deskripsi</p>	<p>Layanan jaringan data nirkabel (<i>WiFi</i>) yang dikelola oleh Diskominfo tersedia di kantor perangkat daerah/UPT (Unit Pelaksana Teknis), dan area umum tertentu. Pengguna yang menggunakan jaringan data nirkabel tersebut dapat mengakses aplikasi intranet, internet, maupun keduanya.</p> <p>Untuk menjamin ketersediaan, dan kinerja dari layanan jaringan data nirkabel maka infrastruktur jaringan data nirkabel perlu dikembangkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan lalu lintas data, proses, dan pengguna yang semakin besar serta untuk melindungi keamanan lalu lintas data.</p>
<p>Spesifikasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan <i>wifi</i> menggunakan protokol keamanan <i>WPA2-Enterprise (Wireless Fidelity Protected Access 2-Enterprise)</i>. Protokol ini menggunakan autentikasi 802.1X atau <i>EAP (Extensible Authentication Protocol)</i>. <i>EAP</i> merupakan protokol <i>layer 2</i> yang menggantikan <i>PAP</i> dan <i>CHAP</i>. 2. <i>Setting security WPA enterprise/corporate</i> ini membutuhkan sebuah server khusus yang berfungsi sebagai pusat autentikasi seperti <i>Server RADIUS (Remote Authentication Dial-In Service)</i>. Dengan adanya radius server ini, otentikasi akan dilakukan <i>per-client</i> sehingga tidak perlu lagi memasukkan <i>passphrase</i> atau <i>network key</i> yang sama untuk setiap <i>client</i>. 3. <i>Server RADIUS</i> dapat menggunakan <i>Active Directory</i> atau <i>LDAP</i>. 4. <i>Acces Point</i> mendukung mode <i>roaming</i> yakni jika pengguna berpindah tempat maka koneksi ke <i>Access Point</i> akan menyesuaikan dengan yang terdekat tanpa perlu melakukan otentikasi lagi. 5. Terdapat perangkat <i>WiFi Controller</i> untuk pengelolaan dan operasional (manajemen) <i>Access Point</i> dan lainnya.
<p>Indikator Pencapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat perangkat <i>Wireless LAN Controller (WLC)</i> melakukan <i>setting</i> dan konfigurasi beberapa perangkat <i>access point</i> pada satu perangkat <i>controller</i>. 2. Otentikasi pengguna <i>WiFi</i> sudah menggunakan protokol keamanan <i>WPA2-Enterprise</i> berdasarkan <i>username</i> dan <i>password</i> yang tersimpan di <i>Server LDAP</i> atau <i>Active Directory</i>. 3. Pengguna yang berpindah tempat tidak perlu lagi melakukan otentikasi ulang.
<p>Pelaksana</p>	<p>Dinas Komunikasi dan Informatika</p>
<p>Tahun Pelaksanaan</p>	<p>2025-2027</p>
<p>Keterangan</p>	<p>-</p>

2.5.8. Pembangunan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) (PR-I-008)

Tabel 2.5.8.1. Pembangunan SPLP

Deskripsi	<p>Sistem penghubung layanan pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan dengan pemerintah pusat. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.</p> <p>Sistem Penghubung Layanan Pemerintah terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Integrasi Data Proses integrasi dilakukan langsung pada basis data atau struktur data dari aplikasi dengan mengabaikan presentasi atau <i>business logic</i> ketika membuat integrasi. Integrasi Presentasi Proses integrasi dengan membuat antarmuka pengguna (<i>user interface</i>) yang menyediakan akses pada beberapa aplikasi. Integrasi Fungsional Diskominfo telah memiliki salah satu Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yakni integrasi data dengan menggunakan teknologi API dan telah memiliki infrastruktur API <i>Management</i>. <p>Sistem Penghubung Layanan Pemerintah perlu diamankan untuk menjaga integritas dari data yang dipertukarkan serta untuk menjaga ketersediaan dari layanan.</p>
Spesifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>API Gateway</i> Intranet untuk layanan <i>service</i> aplikasi internal dengan koneksi intranet. 2. <i>API Gateway</i> Ekstranet untuk layanan <i>service</i> aplikasi Kementerian/Lembaga dengan koneksi internet. 3. Pengembangan portal dengan basis <i>Single Sign On</i> (SSO). 4. Perangkat perlindungan keamanan <i>API Gateway</i>.
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya perangkat atau aplikasi untuk pengamanan SPL (<i>API Gateway</i>, SSO) yakni <i>Web Application Firewall</i> (WAF). 2. <i>API Gateway</i>, dan Sistem SSO terlindungi oleh WAF.
Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2025-2027
Keterangan	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 18.

2.6. Keamanan Informasi

2.6.1. Penyusunan Kebijakan dan Manajemen Keamanan SPBE (PR-K-001)

Tabel 2.6.1.1 Program Kerja Penyusunan Kebijakan dan Manajemen Keamanan SPBE

Deskripsi	<p>Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE. Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE.</p> <p>Manajemen Keamanan Informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi.</p> <p>Penerapan Keamanan Informasi berlandaskan penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non-repudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi.</p>
Spesifikasi	<p>Penyusunan Kebijakan Keamanan dan Manajemen SPBE meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Penetapan ruang lingkup- penanggung jawab- perencanaan: penyusunan program, pendokumentasian, manajemen resiko- dukungan pengoperasian: penganggaran- evaluasi keamanan- perbaikan berkelanjutan <p>Referensi yang dapat digunakan yakni Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,</p>
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya dokumen kebijakan dan manajemen keamanan SPBE sesuai dengan Perban BSSN Nomor 4 Tahun 2021.2. Pelaksanaan sertifikasi ISO 27001:2022 pada layanan yang mengelola data penting Pemda dan data kependudukan.
Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2025
Keterangan	-

2.6.2. Penyusunan SOP Keamanan Data dan Informasi (PR-K-002)

Tabel 2.6.2.1. Program Kerja Penyusunan SOP Keamanan Data dan Informasi

Deskripsi	Standar Teknis keamanan data dan informasi meliputi: <ol style="list-style-type: none">1. Kerahasiaan;2. Keaslian;3. Keutuhan;4. Kenirsangkalan; dan5. Ketersediaan.
Spesifikasi	Daftar SOP mengacu pada Standar Teknis pada Perban BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SOP Klasifikasi Informasi; <ol style="list-style-type: none">1. SOP Enkripsi (dengan sistem kriptografi);2. SOP Pembatasan Akses terhadap Data dan Informasi;3. SOP Verifikasi, dan Validasi Keaslian Data dan Informasi;4. SOP Implementasi <i>Hash Function</i>;5. SOP Pendeteksian Modifikasi;6. SOP Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi;7. SOP Sistem Pencadangan (<i>backup</i>); dan8. SOP Sistem Pemulihan (<i>recovery</i>).
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya dokumen standar teknis keamanan data dan informasi meliputi kerahasiaan, keaslian, keutuhan, kenirsangkalan, dan ketersediaan.2. Tersedianya dokumen SOP untuk keamanan data dan informasi sesuai dengan rincian di spesifikasi.
Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2025
Keterangan	-

2.6.3. Penyusunan SOP Keamanan Aplikasi SPBE (PR-K-003)

Tabel 2.6.3.1. Program Kerja Penyusunan SOP Keamanan Aplikasi SPBE

Deskripsi	<p>Standar teknis keamanan aplikasi SPBE berbasis <i>web</i> meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Autentikasi.2. Manajemen sesi.3. Persyaratan kontrol akses.4. Validasi <i>input</i>.5. Kriptografi pada verifikasi statis.6. Penanganan <i>error</i> dan pencatatan <i>log</i>.7. Proteksi data.8. Keamanan komunikasi.9. Pengendalian kode berbahaya.10. Logika bisnis.11. File.12. Keamanan API dan <i>web service</i>, dan13. Keamanan konfigurasi. <p>Standar Teknis keamanan aplikasi SPBE berbasis <i>mobile</i> meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyimpanan data dan persyaratan privasi;2. Kriptografi;3. Autentikasi dan manajemen sesi;4. Komunikasi jaringan;5. Interaksi <i>platform</i>;6. Kualitas kode dan pengaturan <i>build</i>; dan7. Ketahanan.
Spesifikasi	<p>Standar dan prosedur keamanan aplikasi berdasarkan Perban BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar kata sandi (<i>password</i>) meliputi jumlah karakter, kombinasi jenis karakter, dan masa berlaku dari kata sandi;2. SOP Klasifikasi Data, untuk data tergolong rahasia seperti kata sandi maka penyimpanannya dengan mekanisme kriptografi;3. SOP Jalur Komunikasi Aplikasi yang Aman;4. SOP Kontrol Akses Aplikasi;5. SOP Kriptografi;6. SOP Rekam Jejak;7. SOP <i>Error Handling</i> Aplikasi;8. SOP Pertukaran, Penghapusan, dan Audit Informasi;9. SOP Sertifikat Elektronik; dan10. SOP Konfigurasi <i>Server</i>;

<p>Indikator Pencapaian</p>	<p>a. Tersedianya dokumen standar teknis keamanan aplikasi <i>web</i> meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Autentikasi, ○ Manajemen sesi; ○ Persyaratan kontrol akses; ○ Validasi <i>input</i>; ○ Kriptografi pada verifikasi statis; ○ Penanganan <i>error</i> dan pencatatan <i>log</i>; ○ Proteksi data; ○ Keamanan komunikasi; ○ Pengendalian kode berbahaya; ○ Logika bisnis; ○ File; ○ Keamanan API dan <i>web service</i>; dan ○ Keamanan konfigurasi. <p>b. Tersedianya dokumen SOP untuk keamanan aplikasi web sesuai dengan rincian di spesifikasi;</p> <p>c. Tersedianya dokumen standar teknis keamanan aplikasi mobile meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ penyimpanan data dan persyaratan privasi; ○ kriptografi; ○ autentikasi dan manajemen sesi; ○ komunikasi jaringan; ○ interaksi <i>platform</i>; ○ kualitas kode dan pengaturan <i>build</i>; dan ○ ketahanan. <p>d. Tersedianya dokumen SOP untuk keamanan aplikasi mobile sesuai dengan rincian di spesifikasi.</p>
<p>Pelaksana</p>	<p>Dinas Komunikasi dan Informatika</p>
<p>Tahun Pelaksanaan</p>	<p>2025</p>
<p>Keterangan</p>	<p>-</p>

2.6.4. Penyusunan SOP Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (PR-K-004)

Tabel 2.6.4.1. Program Kerja Penyusunan SOP Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Deskripsi	<p>Standar teknis keamanan Sistem Penghubung Layanan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keamanan interoperabilitas data dan informasi 2. kontrol sistem integrasi 3. kontrol perangkat integrator 4. keamanan API dan <i>web service</i> 5. keamanan migrasi data
Spesifikasi	<p>Standar dan prosedur Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah berdasarkan Perban BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Dokumen dan Surat Elektronik 2. SOP <i>Update</i> Sistem Operasi dan Perangkat Lunak 3. SOP Sistem <i>Recovery</i> dan <i>Restore</i> pada perangkat integrator 4. SOP Migrasi Data 5. SOP Implementasi Kriptografi pada proses Penyimpanan dan Pengambilan Data 6. SOP Validasi Data ketika Proses Migrasi Data Selesai
Indikator Pencapaian	<p>Tersedianya dokumen standar teknis keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keamanan interoperabilitas data dan informasi 2. kontrol sistem integrasi 3. kontrol perangkat integrator 4. keamanan API dan <i>web service</i> 5. keamanan migrasi data <p>Tersedianya dokumen SOP keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sesuai dengan rincian di spesifikasi.</p>
Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2025
Keterangan	SOP SPLP Daerah diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 18.

2.6.5. Penyusunan SOP Keamanan Jaringan Intra Pemerintah (PR-K-005)

Tabel 2.6.5.1. Program Kerja Penyusunan SOP Keamanan Jaringan Intra Pemerintah

Deskripsi	<p>Standar teknis keamanan Jaringan Intra Pemerintah berdasarkan Perban BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Aspek administrasi keamanan jaringan intra;2. Kontrol akses dan autentikasi;3. Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra;4. Kontrol keamanan <i>gateway</i>;5. Kontrol keamanan <i>access point</i> pada jaringan nirkabel; dan6. Kontrol konfigurasi <i>access point</i> pada jaringan nirkabel.
Spesifikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen arsitektur jaringan intra2. Dokumen aset infrastruktur jaringan3. SOP Pemeliharaan keamanan jaringan intra4. Laporan pengawasan keamanan jaringan secara periodik5. SOP akses perangkat jaringan6. SOP konfigurasi perangkat jaringan7. SOP layanan <i>Virtual Private Network (VPN)</i>8. SOP akses <i>server database</i>9. Aplikasi <i>security information and event management</i> untuk <i>network logging, monitoring, dan analytics</i>10. Perangkat <i>next generation firewall</i> (termasuk IPS atau IDS)11. SOP pembaruan sistem operasi, <i>firmware</i>, dan <i>patch</i> perangkat jaringan12. Perangkat <i>load balancer</i> koneksi jaringan dan aplikasi <i>web</i>13. Perangkat <i>Web Application Firewall (WAF)</i>14. Pemasangan sertifikat elektronik15. Penerapan <i>content filtering</i>16. SOP akses jarak jauh17. SOP layanan akses <i>WiFi</i>18. Implementasi <i>SSID</i> untuk jaringan nirkabel

Indikator Pencapaian	<p>Tersedianya dokumen standar teknis keamanan Jaringan Intra Pemerintah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek administrasi keamanan Jaringan Intra 2. Kontrol akses dan autentikasi 3. Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra 4. Kontrol keamanan <i>gateway</i> 5. Kontrol keamanan <i>access point</i> pada jaringan nirkabel 6. Kontrol konfigurasi <i>access point</i> pada jaringan nirkabel <p>Tersedianya dokumen SOP keamanan Jaringan Intra Pemerintah sesuai dengan rincian di spesifikasi.</p> <p>Terdapat perangkat pendukung keamanan jaringan Intra meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Next Generation Firewall</i> termasuk didalamnya fitur IPS/IDS 2. <i>Web Application Firewall (WAF)</i> 3. <i>Load Balancer</i> untuk koneksi jaringan 4. <i>Load Balancer</i> untuk aplikasi <i>web</i> 5. Perangkat <i>Content Filtering</i> 6. Sertifikat SSL
Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2025-2027
Keterangan	SOP Jaringan Intra Pemerintah diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 17.

2.6.6. Sertifikasi Standar Keamanan Informasi (Indeks KAMI/ ISO 27001) (PR-K-006)

Tabel 2.6.6.1. Program Kerja Sertifikasi Standar Keamanan Informasi (Indeks KAMI/ ISO 27001)

Deskripsi	Layanan TIK SPBE (Aplikasi, Jaringan, <i>Data Center</i>) perlu disertifikasi keamanannya untuk menjamin tingkat keamanan dan kepercayaan dari pengguna. Standar sertifikasi dapat mengacu pada standar internasional keamanan informasi yakni ISO 27001.
Spesifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Lingkup Sertifikasi - Asesmen awal menggunakan Indeks KAMI - Pendampingan Sertifikasi - Sertifikasi ISO 27001 oleh lembaga yang sudah tersertifikasi KAN (Komite Akreditasi Nasional)

Indikator Pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi ruang lingkup untuk standar keamanan informasi (indeks KAMI/ISO 27001) - Pendampingan sertifikasi ISO 27001 atau indeks KAMI - Sertifikasi ISO 27001 atau indeks KAMI
Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2025-2027
Keterangan	-

2.6.7. Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi (PR-K-007)

Tabel 2.6.7.1. Program Kerja Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi

Deskripsi	Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi (<i>Vulnerability Assessment and Penetration Testing - (VAPT)</i>) terhadap jaringan, server, dan aplikasi yang dikelola oleh DISKOMINFO.
Spesifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Kerentanan (<i>Vulnerability Assessment</i>) jaringan, server, dan aplikasi web 2. <i>Penetration Testing</i> terhadap jaringan, server, dan aplikasi web menggunakan metode <i>black box</i> 3. Dokumen hasil asesmen dan <i>penetration testing</i> beserta rekomendasinya
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi ruang lingkup penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi 2. Pelaksanaan penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi 3. Evaluasi hasil pelaksanaan penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi
Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2025-2029
Keterangan	-

2.6.8. Edukasi dan Sosialisasi Keamanan SPBE (PR-K-008)

Tabel 2.6.9.1. Program Kerja Edukasi Keamanan SPBE

Deskripsi	Serangan siber akan terus meningkat frekuensinya dan tekniknya. Objek yang paling rentan terhadap serangan keamanan siber adalah manusianya. Oleh karena itu kesadaran keamanan informasi harus selalu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi.
Spesifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan strategi edukasi dan sosialisasi keamanan SPBE 2. Pembentukan tim pelaksana 3. Implementasi edukasi dan sosialisasi keamanan SPBE 4. Evaluasi hasil implementasi edukasi dan sosialisasi keamanan SPBE 5. Tindak lanjut dari hasil evaluasi
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen strategi edukasi dan sosialisasi keamanan SPBE 2. Tersedianya tim pelaksana 3. Implementasi edukasi keamanan SPBE melalui kegiatan webinar, <i>focus group discussion</i> (FGD), simulasi, dan lain - lain 4. Implementasi sosialisasi keamanan SPBE melalui sosial media (instagram, WA Group, Facebook, dll) secara periodik 5. Tersedianya dokumentasi evaluasi 6. Tersedianya dokumentasi tindak lanjut
Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2025
Keterangan	-

2.7. Audit SPBE

2.7.1. Pelaksanaan Audit TIK (PR-AT-001)

Tabel 2.7.1.1. Program kerja Audit TIK

Deskripsi	: Melakukan Audit TIK secara berkala
Spesifikasi	: <p>Audit SPBE dilakukan secara internal dan eksternal, Audit TIK terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE. <ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan tim audit aplikasi SPBE b. Pelaksanaan audit internal aplikasi SPBE c. Pelaksanaan audit eksternal aplikasi SPBE d. Evaluasi hasil pelaksanaan audit aplikasi SPBE e. Perbaiki aplikasi SPBE sesuai rekomendasi hasil audit

	<ul style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE. <ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan tim audit infrastruktur SPBE b. Pelaksanaan audit internal infrastruktur SPBE c. Pelaksanaan audit eksternal infrastruktur SPBE d. Evaluasi hasil pelaksanaan audit infrastruktur SPBE e. Perbaikan infrastruktur SPBE sesuai rekomendasi hasil audit 3. Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE <ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan tim audit keamanan SPBE b. Pelaksanaan audit internal keamanan SPBE c. Pelaksanaan audit eksternal keamanan SPBE d. Evaluasi hasil pelaksanaan audit keamanan SPBE e. Perbaikan keamanan SPBE sesuai rekomendasi hasil audit
Indikator Pencapaian	: Terlaksananya Audit SPBE secara periodik
Pelaksana	: Dinas Komunikasi dan Informatika dan Inspektorat
Tahun Pelaksanaan	2025-2029
Keterangan	: Audit TIK diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 29-31.

Bab III Peta Rencana SPBE

3.1. Penyelarasan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo 2025-2029

Sasaran dalam Peta Rencana SPBE 2025 - 2029 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, inisiatif strategis dalam Peta Rencana SPBE Kabupaten Kulon Progo disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, dimana setiap aspek telah diselaraskan dengan prinsip integrasi, interoperabilitas, dan keberlanjutan dalam pembangunan SPBE. Adapun aktivitas yang menjadi bagian dari peta rencana SPBE juga disusun secara *inline* dengan arsitektur SPBE kondisi target (*to-be*) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang juga telah sesuai dengan program Rencana Strategis (Renstra) masing-masing OPD terkait, sehingga setiap inisiatif yang dikembangkan sejalan dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah. Dengan demikian diharapkan penyusunan Peta Rencana SPBE ini dapat memperkuat pelaksanaan gerakan SPBE dalam meningkatkan indeks maturitas atau kematangan pelaksanaan indikator-indikator yang terdapat di evaluasi SPBE. Selain itu, transformasi digital Peta Rencana di Kabupaten Kulon Progo tidak hanya selaras dengan kebutuhan daerah, tetapi juga mendukung pencapaian visi nasional dalam mewujudkan pemerintahan digital yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Tabel 3.1.1 Peta Rencana SPBE

No.	Proyek/Aktivitas	Status	Target					UIC
			2025	2026	2027	2028	2029	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat								
Indikator	Usia Harapan Hidup		75,50-79,75	75,58-79,83	75,65-79,90	75,73-79,98	75,80-80,05	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Kesehatan untuk Semua								
1	Layanan							
	A Pengembangan Layanan Prioritas (PR-L-02)							Dinas Kesehatan
	A.1 Evaluasi Layanan Kesehatan Digital (PR-L-02-02)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
2	Aplikasi							
	A Pembuatan Aplikasi							

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	A.1	Pembuatan Aplikasi Satu Pintu LebkesKu	Planned			1 Aplikasi			Dinas Kesehatan
	A.2	Pembuatan Aplikasi SIMOBAT	Planned		1 Aplikasi				RSUD Nyi Ageng Serang
	B	Pembuatan Aplikasi							
	B.1	Pengembangan Aplikasi SimoKu	Planned	1 Aplikasi					Dinas Kesehatan
3	Infrastruktur								
	A	Penyediaan Perangkat Peripheral							
	A.1	Pengadaan Laptop	Executed	2 Unit					RSUD Wates
	A.2	Pengadaan PC	Executed	1 Unit					RSUD Nyi Ageng Serang
	A.3	Pengadaan PC	Planned	17 Unit					RSUD Wates
	A.4	Pengadaan Printer	Executed	5 Unit					RSUD Wates
	A.5	Pengadaan Scanner	Executed	3 Unit					RSUD Wates
	A.6	Pengadaan UPS	Executed	15 Unit					RSUD Wates
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat									
Indikator	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)			7,38	7,42	7,46	7,50	7,54	
Indikator	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM dan Pelanggaran PERDA			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Ketertiban Masyarakat Terintegrasi									
1	Layanan								
	A	Pengembangan Layanan Prioritas (PR-L-02)							Satuan Polisi Pamong Praja
	A.1	Evaluasi Layanan Kepolisian Digital (PR-L-02-09)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
2	Aplikasi								
	A	Pengembangan Aplikasi							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	A.1	Pengembangan Aplikasi BangsaKU	Planned	1 Aplikasi					
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Meningkatnya Kemandirian Daerah									
Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto			41,02-42,22	41,03-42,23	41,04-42,24	41,05-42,25	41,06-42,26	
Indikator	PDRB Per Kapita (ADHB)			40.043-40.272	42.865-43.357	45.874-46.666	49.087-50.221	52.516-54.036	
Indikator	Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum			684,46-1.228,98	766,86-1.360,34	857,40-1.504,26	956,80-1.661,85	1.063,43-1.831,90	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Investasi Terintegrasi									
1	Layanan								
	A	Optimalisasi Layanan RB Tematik (PR-L-01)							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
	A.1	Layanan Investasi (PR-L-01-02)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Meningkatnya Kesesuaian Peruntukan Ruang									
Indikator	Persentase Kesesuaian Pola Ruang			89,90	89,95	90,00	90,05	90,10	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Pertanahan									
1	Layanan								

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	A	Penerapan Layanan TIK							Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	A.1	Pendataan Tata Ruang Webgis	Planned	1 Kegiatan					
2	Aplikasi								
	A	Pengembangan Aplikasi							Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	A.1	Pengembangan Aplikasi SIMTARUKU	Planned	1 Aplikasi					
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana									
Indikator	Indeks Ketahanan Daerah			0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Informasi dan Deteksi Dini Bencana Berbasis Geospasial									
1	Aplikasi								
	A	Pengembangan Aplikasi							Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	A.1	Pengembangan Aplikasi SIBELAKU	Planned	1 Aplikasi					
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat									
Indikator	Harapan Lama Sekolah			14,63–15,72	14,7–15,79	14,78–15,87	14,85–15,94	14,93–16,01	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Pendidikan Berkualitas									
1	Layanan								
	A	Pengembangan Layanan Prioritas (PR-L-02)							Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	A.1	Evaluasi Layanan Pendidikan Digital (PR-L-02-01)	Planned	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan			
2	Infrastruktur								
	B	Penyediaan Perangkat Peripheral							Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	B.1	Pengadaan Laptop	Planned	1 Kegiatan					
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel									
Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) / Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi)			4,11-4,61	1,41-1,50	1,41-1,50	1,51-1,60	1,51-1,60	
Indikator	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)			A (84,2)	A (85,3)	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	
Indikator	Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah (Opini BPK)			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat			86,85	86,90	86,95	87,00	87,05	
Indikator	Indeks Maturitas SPIP			3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Koordinasi Penerapan SPBE									
1	Tata Kelola								
	A	Kebijakan Internal Arsitektur SPBE (PR-T-01)							
	A.1	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Arsitektur SPBE (PR-T-01-01)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	B	Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE (PR-T-02)							
	B.1	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Peta Rencana SPBE (PR-T-02-01)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	C	Kebijakan Internal Manajemen Data SPBE (PR-T-03)							

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	C.1	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Manajemen Data (PR-T-03-01)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	D	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE (PR-T-04)							
	D.1	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE (PR-T-04-01)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	E	Kebijakan Internal Pusat Data SPBE (PR-T-05)							
	E.1	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Pusat Data (PR-T-05-01)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	F	Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (PR-T-06)							
	F.1	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (PR-T-06-01)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	G	Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (PR-T-06)							
	G.1	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (PR-T-06-01)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	H	Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat (PR-T-07)							
	H.1	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (PR-T-06-01)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	I	Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat (PR-T-07)							

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	I.1	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat (PR-T-07-01)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	J	Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi (PR-T-08)							
	J.1	Penyusunan dan Reviu Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi (PR-T-08-01)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	K	Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (PR-T-09)							
	K.1	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (PR-T-09-01)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	L	Kebijakan Tim koordinasi SPBE (PR-T-10)							
	L.1	Penyusunan dan Reviu Kebijakan Tim koordinasi SPBE (PR-T-10-10)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	M	Pembentukan Komite/Forum SPBE (PR-T-11)							
	M.1	Evaluasi Perbup / Sk Tim Koordinasi SPBE (PR-T-11-01)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	M.2	Evaluasi Perbup / Sk Komite Forum Satu Data (PR-T-11-02)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	M.3	Evaluasi Perbup / SK Komite Manajemen Risiko (PR-T-11-03)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Inspektorat
	M.4	Evaluasi Perbup / Sk Komite Manajemen Perubahan (PR-T-11-04)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Bagian Organisasi

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	M.5	Evaluasi Perbup / Sk Komite Manajemen Pengetahuan (PR-T-11-05)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	M.6	Evaluasi Perbup / Sk Pokja Manajemen Layanan (PR-T-11-06)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Bagian Organisasi
	M.7	Evaluasi Perbup / Sk Pokja Manajemen Keamanan Informasi (PR-T-11-07)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	N	Kolaborasi SPBE (PR-T-12)							
	N.1	Evaluasi pelaksanaan penerapan RB tematik digitalisasi / Indeks SPBE Internal (PR-T-12-02)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Bagian Organisasi
	N.2	Pelaksanaan kolaborasi penerapan RB tematik digitalisasi / SPBE (PR-T-12-01)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Bagian Organisasi
	O	Evaluasi dan Revisi Tata Kelola SPBE (PR-T-13)							
	0.1	Evaluasi dan Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE (PR-T-13-01)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	0.2	Monitoring dan Evaluasi Rencana Anggaran TIK (PR-T-13-02)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	0.3	Evaluasi dan Revisi Prose Bisnis Pemerintah Daerah (PR-T-13-03)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Bagian Organisasi
	0.4	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Aplikasi Pemerintah Daerah (PR-T-13-04)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	0.5	Monitoring dan Evaluasi Tim Koordinasi SPBE (PR-T-13-05)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	A.9	Penyusunan rencana penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya (PR-M-01-09)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Inspektorat
	A.10	Penyusunan laporan evaluasi manajemen risiko SPBE secara periodik dan insidental (PR-M-01-10)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Inspektorat
	B	Penyusunan dan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi (PR-M-02)							
	B.1	Pembentukan tim keamanan informasi (PR-M-02-01)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	B.2	Penyusunan SOP keamanan informasi mengacu pada Perban BSSN No. 4 Tahun 2021 (PR-M-02-02)	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	B.3	Membuat postingan keamanan informasi pada media informasi (PR-M-02-03)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	B.4	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE (PR-M-02-04)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	B.5	Evaluasi dan perbaikan manajemen keamanan informasi (PR-M-02-05)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	C	Penyusunan dan Penerapan Manajemen Data (PR-M-03)							
	C.1	Pembentukan tim satu data (PR-M-03-01)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC	
				2025	2026	2027	2028	2029		
		C.2	Penyusunan pedoman manajemen data (PR-M-03-02)	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		C.3	Pembaharuan arsitektur data (PR-M-03-03)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		C.4	Pengumpulan data sektoral di masing-masing unit kerja (PR-M-03-04)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		C.5	Pemeriksaan pemenuhan data sektoral (PR-M-03-05)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		C.6	Penyebarluasan data sektoral (PR-M-03-06)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		C.7	Pembaruan data sektoral secara berkala (PR-M-03-07)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika,

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	C.8	Penyimpanan data pada portal open data (PR-M-03-08)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	C.9	Penjaminan kualitas data meliputi daftar data, data prioritas, dan jadwal pemutakhiran data (PR-M-03-09)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	D	Penyusunan dan Penerapan Manajemen Aset TIK (PR-M-04)							
	D.1	Penyusunan SOP perencanaan aset TIK (PR-M-04-01)	Planned	1 Kegiatan					Badan Keuangan dan Aset Daerah
	D.2	Penyusunan SOP pengadaan aset TIK (PR-M-04-02)	Planned	1 Kegiatan					Badan Keuangan dan Aset Daerah
	D.3	Penyusunan SOP atas penghapusan aset TIK (PR-M-04-03)	Planned	1 Kegiatan					Badan Keuangan dan Aset Daerah
	D.4	Menginventarisasi aset SPBE (aplikasi dan infrastruktur) (PR-M-04-04)	Planned	1 Kegiatan					Badan Keuangan dan Aset Daerah
	D.5	Evaluasi dan perbaikan manajemen aset TIK (PR-M-04-05)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	E	Penyusunan dan Penerapan Manajemen SDM TIK (PR-M-05)							

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	E.1	Pengadaan SDM Developer Internal Pemerintah Daerah (PR-M-05-01)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
	E.2	Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja Jabatan TIK (PR-M-05-02)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
	E.3	Analisis Kebutuhan Pelatihan SDM TIK (PR-M-05-03)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
	E.4	Pelatihan SDM TIK (PR-M-05-04)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
	E.5	Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM TIK (PR-M-05-05)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
	F	Penyusunan dan Penerapan Manajemen Pengetahuan (PR-M-06)							
	F.1	Pembentukan komite manajemen pengetahuan (PR-M-06-01)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	F.2	Penyusunan pedoman manajemen pengetahuan (kebijakan dan SOP) (PR-M-06-02)	Planned	1 Kegiatan					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	F.3	Pelaksanaan manajemen pengetahuan dengan aplikasi (PR-M-06-03)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	F.4	Evaluasi dan perbaikan manajemen pengetahuan (PR-M-06-04)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	G	Penyusunan dan Penerapan Manajemen Perubahan (PR-M-07)							

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	G.1	Pembentukan komite manajemen perubahan (PR-M-07-01)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Bagian Organisasi
	G.2	Penyusunan pedoman / SOP manajemen perubahan SPBE (PR-M-07-02)	Planned	1 Kegiatan					Bagian Organisasi
	G.3	Penyusunan form log manajemen perubahan (PR-M-07-03)	Planned	1 Kegiatan					Bagian Organisasi
	G.4	Pelaksanaan manajemen perubahan SPBE (PR-M-07-04)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Bagian Organisasi
	G.5	Evaluasi dan perbaikan manajemen perubahan (PR-M-07-05)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Bagian Organisasi
	H	Penyusunan dan Penerapan Manajemen Layanan TIK (PR-M-08)							
	H.1	Identifikasi dan Analisa Layanan Pemerintah Daerah (PR-M-08-01)	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	H.2	Penyusunan Dokumen Manajemen Layanan Pemerintah Daerah (PR-M-08-02)	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	H.3	Evaluasi dan Perbaikan Layanan Pemerintah Daerah (PR-M-08-03)	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Layanan								
	A	Pengembangan Portal Layanan Terintegrasi (PR-L-03)							
	A.1	Analisis Kebutuhan Layanan Publik (PR-L-03-01)	Planned	1 Aplikasi		1 Kegiatan		1 Kegiatan	Bagian Organisasi
	A.2	Pengembangan Modul Layanan Publik (PR-L-03-02)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Bagian Organisasi

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	A.3	Monitoring dan Evaluasi Layanan Publik (PR-L-03-03)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Bagian Organisasi
	B	Pengembangan Platform Helpdesk TIK (PR-L-04)							
	B.1	Analisa Kebutuhan Pengembangan Helpdesk TIK (PR-L-04-01)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Dinas Komunikasi dan Informatika
	B.2	Pelaksanaan Pengembangan Helpdesk TIK (PR-L-04-02)	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	B.3	Evaluasi Pelaksanaan Helpdesk TIK (PR-L-04-03)	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	C	Survey Penggunaan Layanan (PR-L-05)							
	C.1	Survey Kepuasan Layanan Internal (PR-L-05-01)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			Bagian Organisasi
	C.2	Survey Kepuasan Layanan Publik (PR-L-05-02)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			Bagian Organisasi
4 Aplikasi									
	A	Pengembangan sistem penghubung layanan pemerintah (api gateway) (PR-A-02)							
	A.1	Penyusunan Analisis Kebutuhan API Gateway (PR-A-02-01)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	A.2	Pengembangan dan Pengujian API Gateway (PR-A-02-02)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	A.3	Dokumentasi API Gateway (PR-A-02-03)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	B	Pengembangan portal data dan dashboard (big data) (PR-A-03)							

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	B.1	Pengembangan Report builder, Data mining dan warehousing, Integrasi back office application (PR-A-03-01)	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	B.2	Penyusunan Kajian Big Data	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	C	Pemeliharaan aplikasi (PR-A-04)							
	C.1	Pemantauan kesehatan dan kinerja dari server aplikasi (web server, database server, application server) menggunakan aplikasi pemantauan seperti MRTG, LibreNMS, dan lain - lain. (PR-A-04-01)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	C.2	Melakukan perbaikan pada saat ditemukan error/bug (PR-A-04-02)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	C.3	Mempertahankan agar sistem tetap berjalan dengan optimal (PR-A-04-03)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	C.4	Melakukan upgrade patch keamanan, maupun patch performa sistem (PR-A-04-04)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Audit TI								
	A	Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE (PR-AI-01)							
	A.1	Pembentukan tim audit infrastruktur SPBE (PR-AI-01-01)	Planned	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	Inspektorat
	A.2	Pelaksanaan audit internal infrastruktur SPBE (PR-AI-01-02)	Planned	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	Inspektorat

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	A.3	Pelaksanaan audit eksternal infrastruktur SPBE (PR-AI-01-03)	Planned	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	Inspektorat
	A.4	Evaluasi hasil pelaksanaan audit infrastruktur SPBE (PR-AI-01-04)	Planned	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	Inspektorat
	A.5	Perbaikan infrastruktur SPBE sesuai rekomendasi hasil audit (PR-AI-01-05)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Inspektorat
	B	Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE (PR-AA-02)							
	B.1	Pembentukan tim audit aplikasi SPBE (PR-AA-02-01)	Planned	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	Inspektorat
	B.2	Pelaksanaan audit internal aplikasi SPBE (PR-AA-02-02)	Planned	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	Inspektorat
	B.3	Pelaksanaan audit eksternal aplikasi SPBE (PR-AA-02-03)	Planned	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	Inspektorat
	B.4	Evaluasi hasil pelaksanaan audit aplikasi SPBE (PR-AA-02-04)	Planned	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	Inspektorat
	B.5	Perbaikan aplikasi SPBE sesuai rekomendasi hasil audit (PR-AA-02-05)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Inspektorat
	C	Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE (PR-AK-03)							
	C.1	Pembentukan tim audit keamanan SPBE (PR-AK-03-01)	Planned	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	Inspektorat
	C.2	Pelaksanaan audit internal keamanan SPBE (PR-AK-03-02)	Planned	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	Inspektorat
	C.3	Pelaksanaan audit eksternal keamanan SPBE (PR-AK-03-03)	Planned	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	Inspektorat

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	C.4	Evaluasi hasil pelaksanaan audit keamanan SPBE (PR-AK-03-04)	Planned	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	Inspektorat
	C.5	Perbaiki keamanan SPBE sesuai rekomendasi hasil audit (PR-AK-03-05)	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Inspektorat
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil									
1 Layanan									
	A	Pengembangan Layanan Prioritas (PR-L-02)							
	A.1	Evaluasi Layanan Administrasi Kependudukan Digital (PR-L-02-04)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 Infrastruktur									
	A	Pemeliharaan Perangkat Jaringan							
	A.1	Pemeliharaan Jaringan	Planned		1 Kegiatan				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	B	Penyediaan Perangkat Peripheral							
	B.1	Pengadaan Keyboard	Planned		2 Unit				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	B.2	Pengadaan Laptop	Planned		3 Unit				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	B.3	Pengadaan Mouse	Planned		2 Unit				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	B.4	Pengadaan PC	Planned		5 Unit				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	B.5	Pengadaan Scanner	Executed	1 Unit					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Administrasi Pemerintahan									
1	Tata Kelola								
	A	Tata Kelola Pemerintahan							
	A.1	Jasa Konsultasi Penyusunan Masterplan Smartcity	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Layanan								
	A	Pengembangan Layanan Prioritas (PR-L-02)							
	A.1	Evaluasi Layanan Transaksi Keuangan Digital (PR-L-02-05)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			Badan Keuangan dan Aset Daerah
	A.2	Evaluasi Layanan Administrasi Pemerintah Digital (PR-L-02-06)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			Bagian Organisasi
	A.3	Evaluasi Layanan Portal Layanan Publik Digital (PR-L-02-07)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			Bagian Organisasi
3	Aplikasi								
	A	Pembuatan Aplikasi							
	A.1	Pembuatan Aplikasi myPOTENSI	Planned	1 Aplikasi					Badan Keuangan dan Aset Daerah
	A.2	Pembuatan Aplikasi SIMAGENDA	Planned		1 Aplikasi				Bagian Protokol dan Rumah Tangga

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	A.3	Pembuatan Aplikasi SIMKD	Planned		1 Aplikasi				Bagian Protokol dan Rumah Tangga
	B	Pengembangan Aplikasi							
	B.1	Pengembangan Aplikasi CSRKU	Planned			1 Kegiatan			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	B.2	Pengembangan Aplikasi e-BPHTB	Planned	1 Aplikasi					Badan Keuangan dan Aset Daerah
	B.3	Pengembangan Aplikasi e-Layanan	Planned	1 Aplikasi					Badan Keuangan dan Aset Daerah
	B.4	Pengembangan Aplikasi e-SPPT	Planned	1 Aplikasi					Badan Keuangan dan Aset Daerah
	B.5	Pengembangan Aplikasi e-SPTPD	Planned	1 Aplikasi					Badan Keuangan dan Aset Daerah
	B.6	Pengembangan Aplikasi ePBJKU	Planned	1 Aplikasi					Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	B.7	Pengembangan Aplikasi Inovasi-ku	Planned			1 Kegiatan			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	B.8	Pengembangan Aplikasi MyPBB	Planned	1 Aplikasi					Badan Keuangan dan Aset Daerah
	B.9	Pengembangan Aplikasi SIM-Aset	Planned	1 Aplikasi					Badan Keuangan dan Aset Daerah
	B.10	Pengembangan Aplikasi SIM-Persediaan	Planned	1 Aplikasi					Badan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	B.1 1	Pengembangan Aplikasi SIMPATDA	Planned	1 Aplikasi					Badan Keuangan dan Aset Daerah
	B.1 2	Pengembangan Aplikasi SISMIOP	Planned	1 Aplikasi					Badan Keuangan dan Aset Daerah
4 Infrastruktur									
	A	Peningkatan Kapasitas Ruangan dan Fasilitas Pendukung Ruang Server (PR-I-01)							
	A.1	Asesmen kondisi saat ini ruangan dan perangkat pendukung ruang server (sistem pendingin ruangan, sistem pemadam kebakaran, ups, genset) (PR-I-01-01)	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	A.2	Identifikasi rencana pengembangan aplikasi/sistem informasi ke depan (PR-I-01-02)	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	A.3	Penyusunan rencana pengembangan ruangan dan perangkat pendukung ruang server (PR-I-01-03)	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	A.4	Pelaksanaan pengembangan ruangan dan perangkat pendukung ruang server (PR-I-01-04)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			Dinas Komunikasi dan Informatika
	B	Penyusunan Rencana Kapasitas (Capacity Plan) Infrastruktur Utama Server dan Storage (PR-I-02)							
	B.1	Asesmen kondisi utilisasi dan kinerja server dan storage saat ini (PR-I-02-01)	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	B.2	Asesmen kondisi server dan jaringan untuk memastikan ketersediaan, kehandalan layanan TIK PR-I-02-02)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	B.3	Penyusunan rencana kapasitas server dan storage untuk 4 tahun ke depan PR-I-02-03)	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	B.4	Penyediaan Server virtualisasi beserta lisensinya secara colocation untuk mendukung ketersediaan tinggi layanan TIK PR-I-02-04)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Dinas Komunikasi dan Informatika
	B.5	Identifikasi kebutuhan pengembangan aplikasi/sistem informasi PR-I-02-05)	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	C	Pengadaan Pusat Pemulihan Bencana (PR-I-03)							
	C.1	Asesmen kondisi utilisasi dan kinerja server dan storage di pusat pemulihan bencana (PR-I-03-01)	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	C.2	Identifikasi aplikasi/sistem informasi yang sudah atau belum dicadangkan di pusat pemulihan bencana (PR-I-03-02)	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	C.3	Penyusunan kebutuhan server dan storage untuk aplikasi/sistem informasi yang belum dicadangkan di pusat pemulihan bencana (PR-I-03-03)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			Dinas Komunikasi dan Informatika
	C.4	Pengadaan server, storage, perangkat lunak, perangkat jaringan dan lain - lain untuk cadangan aplikasi/sistem informasi di pusat pemulihan bencana (PR-I-03-04)	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	D	Uji Coba Pemulihan Bencana Secara Periodik (PR-I-04)							
	D.1	Penyusunan dokumen rencana kontinuitas bisnis (business continuity plan) dan rencana pemulihan bencana (disaster recovery plan) (PR-I-04-01)	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	D.2	Penyusunan skenario uji coba pemulihan bencana (PR-I-04-02)	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	D.3	Uji coba pemulihan bencana (PR-I-04-03)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	D.4	Evaluasi hasil uji coba pemulihan bencana (PR-I-04-04)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	E	Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah (PR-I-05)							
	E.1	Asesmen kondisi saat ini utilisasi kapasitas dan kinerja infrastruktur jaringan intra pemerintah (PR-I-05-01)	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	E.2	Identifikasi kendala atau permasalahan yang terjadi (PR-I-05-02)	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	E.3	Identifikasi kebutuhan layanan jaringan intra pemerintah 4 tahun ke depan (PR-I-05-03)	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	E.4	Penyusunan rencana pengembangan kapasitas dan keandalan jaringan intra pemerintah (PR-I-05-04)	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	E.5	Pelaksanaan pengembangan kapasitas dan keandalan jaringan intra pemerintah (PR-I-05-05)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	E.6	Evaluasi pelaksanaan pengembangan kapasitas dan keandalan jaringan intra pemerintah (PR-I-05-06)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	F	Pemeliharaan Jaringan Dalam Kabupaten Interkoneksi Perangkat Daerah/UPT (Unit Pelaksana Teknis) (PR-I-06)							

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	F.1	Perangkat daerah / UPT (Unit Pelaksana Teknis) terkoneksi JIP diskominfo (PR-I-06-01)	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	F.2	Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan antar Perangkat daerah / UPT (Unit Pelaksana Teknis) (PR-I-06-02)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	F.3	Terpenuhi SLA (PR-I-06-03)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	G	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Data Nirkabel (WiFi) Terintegrasi (PR-I-07)							
	G.1	Asesmen kondisi infrastruktur jaringan data nirkabel saat ini (PR-I-07-01)	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	G.2	Identifikasi kendala, permasalahan dan isu keamanan jaringan data nirkabel (PR-I-07-02)	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	G.3	Identifikasi target pengembangan infrastruktur jaringan data nirkabel (implementasi protokol WPA2-enterprise, fitur roaming, dll) (PR-I-07-03)	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	G.4	Penyusunan rencana pengembangan dan kebutuhan anggaran infrastruktur jaringan data nirkabel (PR-I-07-04)	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	G.5	Pelaksanaan pengembangan infrastruktur jaringan data nirkabel (PR-I-07-05)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	G.6	Evaluasi pelaksanaan pengembangan infrastruktur jaringan data nirkabel (PR-I-07-06)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	H	Pembangunan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) (PR-I-08)							
	H.1	Integrasi Data (PR-I-08-01)	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	H.2	Integrasi Presentasi (PR-I-08-02)	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	H.3	Integrasi Fungsional (PR-I-08-03)	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	I	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (PR-I-09)							
	I.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	J	Pemeliharaan Perangkat Jaringan							
	J.1	Pemeliharaan Jaringan Internet	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	J.2	Pemeliharaan Jaringan Intra	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	J.3	Pemeliharaan Jaringan LAN	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	K	Pemeliharaan Perangkat Peripheral							
	K.1	Pemeliharaan Komputer	Planned	2 Unit					Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	K.2	Pemeliharaan PC	Planned		1 Kegiatan				Dinas Komunikasi dan Informatika
	K.3	Pemeliharaan Peralatan Komputer	Planned	1 Unit					Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
	K.4	Pemeliharaan Printer	Planned		1 Kegiatan				Dinas Komunikasi dan Informatika
	L	Penyediaan Perangkat Jaringan							
	L.1	Pengadaan Bandwitch Internet	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	L.2	Pengadaan Lisensi Internet Protokol	Planned		1 Kegiatan				Dinas Komunikasi dan Informatika
	L.3	Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Planned	1 Paket					Dinas Komunikasi dan Informatika
	M	Penyediaan Perangkat Keras Server							
	M.1	Pengadaan Perangkat Server	Planned		1 Unit				Dinas Komunikasi dan Informatika
	M.2	Pengadaan Server	Planned		1 Unit				Dinas Komunikasi dan Informatika
	M.3	Pengadaan Storage Server	Planned		6 Unit				Dinas Komunikasi dan Informatika
	M.4	Pengadaan UPS Server	Planned		1 Unit				Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	N	Penyediaan Perangkat Keras Storage							
	N.1	Pengadaan Hardisk	Planned	2 Unit					Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
	O	Penyediaan Perangkat Peripheral							
	0.1	Pengadaan Laptop	Executed	1 Unit					Dinas Komunikasi dan Informatika
	0.2	Pengadaan Laptop	Planned	2 Unit					Sekretariat DPRD
	0.3	Pengadaan Laptop	Planned		1 Unit				Dinas Komunikasi dan Informatika
	0.4	Pengadaan Laptop	Planned		4 Unit				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	0.5	Pengadaan LCD Proyektor	Planned		1 Unit				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	0.6	Pengadaan Lisensi Internet Protokol	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	0.7	Pengadaan Lisensi Zoom	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Dinas Komunikasi dan Informatika
	0.8	Pengadaan PC	Planned	1 Unit					Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
	0.9	Pengadaan PC	Planned		2 Unit				Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	0.1 0	Pengadaan Printer	Planned	1 Unit					Sekretariat DPRD
	0.1 1	Pengadaan Printer	Planned	2 Unit					Sekretariat DPRD
	0.1 2	Pengadaan Printer	Planned	3 Unit					Bagian Protokol dan Rumah Tangga
	0.1 3	Pengadaan Printer	Planned		1 Unit				Dinas Komunikasi dan Informatika
	0.1 4	Pengadaan Printer	Planned		2 Unit				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	0.1 5	Pengadaan Scanner	Planned	1 Unit					Bagian Protokol dan Rumah Tangga
	0.1 6	Pengadaan Smartphone	Executed	1 Unit					Dinas Komunikasi dan Informatika
	0.1 7	Pengadaan TV LED	Planned		1 Unit				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	0.1 8	Pengadaan UPS	Planned		2 Unit				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Digital Data Terbuka Pemerintahan									
1 Layanan									
	A	Pengembangan Layanan Prioritas (PR-L-02)							

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	A.1	Evaluasi Layanan Satu Data Indonesia Digital (PR-L-02-08)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			Dinas Komunikasi dan Informatika
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Digital Pertanian									
1	Infrastruktur								
	A	Penyediaan Perangkat Jaringan							
	A.1	Pengadaan Perangkat Jaringan	Planned	1 Unit					Dinas Pertanian dan Pangan
	B	Penyediaan Perangkat Peripheral							
	B.1	Pengadaan CCTV	Planned		1 Set				Dinas Pertanian dan Pangan
	B.2	Pengadaan Laptop	Planned	1 Unit	3 Unit				Dinas Pertanian dan Pangan
	B.3	Pengadaan PC	Planned	2 Unit					Dinas Pertanian dan Pangan
	B.4	Pengadaan Printer	Planned	2 Unit					Dinas Pertanian dan Pangan
	B.5	Pengadaan Scanner	Planned	1 Unit					Dinas Pertanian dan Pangan
	B.6	Pengadaan Tablet	Planned	1 Unit					Dinas Pertanian dan Pangan
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Hukum Masyarakat									
1	Aplikasi								

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	A	Pengembangan Aplikasi							
	A.1	Pengembangan Aplikasi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)	Planned	1 Aplikasi					Bagian Hukum
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Industri Terintegrasi									
1 Infrastruktur									
	A	Penyediaan Perangkat Jaringan							
	A.1	Penyediaan Jaringan Internet	Planned	1 Unit					Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Informasi dan Deteksi Dini Bencana Berbasis Geospasial									
1 Infrastruktur									
	A	Penyediaan Perangkat Peripheral							
	A.1	Pengadaan LCD Proyektor	Executed	1 Unit					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Informasi Terintegrasi									
1 Aplikasi									
	A	Pembuatan Aplikasi							
	A.1	Pembuatan Aplikasi Dashboard Pimpinan	Planned	1 Aplikasi					Dinas Komunikasi dan Informatika
	A.2	Pembuatan Aplikasi Media Analitik IKPS	Planned		1 Aplikasi				Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	B	Pengembangan Aplikasi							
	B.1	Pengembangan Aplikasi Website Pemerintahan	Planned	1 Aplikasi					Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Infrastruktur								
	A	Penyediaan Perangkat Peripheral							
	A.1	Pengadaan Laptop	Executed	1 Unit					Dinas Komunikasi dan Informatika
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Keamanan, Siber, Sandi dan Sinyal									
1	Infrastruktur								
	A	Penyediaan Perangkat Lunak							
	A.1	Pengadaan Lisensi Software Firewall	Planned	1 Unit					Dinas Komunikasi dan Informatika
	B	Penyediaan Perangkat Peripheral							
	B.1	Pengadaan Lisensi Antivirus	Planned	75 Unit					Dinas Komunikasi dan Informatika
	B.2	Pengadaan Lisensi Software Firewall	Planned		1 Unit				Dinas Komunikasi dan Informatika
	B.3	Pengadaan Lisensi SSL	Planned	1 Unit	1 Unit				Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Keamanan								
	A	Penyusunan SOP Keamanan Data dan Informasi (PR-K-01)							

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	A.1	Penyusunan SOP Keamanan Data dan Informasi (PR-K-01-01)	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	A.2	Evaluasi SOP Keamanan Data dan Informasi (PR-K-01-02)	Planned		1 Kegiatan				Dinas Komunikasi dan Informatika
	B	Penyusunan SOP Keamanan Aplikasi SPBE (PR-K-02)							
	B.1	Penyusunan SOP Keamanan Aplikasi SPBE (PR-K-02-01)	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	B.2	Evaluasi SOP Keamanan Aplikasi SPBE (PR-K-02-02)	Planned		1 Kegiatan				Dinas Komunikasi dan Informatika
	C	Penyusunan SOP Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (PR-K-03)							
	C.1	Penyusunan SOP Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (PR-K-03-01)	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	C.2	Evaluasi SOP Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (PR-K-03-02)	Planned		1 Kegiatan				Dinas Komunikasi dan Informatika
	D	Penyusunan SOP Keamanan Jaringan Intra Pemerintah (PR-K-04)							
	D.1	Penyusunan SOP Keamanan Jaringan Intra Pemerintah (PR-K-04-01)	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
	D.2	Evaluasi SOP Keamanan Jaringan Intra Pemerintah (PR-K-04-02)	Planned		1 Kegiatan				Dinas Komunikasi dan Informatika
	E	Sertifikasi Standar Keamanan Informasi (Indeks KAMI/ ISO 27001) (PR-K-05)							

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	E.1	Identifikasi ruang lingkup untuk standar keamanan informasi (Indeks KAMI/ISO 27001) (PR-K-05-01)	Planned	1 Kegiatan			1 Kegiatan		Dinas Komunikasi dan Informatika
	E.2	Pendampingan sertifikasi ISO 27001 atau indeks KAMI (PR-K-05-03)	Planned	1 Kegiatan			1 Kegiatan		Dinas Komunikasi dan Informatika
	E.3	Sertifikasi ISO 27001 atau indeks KAMI (PR-K-05-04)	Planned	1 Kegiatan			1 Kegiatan		Dinas Komunikasi dan Informatika
	F	Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi (PR-K-06)							
	F.1	Identifikasi ruang lingkup penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi (PR-K-06-01)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	F.2	Pelaksanaan penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi (PR-K-06-02)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	F.3	Evaluasi hasil pelaksanaan penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi (PR-K-06-03)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	G	Edukasi dan Sosialisasi Keamanan SPBE (PR-K-07)							
	G.1	Pelaksanaan Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Keamanan SPBE (PR-K-07-01)	Planned		1 Kegiatan				Dinas Komunikasi dan Informatika
	G.2	Evaluasi Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Keamanan SPBE (PR-K-07-02)	Planned	1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Keberlangsungan Layanan Digital									
1	Infrastruktur								
	A	Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah							

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	A.1	Pemeliharaan Perangkat Jaringan Intra Pemerintah	Planned		1 Kegiatan				Dinas Komunikasi dan Informatika
	B	Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah							
	B.1	Langganan Bandwidth Internet A	Planned		1 Kegiatan				Dinas Komunikasi dan Informatika
	B.2	Langganan Bandwidth Internet B	Planned		1 Kegiatan				Dinas Komunikasi dan Informatika
	B.3	Pengadaan Access Point	Planned		9 Unit				Dinas Komunikasi dan Informatika
	B.2	Pengadaan Router	Planned		10 Unit				Dinas Komunikasi dan Informatika
	B.3	Pengadaan Switch	Planned		26 Unit				Dinas Komunikasi dan Informatika
	C	Penyediaan Perangkat Lunak							
	C.1	Pengadaan Lisensi CPanel	Planned		1 Unit				Dinas Komunikasi dan Informatika
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Kebudayaan Terintegrasi									
1	Infrastruktur								
	A	Penyediaan Perangkat Peripheral							
	A.1	Pengadaan Alat Zoom Meeting	Planned	1 Unit					Dinas Kebudayaan
	A.2	Pengadaan Printer	Planned	1 Unit					Dinas Kebudayaan
	A.3	Pengadaan Scanner	Planned	1 Unit					Dinas Kebudayaan

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Kesehatan untuk Semua									
1	Infrastruktur								
	A	Penyediaan Perangkat Keras Server							
	A.1	Pengadaan Komputer Server	Executed	15 Unit				Dinas Kesehatan	
	B	Penyediaan Perangkat Peripheral							
	B.1	Pengadaan PC	Executed	1 Unit				Dinas Komunikasi dan Informatika	
	B.2	Pengadaan Pusat Data	Executed	1 Unit				Dinas Komunikasi dan Informatika	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Ketenagakerjaan Melalui Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK)									
1	Infrastruktur								
	A	Penyediaan Perangkat Peripheral							
	A.1	Pengadaan Laptop	Executed	1 Unit				Dinas Tenaga Kerja	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Ketertiban Masyarakat Terintegrasi									
1	Infrastruktur								
	A	Penyediaan Perangkat Peripheral							
	A.1	Pengadaan Laptop	Planned		3 Unit			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Lingkungan Hidup Terintegrasi									
1	Infrastruktur								
	A	Penyediaan Perangkat Peripheral							

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	A.1	Pengadaan Printer	Executed	1 Unit					Dinas Lingkungan Hidup
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat									
1 Aplikasi									
	A	Pengembangan Aplikasi							
	A.1	Pengembangan Aplikasi siMPel	Planned	1 Aplikasi					Bagian Administrasi Pembangunan
2 Infrastruktur									
	A	Penyediaan Perangkat Peripheral							
	A.1	Pengadaan Laptop	Executed	1 Unit					Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	A.2	Pengadaan Laptop	Planned		1 Unit				Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	A.3	Pengadaan PC	Executed	1 Unit					Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	A.4	Pengadaan PC	Planned		1 Unit				Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	A.5	Pengadaan Scanner	Executed	1 Unit					Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	A.6	Pengadaan Scanner	Planned		1 Unit				Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Pariwisata Terintegrasi									
1	Infrastruktur								
	A	Penyediaan Perangkat Peripheral							
	A.1	Pengadaan Monitor	Planned		1 Unit				Dinas Pariwisata
	A.2	Pengadaan PC	Planned		3 Unit				Dinas Pariwisata
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Terintegrasi									
1	Infrastruktur								
	A	Penyediaan Perangkat Peripheral							
	A.1	Pengadaan Scanner	Executed	1 Unit					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Perdagangan Terintegrasi									
1	Infrastruktur								
	A	Penyediaan Perangkat Peripheral							

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	A.1	Pengadaan Printer	Planned		3 Unit				Dinas Perdagangan
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Pertanahan									
1	Infrastruktur								
	A	Penyediaan Perangkat Peripheral							
	A.1	Pengadaan Laptop	Planned	1 Unit					Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	A.2	Pengadaan PC	Planned	1 Unit					Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Pusat Data Nasional									
1	Infrastruktur								
	A	Penyediaan Perangkat Keras Server							
	A.1	Pengadaan Server	Planned	2 Unit					Dinas Komunikasi dan Informatika
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Daerah									
Indikator	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum			49,28	50,15	51,03	51,91	52,79	
Indikator	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service/LOS)			A / Arus Bebas (0-0,2)	A / Arus Bebas (0-0,2)	A / Arus Bebas (0-0,2)	A / Arus Bebas (0-0,2)	A / Arus Bebas (0-0,2)	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Transportasi Terintegrasi									
1	Aplikasi								
	A	Pengembangan Aplikasi							

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	A.1	Pengembangan Aplikasi PKB	Planned	1 Aplikasi					Dinas Perhubungan
2	Infrastruktur								
	A	Penyediaan Perangkat Keras Server							
	A.1	Pengadaan Hardware Blue Full Cycle	Executed	1 Aplikasi					Dinas Perhubungan
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Meningkatnya Peran Keberagaman dan Kebudayaan dalam Kehidupan Bermasyarakat									
Indikator	Rata-rata Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Budaya, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, dan Ekspresi Budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan			60,00–61,00	60,50–61,50	61,00–62,00	61,50–62,50	62,00–63,00	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Kebudayaan Terintegrasi									
1	Aplikasi								
	A	Pembuatan Aplikasi							Dinas Kebudayaan
	A.1	Pembuatan Aplikasi BUDAYAKU	Planned		1 Aplikasi				
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat									
Indikator	Pengeluaran Riil Per Kapita yang disesuaikan			11.232,40	11.487,60	11.742,80	11.998,00	12.253,20	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Perlindungan Sosial yang Adaptif									
1	Layanan								
	A	Optimalisasi Layanan RB Tematik (PR-L-01)							Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	A.1	Layanan Kemiskinan (PR-L-01-01)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Target					UIC
				2025	2026	2027	2028	2029	
	B	Pengembangan Layanan Prioritas (PR-L-02)							Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	B.1	Evaluasi Layanan Bantuan Sosial Digital (PR-L-02-03)	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			

Bab IV Penutup

Laporan Peta Rencana SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) ini disusun guna memberikan rencana yang perlu diimplementasikan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Kondisi yang disampaikan dalam laporan ini diperoleh dari proses tabulasi dan analisa kondisi target yang selanjutnya diterjemahkan dalam rencana program kerja terkait SPBE. Laporan Peta Rencana SPBE ini akan dijadikan sebagai landasan dalam implementasi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sesuai bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo selama 5 (lima) tahun mendatang dan juga substansi yang terdapat dalam peta rencana ini perlu dituangkan ke dalam dokumen Rencana Kinerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun berikutnya.

■ ■ ■

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo

DOKUMEN INI MERUPAKAN DOKUMEN YANG SENANTIASA DAPAT BERUBAH (*LIVING DOCUMENT*) SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN PROSES BISNIS DAN TEKNOLOGI SEHINGGA PERLU DILAKUKAN REVIEW SEKURANG-KURANGNYA SETAHUN SEKALI (*ANNUAL REVIEW*).

LAMPIRAN

NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
	Analisis Peta Jabatan					■								
	Rencana atau laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM TIK						■							
	Analisis kebutuhan pelatihan bagi SDM TIK						■							
0	Kelompok Kerja Transformasi Proses Bisnis Digital dan Manajemen Perubahan													
	Evaluasi dan Penyesuaian Peta Proses Bisnis											■		
	Evaluasi Digitalisasi Layanan											■		
	Penyusunan Log Manajemen Perubahan											■		
	Penyusunan SOP Manajemen Perubahan SPBE											■		
	Pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE											■		
1	Kelompok Kerja Penganggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik													
	Evaluasi Substansi Peta Rencana SPBE dalam RKA				■									
	Monitoring dan Clearance Usulan Pengadaan SPBE				■									
2	Kelompok Kerja Manajemen Layanan, Data, Aplikasi, Infrastruktur SPBE													
	Pembentukan SK Tim Helpdesk													
	Pemanfaatan Ticketing System	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Evaluasi & Perbaiki Kinerja Tim Helpdesk											■		
	Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Data							■						
	Penyusunan Daftar Data								■	■	■	■	■	■
	Pengumpulan data sektoral dimasing-masing OPD				■			■			■			
	Pemeriksaan pemenuhan data sektoral		■	■				■			■		■	
	Penyebarnyaan data sektoral				■			■			■			

NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												Keterangan	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des		
	Penyusunan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE														
	Penyesuaian dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE														
6	Kelompok Kerja Manajemen Keamanan Informasi														
	Penyusunan dokumen pedoman Keamanan Informasi														
	Penyusunan dokumen perencanaan keamanan informasi SPBE yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya														
	Menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan resiko SPBE oleh OPD dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE														
	Penyusunan standar teknis dan SOP keamanan SPBE														
	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE														

Wates, 2 Februari 2026
 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN